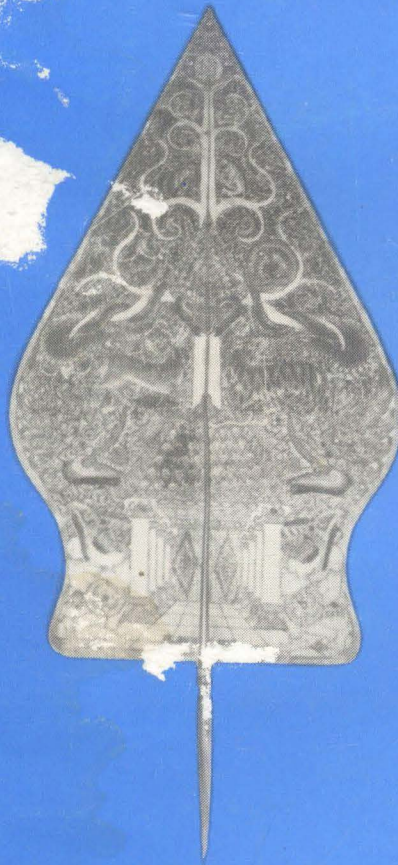




DAMPAK MODERNISASI TERHADAP BUNGAN KEKERABATAN DI DAERAH JAWA TENGAH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**DAMPAK MODERNISASI
TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN
DI DAERAH JAWA TENGAH**

**Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan**

DAMPAK MODERNISASI TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN DI DAERAH JAWA TENGAH

Peneliti/Penulis

Drs. Moehadi
Dra. Titi Pratitis
Drs. Mulyono
Drs. Supriyo Priyanto

Penyempurna/Editor

1. Drs. Sugiarto Dakung
2. Drs. Sindu Galba

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
TAHUN 1988/1989

P R A K A T A

Buku yang berjudul Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Di Daerah Jawa Tengah ini merupakan salah satu hasil kegiatan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Tengah 1982/1983, setelah melalui proses penyuntingan yang dilaksanakan oleh tim pusat akhirnya pada tahun anggaran 1988/1989 buku ini telah dapat diterbitkan.

Dengan diterbitkannya buku ini, disamping memperkaya khasanah perpustakaan kita dapat digunakan pula sebagai penambah dan pelengkap informasi mengenai pola ideal hubungan kekerabatan dilingkungan masyarakat Jawa serta study kebudayaan Jawa pada umumnya.

Berhasilnya usaha ini disamping berkat adanya kerja keras dari tim penyusun dan penyunting, juga karena ada kerja sama yang baik serta bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta instansi-instansi lain yang terkait, demikian juga para informan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Untuk itu kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan tersebut, perkenankan kami sampaikan terima kasih.

Khusus kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dan Pemimpin Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat (Jakarta) yang masing-masing telah berkenan memberikan "Kata Sambutan" dan "Kata Pengantar" pada buku ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Akhirnya harapan kami semoga buku ini ada manfaatnya.



Demarang, September 1988

Pemimpin Proyek

JB. TJOEK SOEWARSO, BA.
NIP. 130218541.

KATA PENGANTAR

Tujuan Proyek inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul "Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah", yang dilakukan oleh IDKD Daerah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah ini adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan Staf IDKD baik pusat maupun daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

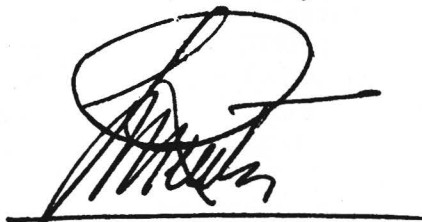
Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Juni 1988

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a horizontal line extending to the right. The signature is written over a solid horizontal line.

Drs. I G.N. Arinton Pudja
NIP. 030 104 524

S A M B U T A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Kami panjatkan puji sjukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena telah berhasil diterbitkannya 1 (satu) buah naskah hasil penelitian Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Tengah tahun anggaran 1982 / 1983 yang berjudul :

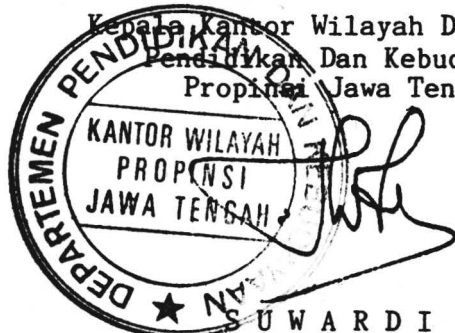
"Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Di Daerah Jawa Tengah". Dengan diterbitkannya buku ini semoga dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat luas akan khasanah budaya bangsa di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Tengah khususnya. Disamping itu dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memacu usaha-usaha untuk penggalan, penyelamatan, pemeliharaan serta pengembangan warisan budaya bangsa seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Tengah, oleh sebab itu dengan penerbitan buku tersebut sangat banyak manfaatnya.

Maka sangat kami hargai penerbitan ini, semoga buku ini akan menjadi sarana penelitian dan kepustakaan yang dapat menunjang kepentingan pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan dibidang kebudayaan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu penerbitan ini.

Semarang, Juli 1988

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah



KANTOR WILAYAH
PROPINSI
JAWA TENGAH

S U W A R D I
NIP. 130430059.

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Agustus 1988

Direktur Jenderal Kebudayaan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI	Halaman
PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD PROPINSI JAWA TENGAH	vii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPDIKBUD	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Masalah	1
2. Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	2
4. Pertanggung Jawaban Penelitian.....	3
BAB II. IDENTIFIKASI	11
1. Lokasi	11
2. Penduduk	24
3. Sistem Mata Pencarian Dan Teknologi ..	28
4. Sistem Kekerabatan	38
BAB III LAPANGAN KERJA DI PERKOTAAN	47
1. Perkembangan Lapangan Kerja	47
2. Tenaga Kerja	57
3. Sifat Hubungan Dan Kesempatan Kerja ...	59
4. Pola Pemukiman Tenaga Kerja	63
BAB IV HUBUNGAN KEKERABATAN	67
1. Pola Hubungan Kekerabatan Dalam Rumah- tangga	67
2. Pola Hubungan Kekerabatan Di Luar Kelu- arga Batih	82
3. Pola Hubungan Kekerabatan Dalam Keluar- ga Luas	100
BAB V BEBERAPA ANALISA	109
1. Pergeseran Kedudukan Dan Peranan Suami Dalam Lingkungan Keluarga	109
2. Pergeseran Kedudukan Dan Peranan Istri Dalam Lingkungan Keluarga	114
3. Pergeseran Kedudukan Dan Peranan Anak Dalam Lingkungan Keluarga	118
DAFTAR PUSTAKA	123
INDEKS	125
LAMPIRAN	129
FOTO-FOTO	133

B A B I

PENDAHULUAN

1. MASALAH

a. Masalah Umum

Modernisasi dapat diartikan sebagai penggeseran sikap dan mentalitas sebagian warga suatu masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan jaman. Oleh karena itu modernisasi pada prinsipnya adalah proses perubahan yang pada waktu tertentu akan mewujudkan suatu kecenderungan dari seseorang untuk bertindak laku secara konsisten terhadap orang atau benda tertentu. Salah satu hal yang mempercepat proses modernisasi adalah pembangunan.

Pembangunan yang pada hakekatnya adalah pembaharuan dalam segala bidang kehidupan, telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di bidang kebudayaan. Perubahan-perubahan yang bersumber pada pergeseran nilai, gagasan dan keyakinan adalah akibat pemakaian dan pendayagunaan hasil-hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap hubungan kekerabatan adalah pertumbuhan dan perkembangan lapangan kerja.

b. Masalah khusus

Pertumbuhan dan perkembangan lapangan kerja dipertanian yang ditandai oleh semakin banyak dan luasnya jenis pekerjaan yang tersedia akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam mobilitas tenaga kerja, jenis tenaga kerja, sifat hubungan kerja dan pola permukiman tenaga kerja. Di lain pihak juga akan membawa pengaruh terhadap pola hubungan kekerabatan yang ada dalam suatu masyarakat. Pengaruh itu akan terlihat sebagai pergeseran dari nilai, gagasan dan keyakinan yang dipunyai oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan kekerabatan yang ada di dalam masyarakat pada dasarnya diatur oleh prinsip-prinsip kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan dalam kenyataannya akan melahirkan jaringan kekerabatan yang berpusat pada seorang individu. Sedang hubungan kekerabatan hubungan yang

dipunyai oleh setiap individu dalam jaringan tersebut. Diperkirakan pertumbuhan dan perkembangan lapangan kerja akan membawa pengaruh terhadap hubungan kekerabatan tersebut.

Struktur keluarga yang umum di perkotaan adalah keluarga batih, yaitu sebuah struktur keluarga yang terbentuk berdasarkan atas seperangkat kedudukan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak mereka.

Modernisasi dapat menimbulkan dampak konstruktif dan yang destruktif. Besar kecilnya pengaruh tergantung pada kedewasaan dan kematangan masyarakat di bidang pendidikan, teknologi, disiplin, moral dan keimanan.

2. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Seperti telah tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan mengenai tujuan umum proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, yaitu agar pihak Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan, untuk keperluan pelaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat;

b. Tujuan Khusus

- b.1. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang "Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan", yaitu bagaimana peranan dan pengaruh kehidupan dalam sistem ekonomi, politik, sosial, kebudayaan nasional.
- b.2. Untuk mengetahui pola ideal hubungan kekerabatan dalam lingkungan keluarga pada suku bangsa Jawa di daerah Jawa Tengah, khususnya dari kalangan penduduk yang bertempat tinggal di kelurahan Pleburan Kotamadya Semarang.
- b.3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak lapangan kerja terhadap hubungan kekerabatan dalam lingkungan keluarga.

3. RUANG LINGKUP

a. Ruang lingkup materi

- a.1. Hubungan kekerabatan dalam lingkungan keluarga

yang berdasarkan prinsip kekeluargaan dengan pola kebiasaan dalam interaksi sosial sesama anggota seperti terlihat dalam bentuk kelompok-kelompok kekerabatan seperti: keluarga inti, rumah tangga, keluarga luas.

- a.2. Lapangan dan kesempatan kerja di perkotaan sebagai hasil pembangunan dengan penggunaan ilmu dan teknologi telah menimbulkan pengaruh terhadap pengembangan lapangan kerja, berbagai macam tenaga kerja yang dibedakan antara ketrampilan dan keahliannya, sifat hubungan dan kesempatan kerja, pola permukiman tenaga kerja.
- a.3. Hubungan kekerabatan berdasarkan dan peranan individu dalam lingkungan keluarga di perkotaan seperti :
 1. Pola hubungan kekerabatan dalam rumah tangga.
 2. Pola hubungan kekerabatan di luar batih.
 3. Pola hubungan kekerabatan keluarga luas.
 4. Pergeseran kedudukan dan peranan individu dalam lingkungan keluarga.

b. Ruang lingkup operasional

Ruang lingkup operasional adalah ruang lingkup yang dijadikan sasaran inventarisasi dan dokumentasi dengan aspek Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan, yaitu suku bangsa Jawa di daerah Propinsi Jawa Tengah. Lingkup operasional dalam penelitian ini dibatasi yaitu tentang pengaruh lapangan kerja terhadap hubungan kekerabatan. Untuk melihat hal itu sebagai suatu gejala modernisasi, maka lokasi penelitian di pusatkan di daerah perkotaan, yaitu dengan mengambil sample sebuah kelurahan di daerah perkotaan Kotamadya Semarang ialah kelurahan Pleburan. Penduduk kelurahan tersebut sebagian besar terdiri dari suku bangsa Jawa.

4. PERTANGGUNG JAWABAN PENELITIAN

a. Organisasi

Dalam tahap persiapan lebih dahulu dibentuk sebuah Tim peneliti yang terdiri dari empat orang tenaga peneliti, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Drs. Moehadi, Ketua Tim merangkap anggota;

2. Drs. Supriyo Priyanto, Sekretaris Tim merangkap anggota;
3. Dra. Titi Pratitis, anggota;
4. Drs. Mulyono, anggota.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian di lapangan Tim tersebut dilengkapi dengan tiga orang pembantu yang semuanya terdiri para mahasiswa tingkat akhir.

Sebelum dilakukan penelitian di lapangan, maka diadakan survai pendahuluan, yang kegiatannya meliputi menyelesaikan urusan administrasi dan mengumpulkan informasi mengenai daerah lokasi penelitian, yaitu kelurahan Pleburan di Kotamadya Semarang.

Untuk keperluan penelitian di lapangan telah disusun daftar kuesioner dengan pedoman pada bentuk dan isi kuesioner yang telah disusun oleh penanggung jawab aspek Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan, dengan diadakan perubahan atau penambahan bentuk pertanyaan.

Dari hasil survai pendahuluan diperoleh data identifikasi mengenai daerah lokasi penelitian. Untuk memperoleh data informasi tersebut, khususnya tentang suku bangsa Jawa, keadaan penduduk, sistem kekerabatan, dipergunakan juga beberapa sumber literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sasaran penelitian

Daerah propinsi Jawa Tengah penduduknya yang terbanyak dan merupakan sebagian terbesar penduduk adalah suku bangsa Jawa. Dalam masyarakat suku bangsa Jawa terdapat kesatuan kebudayaan yang menjadi sumber dari sistem kekerabatan di daerah Jawa Tengah. Sedang sistem kekerabatan merupakan pula kerangka yang memberi wadah bagi hubungan kekerabatan itu sendiri.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berdasarkan Pola penelitian Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan adalah suatu tempat di perkotaan. Sesuai dengan ketentuan tersebut lokasinya merupakan sebuah kelurahan di daerah perkotaan. Dalam penelitian ini telah dipilih kelurahan Pleburan yang termasuk wilayah kecamatan Semarang Ti-

mur Kotamadya Semarang. Jadi kelurahan Pleburan termasuk tipologi desa kota, yang penduduknya mempunyai lapangan kerja yang berbeda-beda. Disamping itu juga tampak adanya perbedaan dalam hal pemukiman. Adanya lapangan kerja yang berbeda-beda seperti pegawai negeri, anggota ABRI, pegawai swasta, pensiunan, pedagang, pengusaha, buruh, tukang dalam bidang keahlian dan tukang dalam bidang jasa telah memberi warna yang berbeda-beda terhadap kehidupan masing-masing.

Dalam hal pemukiman penduduk kelurahan Pleburan juga terdapat bermacam-macam variasi yang memberikan pula corak-corak tertentu terhadap hubungan kekerabatan yang mereka lakukan. Kelurahan Pleburan terletak di tengah-tengah kota wilayah kecamatan Semarang Timur, yang terdapat bermacam-macam kegiatan, seperti : pusat perbelanjaan, kampus perguruan tinggi, kantor-kantor pemerintah, tempat hiburan dan rekreasi, dsb. Dengan lokasi semacam itu diharapkan dapat diungkapkan hubungan kekerabatan di kalangan penduduk dalam kaitannya dengan lapangan kerja yang bervariasi.

d. Responden dan informan

Responden adalah nara sumber yang diharapkan dapat mengisi kuesioner yang diedarkan. Sedang informan adalah nara sumber yang diharapkan dapat memberikan keterangan-keterangan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara. Para responden dalam penelitian ini kebanyakan terdiri dari para kepala keluarga yang bertempat tinggal dalam wilayah Rukun Kampung (RK) II kelurahan Pleburan.

e. Hambatan-hambatan

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penelitian ini meskipun ada, namun tidak menyebabkan pelaksanaan penelitian menjadi terhambat sama sekali. Kesulitan yang pertama dihadapi oleh Tim peneliti antara lain dalam usaha untuk menemui para responden dan informan yang kebanyakan dari mereka sibuk dengan tugas-tugasnya atau usahanya, sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas.

Usaha untuk memperoleh data mengenai keadaan pen-

duduk di kelurahan Pleburan di dasarkan hanya pada monografi dan beberapa catatan laporan bulanan yang terdapat di kantor kelurahan. Kelurahan Pleburan belum menyusun buku tentang informasi desa seperti yang biasanya terdapat pada beberapa desa yaitu buku "Mengetahui Desa". Kesulitan memperoleh sumber literatur yang khusus tentang kelurahan Pleburan, karena belum ditemukan oleh Tim suatu hasil laporan penelitian atau tulisan yang khusus mengenai desa tersebut.

Hambatan yang lain dalam usaha memperoleh data melalui wawancara hanya beberapa informan yang dapat diwawancarai secara intensif, karena waktu yang tersedia bagi para informan juga sangat terbatas.

f. Pengolahan data

Pengolahan data didahului dengan pengumpulan data dengan mempergunakan beberapa metode yaitu :

1). Metode kepustakaan

Untuk memperoleh data tertulis mengenai masalah kekerabatan telah dilakukan studi kepustakaan, khususnya sumber pustaka yang erat kaitannya dengan permasalahan.

Mengingat kemampuan para anggota Tim peneliti dalam mempergunakan sumber pustaka dalam bahasa asing, ditambah pula kurangnya sumber pustaka serta waktu yang tersedia, maka Tim peneliti lebih memusatkan perhatiannya pada sumber pustaka yang berbahasa Indonesia dan yang dapat ditemukan.

2). Metode Kuesioner

Kuesioner disusun dengan berdasarkan pada kerangka laporan sebagai pangkal pertanyaan-pertanyaan. Kuesioner itu dapat disusun dengan teliti dan tenang, sehingga penyusun dan perumusan pertanyaannya dapat mengikuti suatu sistematik yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta cabang ilmu sosial yang digunakan. Sifat lain yang menguntungkan dengan menggunakan metode Kuesioner, bahwa banyak responden yang dapat dijadikan sasaran.

Hal ini penting apabila peneliti hendak meneliti pendapat atau sikap umum. Oleh karena pertanyaan dan jawaban semuanya tertulis, maka pada waktu dilakukan

analisa atau interpretasi, data yang terkumpul senantiasa dapat dicocokkan kembali.

Kuesioner disamping mempunyai sifat yang menguntungkan ada juga kelemahannya. Kelemahan tersebut antara lain karena pertanyaan-pertanyaan semua sudah ditetapkan lebih dahulu, terutama mengenai isinya, maka sukar untuk dapat menangkap dengan suatu kuesioner suasana khusus pada masyarakat sewaktu dilakukan pengumpulan data. Sifat yang kaku dari suatu kuesioner juga hanya sedikit memberi keleluasaan untuk mengubah susunan pertanyaan agar lebih cocok dengan alam pikiran atau pengetahuan para penjawab. Penggunaan metode kuesioner untuk penelitian di kelurahan Pleburan dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a) menyerahkan daftar kuesioner tersebut kepada para responden yang dipandang dapat mengisi sendiri jawabannya dan kemudian diambil kembali oleh anggota Tim peneliti pada waktu yang telah disepakati bersama antara Tim peneliti dan para responden.
- b) mengunjungi para responden untuk memberitahukan tentang tujuan penelitian itu dan kesediaan waktu untuk mengisi langsung kuesioner tersebut bersama para Tim peneliti.

Karena penggunaan daftar kuesioner belum dapat menggali sebanyak mungkin data mengenai hubungan kekerabatan, maka masih perlu dilengkapi dengan penggunaan metode wawancara.

3). Metode wawancara

Metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan tatap muka dan bercakap-cakap dengan orang tersebut.

Walaupun penduduk kota umumnya lebih mudah untuk diwawancarai daripada penduduk di pedesaan karena tingkat pendidikannya lebih tinggi, namun sering dijumpai kesulitan lain yaitu para informan adalah orang yang sibuk sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas. Disamping itu ada kesulitan lain yaitu mereka yang "enggan" diwawancarai.

Dalam metode wawancara dipergunakan pedoman wawancara yang didasarkan pada bentuk-bentuk pertanyaan dalam daftar kuesioner yang masih dapat dijawab dengan beberapa kemungkinan.

Dalam menentukan jumlah responden dan informan oleh Tim peneliti telah memilih penduduk yang bertempat tinggal dalam satu wilayah Rukun Kampung II (RK II) kelurahan Pleburan, yang terdiri dari para responden yang mempunyai lapangan pekerjaan yang berbeda-beda, tingkat pendidikan serta daerah asal yang berbeda-beda juga.

4). *Pengolahan data*

Data yang telah dikumpulkan dengan metode-metode seperti tersebut diatas, kemudian dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kerangka laporan. Data yang terkumpul dalam satu kelompok yang berasal dari beberapa keluarga batih atau rumah tangga selanjutnya dibandingkan satu dengan lainnya. Dengan demikian pengolahan data akan memperoleh suatu generalisasi dan sifat-sifat khusus hubungan kekerabatan.

Pengelompokan jenis data tersebut dilakukan dengan menyusun macam-macam tabel. Pekerjaan pengolahan data kemudian dilanjutkan dengan mengadakan analisa. Untuk membuat analisa dipergunakan sebagai pedoman hubungan kekerabatan sebagai akibat dari pengaruh modernisasi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan jenis-jenis lapangan pekerjaan di kota Semarang.

g. Penulisan Laporan

Teknik penulisan laporan telah diusahakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan. Pembagian tugas menyusun laporan sementara diantara para anggota Tim adalah sebagai berikut :

- Bab I - Pendahuluan oleh Drs. Moehadi.
- Bab II - Identitas oleh Dra. Titi Pratitis.
- Bab III - Lapangan kerja di perkotaan oleh Drs. Mulyono.
- Bab IV - Hubungan kekerabatan oleh Drs. Supriyo Priyanto.
- Bab V - Beberapa analisa oleh Drs. Moehadi.

Penyusunan laporan final penyuntingan dilakukan oleh ketua aspek.

Sistematika laporan disusun sebagai berikut :

- Kata pengantar oleh Pemimpin Proyek IDKD Jawa Tengah
- Daftar Isi.

Bab I Pendahuluan

1. Masalah
 - a. Umum
 - b. Khusus
2. Tujuan
 - a. Umum
 - b. Khusus
3. Ruang Lingkup
4. Pertanggung jawaban penelitian.

Bab II Identitas

Dalam bab ini dibicarakan lokasi suku bangsa Jawa di daerah Jawa Tengah. Keadaan daerah penelitian yang meliputi letak geografis, pola perkampungan dan letak administratif.

Gambaran fisik kota Semarang dan kelurahan Pleburan.

Keadaan penduduk, tempat permukiman, penyebaran penduduk dan mobilitas penduduk. Sistem mata pencaharian, hubungan kerja dan modernisasi dalam hubungannya dengan lapangan pekerjaan.

Sistem kekerabatan, istilah-istilah kekerabatan dan sopan santun kekerabatan.

Bab III. Lapangan kerja di perkotaan

Dalam bab ini diuraikan tentang perkembangan lapangan kerja di kota Semarang, jenis-jenis lapangan kerja, kesempatan kerja. Hubungan dan kesempatan kerja, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan sahabat, pendidikan dsb. Pola pemukiman tenaga kerja.

Bab IV. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan dalam rumah tangga, antara suami dengan isteri, antara Ayah dengan anak-anak laki-laki dan perempuan, antara ibu dengan anak-anak serta hubungan antara sesama anak. Pola hubungan kekerabatan dengan keluarga di luar batih, baik hubungan yang vertikal yaitu dengan keluarga pihak ayah maupun ibu,

maupun hubungan yang horisontal, yaitu dengan saudara-saudara sepupu, saudara tiri dari pihak ayah dan ibu. Hubungan kekerabatan karena perkawinan serta pola hubungan kekerabatan keluarga luas.

Bab V. Beberapa analisa

Analisa ini meliputi penggeseran kedudukan dan peranan suami dan isteri serta anak-anak dalam lingkungan keluarga.

BAB II

IDENTIFIKASI

LOKASI

1. Lokasi Suku Bangsa

Suku bangsa yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah suku bangsa Jawa. Dengan demikian seksi lokasi suku bangsa yang meliputi letak dan keadaan geografis, dengan sendirinya untuk suku bangsa yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, kedua hal tersebut akan diuraikan berikut ini.

a. Letak

Sebenarnya daerah kebudayaan-kebudayaan Jawa bukan hanya Jawa Tengah saja. Akan tetapi meliputi sebagian kecil daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian karena penelitian ini pada hakekatnya bertujuan untuk menyoroti dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan dalam masyarakat Jawa di Jawa Tengah, maka letak suku bangsa yang akan diuraikan sangat erat hubungannya dengan propinsi yang bersangkutan, yaitu propinsi Jawa Tengah.

Secara astronomis Jawa Tengah terletak di antara $108^{\circ} 30'$ sampai dengan $111^{\circ} 30'$ BT dan $6^{\circ} 30'$ sampai dengan $8^{\circ} 30'$ LS. Daerah ini memiliki luas 34.503 kilometer persegi (termasuk kepulauan Karimunjawa dan Nusakambangan). Secara administratif Jawa Tengah termasuk salah satu dari ke 27 propinsi yang terdapat di Indonesia. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan samudera Indonesia. Sedang sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa.

b. Administrasi Pemerintahan

Pada masa Hindia Belanda (Nederlands Indie) wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia dibagi dalam wilayah daerah yang dinamakan "gewest". Jawa Tengah dibagi dalam lima gewesten (= karesidenan)

dan tiap gewest dibagi dalam beberapa wilayah yang dinamakan "regentschap" (kabupaten).

Gewest (en) Jawa Tengah pada waktu itu terdiri dari :

- (1) **Semarang Gewest**, yang meliputi Regentschap (Kabupaten) : Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati Jepara dan Grobogan.
- (2) **Rembang Gewest**, yang meliputi Regentschap Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro.
- (3) **Banyumas Gewest**, yang meliputi Regentschap Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga.
- (4) **Kedu Gewest**, yang meliputi Regentschap Magelang Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen dan Karanganyar.
- (5) **Pekalongan Gewest**, yang meliputi Regentschap Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang.

Setelah dilaksanakan "Decentralisatie Besluit" tahun 1905, maka *Gewesten* tersebut diberi hak-hak otonomi dan untuk itu dibentuk Dewan-Dewan Daerah (*Gewestelijke Raden*). Sejak tahun 1908 *Gewesten* tersebut telah merupakan Daerah-Daerah Otonom penuh. Disamping itu juga dibentuk pemerintahan Kotapraja (*Gemeente*) yang otonom antara lain kota-kota Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga dan Magelang.

Berdasarkan *Provincie Ordonantie* yang mulai berlaku sejak bentuk Jawa Tengah sebagai salah sebuah propinsi dalam wilayah Hindia Belanda, yaitu *Ordonantie* tahun 1929 *Staatsblad* no. 227 (Instelling Van de Provincie Midden Java) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1930, maka Jawa Tengah merupakan daerah Propinsi yang memiliki hak-hak otonom dan mempunyai Dewan Daerah (*Provincie Raad*). Dalam *Saatsblad* tahun 1933 no. 251 dan no. 335 yang kemudian diubah dalam *Staatsblad* tahun 1934 no. 682 Propinsi Jawa Tengah dibagi dalam wilayah lima Karesidenan (*Residentie*). Tiap-tiap Karesidenan meliputi beberapa Kabupaten (*Regentschap*) dan tiap Kabupaten dibagi atas beberapa Kawedanan (*District*). Sedang tiap *District* dibagi dalam beberapa wilayah Kecamatan (*Onder-District*) dan wilayah pemerintahan daerah yang paling kecil adalah Kelurahan atau Desa.

Adapun Karesidenan-Karesidenan dan Kabupaten-Kabupaten yang termasuk dalam wilayah propinsi Jawa Tengah berdasarkan *Staatsblad* tahun 1934 adalah sebagai berikut :

- 1) **Residentie Pekalongan** meliputi Kabupaten-Kabupaten (Regentschappen) Pekalongan, Batang, Pematang, Tegal, Brebes, *Stadsgemeente* Pekalongan dan Tegal.
- 2) **Residentie Jepara-Rembang** meliputi Kabupaten-kabupaten : Jepara, Rembang, Pati, Blora dan Kudus.
- 3) **Residentie Semarang** meliputi Kabupaten-Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Grobogan dan *Stadsgemeente* Semarang dan Salatiga.
- 4) **Residentie Kedu** meliputi : Kabupaten-Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kebumen dan *Stadsgemeente* Magelang.
- 5) **Residentie Banyumas** meliputi Kabupaten-Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Karanganyar dan Banjarnegara.

Dalam tahun 1934 diadakan beberapa penggabungan Kabupaten-Kabupaten yaitu :

Kabupaten Batang digabungkan dengan Kabupaten Pekalongan.

Kabupaten Banyumas digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto.

Kabupaten Kutoarjo digabungkan dengan Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Karanganyar digabungkan dengan Kabupaten Kebumen.

Dalam masa penjajahan Jepang telah diadakan beberapa perubahan mengenai tata pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang no. 27 tahun 1942 (tahun Jepang 2602). Berdasarkan Undang-Undang tersebut seluruh Jawa, kecuali daerah kerajaan (*Vorstenlanden*) dibagi atas wilayah-wilayah dengan menggunakan istilah Jepang seperti : Syuu (Karesidenan), Ken (Kabupaten), Si (Kotapraja), Gun (Kawedanan), Son (Kecamatan), dan Ku (Kelurahan).

Dengan demikian wilayah propinsi dihapuskan. Perubahan lain di Jawa Tengah yaitu Karesidenan Jepara Rembang di ganti menjadi Pati Syuu.

Dalam masa Republik Indonesia berdasarkan UUD tahun 1945 pasal 18 pada bagian penjelasannya dinyatakan bahwa Daerah Wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa daerah propinsi. Setiap Wilayah Propinsi dibagi lagi dalam daerah-daerah wilayah yang lebih kecil. Sesuai dengan perkembangan politik dalam masa Republik, maka dikeluarkan Penetapan Pemerintah no. 16/SD tahun 1946, yang menetapkan bahwa daerah Swapraja (Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran) yaitu daerah Vorstenlanden, diubah statusnya menjadi Karesidenan.

Berdasarkan U.U. No. 22 tahun 1948 yaitu tentang Pemerintah daerah, ditetapkan bahwa daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu : Propinsi, Kabupaten, dan Desa (Kota Kecil). Dengan demikian berdasarkan U.U. no. 22 tahun 1948 tersebut, wilayah propinsi yang pada masa pendudukan Jepang dihapuskan, dihidupkan kembali.

Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam U.U. no. 10 tahun 1950 yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 1950. Menurut U.U. tersebut wilayah Propinsi Jawa Tengah meliputi 6 daerah Karesidenan yaitu : Pekalongan, Semarang, Pati, Kedu, Banyumas dan Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta meliputi : Kotamadya Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Berdasarkan ketetapan dalam U.U. no. 9/1965 Kabupaten Batang yang sudah dihapuskan, dihidupkan kembali dan berdiri sendiri sebagai daerah Kabupaten.

2. Keadaan geografis

Untuk mengetahui keadaan geografis sesuatu daerah, minimal kita harus mengetahui bagaimana iklimnya, tanahnya, dan alam flora serta faunanya. Ketiga hal tersebut untuk daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Iklim

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui iklim suatu daerah ialah : suhu rata-rata per bulan; untuk Jawa Tengah selalu di atas 20°C , yaitu rata-rata minimum $21,1^{\circ}\text{C}$ dan maksimum $32,8^{\circ}\text{C}$. Dari keadaan suhunya maka Jawa Tengah termasuk beriklim panas

(= tropis). Namun demikian dalam musim kemarau pada tahun-tahun yang dingin adakalanya daerah dataran tinggi Dieng yang tingginya sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut, mencapai suhu harian yang memungkinkan pembekuan embun (frost) yang dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan "*bun Upas*".

Jawa Tengah termasuk *daerah basah* karena curah hujan rata-rata dalam setahun lebih dari 2.000 mm. Pembagian curah hujan merupakan faktor yang penting baik untuk keperluan pertanian maupun bidang kehidupan yang lain. Jawa Tengah mempunyai bulan-bulan basah lebih banyak dari pada bulan-bulan kering. Yang dimaksud dengan bulan basah adalah bulan yang mempunyai curah hujan lebih dari 60 mm. Yang terjadi pada bulan-bulan Nopember sampai April. Dalam bulan-bulan tersebut jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 22 hari sebulan. Sedang yang dimaksud dengan *bulan kering* adalah bulan-bulan yang mempunyai curah hujan kurang dari 60 mm. Angin yang berembus antara bulan Nopember sampai dengan April adalah angin Barat laut yang biasanya membawa hujan. Sedang angin Timur laut atau Tenggara yang berembus dalam bulan-bulan Mei sampai dengan Oktober umumnya merupakan angin kering yang tidak membawa hujan

b. Tanah

Keadaan tanah di Jawa Tengah dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Tanah dataran rendah yang tingginya kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (53,3%)
- 2) Tanah pegunungan yang tingginya 100-500 meter di atas permukaan laut (27,4%).
- 3) Tanah pegunungan yang tingginya 500-1000 meter dari atas permukaan laut (14,7%).
- 4) Tanah pegunungan yang tingginya lebih dari 1.000 meter (4,6%).

Pembentukan macam-macam jenis tanah dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya : asal batuan induk, keadaan iklim, kandungan mineral dan bahan organik serta proses yang telah berlangsung. Jenis tanah aluvial sepanjang sejarah perkembangan peradaban manusia telah memegang peranan penting dalam memberikan sum-

ber makanan dan kemakmuran. Di Jawa Tengah luas tanah *aluvial* meliputi 29% dari luas seluruh wilayah.

Secara garis besar daerah dataran pantai utara dan selatan tanahnya berupa tanah-tanah *aluvial kelabu*, coklat atau kuning. Tanah *aluvial hidromorf* terdapat di sepanjang pantai utara (dari Kabupaten Brebes di ujung barat hingga daerah Kabupaten Pati dan Rembang di Bagian Timur). Jenis tanah ini disamping banyak digunakan oleh penduduk untuk pengusahaan tambak, juga garam pada musim kemarau seperti di Kabupaten Pati dan Rembang. Tanah *aluvial margalit* kelabu hingga hitam terdapat terutama di daerah depresi Semarang-Rembang dan Randublatung yang meliputi wilayah Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Purwodadi. Tanah ini kegunaannya sangat tergantung air dan sistem irigasi yang baik. Klaten dan Surakarta yang memiliki tanah margalit kelabu hingga kelabu tua, disebabkan karena pengaruh abu *Vulkan Merapi* dan *Vulkan* lain di sekitarnya. Tanah abu vulkanis yang muda terdapat di daerah dataran sebelah barat gunung Merapi.

Di daerah Kabupaten Cilacap bagian barat, yaitu bagian yang rendah dan berawan hingga perbatasan segera anakan, terdapat daerah hutan air berpayau yang tanahnya berupa tanah *gambut*. Tanah ini hanya dapat dimanfaatkan (ditanami) dengan mengeringkan daerah tersebut serta penggarapan yang khusus atau ditanami varietas tanaman yang dapat tumbuh baik. Tanah *gambut* tinggi sebagai akibat keadaan Kerawang (telaga Bale Kambang) terdapat di dataran tinggi Dieng.

Pada umumnya daerah-daerah pegunungan Jawa Tengah mempunyai jenis-jenis tanah *latosol*, *regosol* ataupun jenis *mediteran* coklat, coklat kemerahan dan kelabu. Beberapa tempat di Kabupaten Pekalongan bagian selatan dan Kabupaten Banyumas terdapat jenis *pedsolik* merah kuning.

Di daerah Kabupaten Wonogiri, selain jenis tanah *latosol* coklat kemerahan yang berasal dari bahan induk batuan kapur terdapat juga di daerah *Ledok Baturetno*. Tanah *margalit* hitam coklat yang peka terhadap pengaruh erosi, terbentuk dari bahan endapan asal daerah sekitar yang antara lain mengandung juga bahan-bahan vulkanis. Oleh karena keadaan *vegetasi* yang sangat ku-

rang, tanah-tanah *margalit* di Jawa Tengah bagian timur dan juga tanah-tanah *latosol* serta *pedsolik* di daerah pegunungan kapur merupakan tanah-tanah yang banyak mengalami perusakan berat oleh erosi.

c. Flora dan Fauna

Nampaknya hutan di daerah Jawa Tengah merupakan sebagian kecil dari luas daerah tersebut (19%). Hutan itu antara lain berupa jati, cagar alam, agatis, pinus dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari fungsinya, hutan (Jawa Tengah) yang luasnya 656.475 Ha, berfungsi sebagai hutan produksi seluas 603.728 Ha, hutan lindung seluas 46.022 Ha, hutan suaka alam seluas 2.683 Ha. Hutan primer yang terutama terdapat di cagar alam Dawuan (di sebelah barat gunung Slamet), Celering (di sebelah gunung Muria) dan Gajahbiru (di sebelah utara gunung Muria).

Hutan lindung yang terdapat di pegunungan Serayu bagian Utara merupakan daerah hutan yang masih dihuni oleh hewan-hewan liar seperti harimau, rusa, kera, babi hutan dan berbagai macam ular. Harimau terdapat juga di hutan-hutan Serayu bagian selatan, hutan cagar alam Celering dan di daerah gunung Lawu, kompleks Merapi/Merbabu dan gunung Muria. Di daerah gunung Ungaran diperkirakan masih terdapat jenis "*Kucing hutan*", yang oleh para ahli biologi dan suaka alam di pandang sebagai salah satu binatang kuno yang kini sudah tidak ada lagi di tempat lain.

Cagar Celering yang terdapat ditepi pantai sebelah utara gunung Muria masih banyak terdapat kera hitam, berbagai jenis burung, rusa, babi hutan, ular dsb., disamping harimau seperti telah disebutkan diatas.

Hutan jati yang meliputi lebih dari separo areal hutan di Jawa Tengah, yang hasilnya meliputi kayu *Dolog* (bahan ekspor) terdapat di daerah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu, Telawah, Purwodadi, Gundih, Randublatung, Blora, Kebonharjo, Mantingan (Rembang), Pati, Kedu selatan, Semarang, Kendal, Pemalang, dan Balapulang.

Hutan *pinus* dan *agatis* nampaknya disamping terbesar di Jawa Tengah bagian barat (di daerah KPH Banyu-

mas timur, Pekalongan barat, Pekalongan timur) juga Jawa Tengah bagian tenggara seperti Magelang, Kedu Selatan dan Surakarta.

3. Pola Perkampungan

Perkampungan di Jawa Tengah berbentuk "desa". Desa di Jawa Tengah merupakan tempat tinggal yang tetap bagi masyarakat orang Jawa. Di lihat dari segi administratif desa merupakan daerah otonom yang paling rendah.

Tiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa atau lurah desa. Wilayah suatu desa disebut juga kelurahan. Tiap kelurahan dibagi atas beberapa dukuh yang masing-masing dikepalai oleh seorang *kepala dukuh* (*bekel*, *kamituwa*). Dukuhan dibagi lagi dalam rukun kampung (RK) dan *rukun tetangga* (RT). Kelurahan-kelurahan dalam wilayah perkotaan biasanya tidak dibagi dalam dukuh-dukuhan, tetapi dalam wilayah RK dan RT.

Batas antara desa yang satu dengan desa lainnya dapat berupa batas alam seperti sungai, pegunungan atau batas buatan seperti jalan, parit, persawahan, pagar hidup, pagar dari bambu, batu atau tembok. Hubungan antara desa atau antar dukuh dapat dilakukan melalui jalan umum (jalan negara), jalan desa atau melalui sungai. Dengan demikian pola perkampungan mereka pada umumnya mengelompok padat, menghadap ke jalan baik jalan negara, maupun desa.

Bentuk rumah di daerah Jawa Tengah dilihat dari bangunan atapnya, dapat digolongkan kedalam : *rumah Limasan*, *rumah Serotong*, *rumah Dara Gepak*, dan *rumah Joglo*. Adapun bentuk-bentuk bangunan rumah diperkotaan kebanyakan campuran antara arsitektur tradisional dan unsur-unsur arsitektur dari luar. Yang dimaksud pengaruh dari luar tersebut adalah unsur tradisional dari luar Jawa Tengah atau dari luar Indonesia, (gaya arsitektur Asia atau Eropa). Di daerah pedesaan kebanyakan rumah penduduk berbentuk rumah *Limasan* yang terbuat dari kayu jati, kayu dari Kalimantan, dan banyak juga yang menggunakan pohon kelapa (Jawa = Glugu). Sedangkan dinding rumah ada yang berupa tembok, papan atau *gedheg* (anyaman bambu) dengan atap genteng, seng atau asbes.

Beberapa bangunan di desa antara lain : Balai desa

yang berfungsi sebagai kantor pemerintah Desa, tempat untuk rapat desa atau kegiatan lain. Tempat pendidikan di pedesaan berupa sekolah-sekolah dasar atau Madrasah. Untuk tempat beribadat didirikan langgar (Surau) atau masjid, kadang-kadang terdapat pula Gereja di pedesaan. Bangunan yang berupa pasar ada yang bentuknya sederhana (terbuat dari bahan bambu atau kayu) tetapi ada yang lengkap (berupa bangunan-bangunan los-los pasar dan kios-kios untuk toko-toko dan warung-warung makan).

2. Daerah penelitian

a. Letak

Daerah penelitian dalam penelitian ini, adalah Kotamadya Semarang dengan sampel Kelurahan Pleburan. Secara astronomis kotamadya ini terletak diantara $110^{\circ}23'57''$ sampai dengan $110^{\circ}27'70''$ BT dan $6^{\circ}55'6''$ sampai dengan $6^{\circ}58'18''$ L.S. Selanjutnya apabila kita lihat letak administratifnya, Semarang adalah salah satu daerah tingkat II (Kotamadya) yang tergabung dalam propinsi Jawa Tengah. Malahan Semarang merupakan ibu kota dari propinsi yang bersangkutan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Kemudian sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah timur berbatasan Kabupaten Demak.

Mengenai letak kota Semarang ini, kiranya perlu diketahui bahwa pada mulanya kota tersebut berada di daerah Bubakan yang terletak di Kali Semarang. Semarang pada jaman kerajaan Mataram, merupakan pelabuhan yang penting. Tetapi setelah di kuasai Belanda (Kumpe-ni) pada abad ke 17, kota tersebut dijadikan pusat pemerintahan (propinsi Jawa Tengah). Sejak itulah kota Semarang meluas sampai ke daerah perbukitan (candi). Selanjutnya Semarang bagian bawah dijadikan pusat perdagangan dan industri, disamping pusat pemerintahan.

b. Keadaan geografis

Semarang termasuk daerah tropis dengan suhu rata-rata 25°C sampai dengan 27°C . Di tinjau dari segi mor-

fologisnya, Semarang dapat dikategorikan menjadi dua. Masing-masing "daerah atas" dan "daerah bawah".

Daerah atas, yang merupakan perbukitan terdapat di wilayah bagian Selatan. Daerah ini mempunyai ketinggian kurang lebih 270 m dari permukaan air laut. Sedangkan daerah bawah yang merupakan dataran rendah (daerah pesisir) terdapat di wilayah utara.

Berdasarkan Staatsblad tahun 1906 No. 120, sejak tanggal, 1 April 1906, Semarang resmi menjadi kotapraja yang pertama dengan Walikota Ir. D. de Yongh. Wali kota inilah yang menghendaki dan memilih daerah perbukitan (candi) sebagai tempat pemukiman dengan pertimbangan sbb. :

- 1). keadaan udaranya lebih sejuk dari pada di dataran pantai.
- 2). bebas dari bahaya banjir.
- 3). pemandangan alamnya indah.
- 4). jaraknya tidak terlalu jauh dari kota.

Disamping pertimbangan yang menguntungkan tersebut, ada beberapa kesulitan untuk bertempat tinggal di daerah bukit candi. Kesulitan itu antara lain :

- 1). daerahnya berbukit-bukit sehingga pembuatan rumah harus kuat benar, untuk menghindari kelongsoran.
- 2). letaknya yang tidak datar menyebabkan sulit untuk membuat jalan-jalan.
- 3). jalan-jalan yang terjal hanya dapat ditempuh oleh kendaraan bermotor.

Karena kesulitan-kesulitan tersebut, orang-orang yang bertempat tinggal di daerah bukit candi umumnya terdiri dari para pejabat tinggi, pengusaha atau pedagang kaya.

c. Gambaran fisik kota penelitian

Kotamadya Semarang yang merupakan ibu kota propinsi Jawa Tengah dengan sendirinya disana banyak dijumpai bangunan-bangunan (kantor-kantor) baik pemerintah maupun swasta. Lokasi kantor-kantor tersebut kebanyakan berada di dataran aluvial pantai sehingga memudahkan komunikasi.

Fasilitas perdagangan di pelabuhan Semarang cukup

memadai meskipun perairannya kurang dalam (hanya sekitar 4,5 meter). Karena keadaan perairan yang demikian, maka kapal-kapal besar tidak dapat merapat di pelabuhan Semarang. Hanya kapal-kapal yang berukuran kecil yang dapat masuk dan merapat di pelabuhan Semarang. Namun demikian Pelabuhan Semarang merupakan pintu gerbang masuknya barang-barang baik dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengangkat barang-barang dari kapal besar ke pelabuhan Semarang dipergunakan tongkang, yang berarti proses bongkar dan muat barang di pelabuhan Semarang berlangsung dua kali, yaitu dari kapal besar ke tongkang kemudian dari tongkang ke gudang dan sebaliknya. Bongkar muat barang semacam ini tentu saja memerlukan waktu yang lama dan resikonya cukup besar. Bongkar muat dari kapal besar ke tongkang dan sebaliknya, pada saat ombak besar sangat berbahaya dan kerap kali menimbulkan kerusakan pada barang-barang yang diangkut. Kiranya perlu diketahui bahwa ombak di pelabuhan Semarang pada waktu bertiup angin barat cukup besar dan dapat mengganggu bongkar muat di pelabuhan. Untuk mengatasi gangguan tersebut, maka dibangun tembok yang menjorok ke laut sepanjang 1.000 meter (di sebelah barat) dan 300 meter (di sebelah timur).

Sebagai pusat perdagangan, kota Semarang mempunyai beberapa puluh pasar dan pusat pertokoan. Pasar-pasar besar di Semarang antara lain : pasar Johar, pasar Bulu, pasar Karangayu, pasar Peterongan, pasar Dargo dan pasar Jatingaleh. Sedang beberapa pusat pertokoan antaral lain terdapat di sekitar Simpang Lima dekat Gedung Olah Raga dan mesjid Baiturrachman, pusat pertokoan Ya'ik dan Kanjengan, serta pusat pertokoan Candi.

Tempat-tempat peribadatan di kota Semarang (masjid) antara lain terdapat di Kauman dan masjid Baiturrachman di dekat lapangan Simpang Lima (Masjid yang besar). Adapun mesjid-mesjid lainnya yang terdapat tiap ap tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

- a) Kecamatan Semarang Tengah (6 buah); b). Kecamatan Semarang Timur (10 buah); c). Kecamatan Semarang Barat (10 buah); d. Kecamatan Semarang Selatan (12 buah); e). Kecamatan Semarang Utara (10 buah); f). Kecamatan Genuk (11 buah); g). Kecamatan Tugu (9

buah); h). Kecamatan Mijen (12 buah); i). Kecamatan Gunungpati (10 buah).

Selanjutnya mengenai gereja yang terdapat di kota Semarang antara lain :

Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Indonesia Injil, Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, Gereja Gereformeerd, Gereja Protestan Indonesia bagian barat, Gereja Isa Al Masih, Gereja Kristen Muria Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah, Gereja Balai Keselamatan dan Gereja Katolik (5 buah).

d. Tempat-Tempat Hiburan

Tempat-tempat hiburan yang terdapat di kota Semarang disamping bioskop juga gedung pertunjukan wayang orang dan tempat rekreasi (kebun binatang Tegalwareng dan Taman Hiburan Diponegoro). Gedung bioskop yang terdapat di sana sejumlah 19, masing-masing adalah : Gelora, Gajah Mada, Gris, Rahayu, Murni, Bahari, Metro, Manggala, Plaza, Kanjengan, Semarang Theatre, Jagalan, Merdeka, Sri Indah, Rajawali, Banyumanik, Siliwangi, Peterongan, dan Indra. Sedang gedung wayang orang antara lain : Ngesti Pandowo, Sri Wanito dan Siswo Budoyo.

e. Tempat pendidikan

Kota Semarang disamping memiliki sarana pendidikan (sekolah) dari tingkat dasar sampai menengah, juga perguruan tinggi dan akademi baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdapat disana antara lain : Univ. Diponegoro, IKIP Negeri, IAIN Walisongo, Univ. 17 Agustus, Univ. Katolik Atma Jaya, IKIP Veteran dan Univ. Islam Sultan Agung. Sedang akademi negeri/swastanya adalah : Akademi Agraria, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan Perwira Pelayaran Besar, AKABRI Bagian Kepolisian, AKademi Publistik Diponegoro, Akademi Bahasa Asing Trinitas, Akademi Teknologi Semarang, Akademi Farming, Akademi Keuangan dan Perbankan, dan Akademi Pelayaran Niaga.

f. Jaringan Komunikasi

Sarana jaringan komunikasi yang terdapat di kota

Semarang antara lain : Kantor Pos dan Giro (baik pusat maupun kantor-kantor pembantu), Radio Republik Indonesia (RRI) dan non RRI, stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, Terminal Bis Bubakan, Terminal angkutan kota dan Taxi, Pelabuhan udara Kalibanteng, beberapa perusahaan bis malam dan jasa angkutan lainnya.

g. Hotel-hotel di kota Semarang

Semarang memiliki hotel sejumlah 14 buah. Hotel-hotel tersebut adalah : Patra Jasa, Dibya Puri, Siranda, Metro, Queen Hotel, Telomoyo, Bali Hotel, Oewa Asia, Tanjung, Merbabu, New Candi, PHI, Siliwangi dan Jelita.

h. Kelurahan Pleburan

Kelurahan Pleburan termasuk dalam wilayah Kecamatan Semarang Timur Kotamadya Semarang. Luas wilayahnya meliputi 66,25 ha, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Kelurahan Pekunden.
 Sebelah Selatan : Kelurahan Genuk.
 Sebelah Timur : Kelurahan Wonodri.
 Sebelah Barat : Kelurahan Pekunden.

Kelurahan Pleburan yang berjumlah penduduk sekitar 8.482 jiwa, terdiri dari lima Rukun Kampung (RK) dan 49 Rukun Tetangga (RT) dengan perincian sebagai berikut :

RK I terdiri dari 8 RT.
 RK II terdiri dari 10 RT.
 RK III terdiri dari 9 RT.
 RK IV terdiri dari 9 RT.
 RK V terdiri dari 13 RT.

Kelurahan Pleburan pernah meraih juara pertama dalam lomba desa tingkat Kotamadya Semarang dan juara kedua lomba desa tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam tahun 1977. Kelurahan ini memiliki luas 66,25 Ha, dengan perincian sebagai berikut : tanah sawah dengan pengairan sederhana : 1 ha., tanah kering beberapa pekarangan/bangunan dsb. : 47,25 ha, lain-lain seperti jalan, sungai, kuburan : 19 ha.

2. PENDUDUK

a. Suku bangsa

Penduduk asli Jawa Tengah adalah suku bangsa Jawa. Siapa atau bangsa apa yang pertama-tama menjadi penghuni daerah Jawa Tengah belum diketahui secara pasti. Dalam hal ini ilmu palio-antropologi memegang peranan penting dalam membantu untuk mengetahui asal-usul manusia yang pertama kali menjadi penghuni Jawa Tengah, meskipun sangat terbatas kejelasannya dan masih bersifat hipotetis.

Penemuan fosil yang pertama di Indonesia yang dapat dikatakan menjadi pangkal penyelidikan selanjutnya adalah penemuan *Pithecanthropus Erectus* dalam tahun 1890 oleh Dr. *EUGENE DUBOIS* di dekat *Trinil*, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, tidak jauh dari Ngawi (Madiun Jawa Timur). Menurut anggapan para ahli, *Pithecanthropus Erectus* berkebudayaan Paleolitikum. Sisa-sisa kebudayaan Paleolitikum berupa alat-alat dari batu ditemukan di beberapa tempat antara lain di Pacitan dan Ngandong (Jawa Timur), Perigi, Gombang dan Sangiran (Jawa Tengah), Sukabumi (Jawa Barat), Lahat (Sumatra Selatan) dan di Sulawesi selatan. Penemuan sisa-sisa kebudayaan Paleolitikum di Jawa Tengah memperkuat dugaan bahwa penghuni tertua di daerah Jawa Tengah adalah mahluk jenis *Pithecanthropus Erectus* tersebut.

Berdasarkan suatu legenda yang sangat menarik dan terkenal khususnya dalam masyarakat di Jawa Tengah, disebutkan bahwa konon jaman dahulu di Jawa Tengah ada sebuah kerajaan yaitu : *Medhangkamulan* yang nama rajanya *Prabu Dewatacengkar*. Bekas kerajaan tersebut terletak di kabupaten Purwodadi (Grobogan , Jawa Tengah). *Prabu Dewatacengkar* kegemarannya makan daging manusia.

Seorang kesatria yang datang dari negeri Atas Angin berhasil mengalahkan *Prabu Dewatacengkar*. Dengan bantuan rakyat dari *Medhangkamulan*, *Prabu Dewatacengkar* terdesak terus sampai akhirnya terjerumus jatuh ke dalam laut yaitu di Samudra Hindia. Ksatria itu bernama *Aji Saka* dan negeri Atas Angin artinya India. Sebelum kembali ke India *Aji Saka* sempat mengajarkan huruf Jawa, yang jumlahnya 20 macam. Huruf Jawa tersebut yang

biasa juga disebut huruf "Hanacaraka". Pada mulanya bentuknya masih sangat sederhana, yaitu bentuk huruf Jawa Kuno. Setelah disempurnakan bentuknya menjadi huruf Jawa Baru seperti yang kita kenal sekarang ini.

Dari cerita legenda Aji Saka tersebut dapatlah kita pahami makna yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa di Jawa Tengah telah datang pengaruh kebudayaan dari India (kebudayaan Hindu) yang mengembangkan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Penyempurnaan huruf Jawa menjadi 20 macam itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram.

Berdasarkan suatu hipotesa, diperkirakan telah ada beberapa pusat pemukiman penduduk di daerah Jawa Tengah. Rupa-rupanya daerah Jawa Tengah merupakan daerah yang ideal bagi bangsa Deutero Melayu, yaitu gelombang imigrasi bangsa yang berasal dari daratan Asia selatan. Bangsa Deutero Melayu inilah yang kemudian menetap dan menjadi penghuni Jawa Tengah. Pusat-pusat pemukiman di Jawa Tengah pada waktu itu ada dua wilayah yaitu :

- a. pantai utara Jawa Tengah antara lain daerah Batang, Pekalongan daerah Jepara (Bangsri - Keling), daerah Rembang (pantai Rembang dan sekitar gunung Lasem).
- b. wilayah pedalaman antara lain dataran tinggi Dieng, daerah Kedu utara (sekitar kaki gunung Sumbing dan Sindoro) daerah Kedu selatan dan sekitar kaki gunung Merapi serta Merbabu.

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun demikian diantara berita asing yang menceritakan tentang keadaan penduduk pada beberapa kota ialah dari Tome Pires (1512-1515) kota-kotayang dikunjungi dan diperkirakan jumlah penduduknya antara lain adalah Pasai, Palembang, Cirebon, Tegal, Demak, Tuban, Ternate. Kota Demak yang pada awal abad ke 16 merupakan pusat kerajaan bercorak Islam yang terbesar di Jawa, penduduknya diperkirakan antara 8 atau 10.000 keluarga yaitu kira-kita 40 atau 50 ribu jiwa.

Dewasa ini pertumbuhan penduduk Jawa Tengah dapat dikatakan pesat. Berdasarkan naskah "Sistem Gotong Ro-

yong Dalam Masyarakat Jawa Tengah" yang diterbitkan oleh Proyek IDKD, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penduduk Jawa Tengah dari tahun 1969 sampai dengan 1977 adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK JAWA TENGAH
TH. 1969 s/d 1977.

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²
1969	21.120.480 jiwa	612 jiwa
1970	21.470.628 jiwa	623 jiwa
1971	21.930.566 jiwa	635 jiwa
1972	22.317.511 jiwa	647 jiwa
1973	22.574.509 jiwa	654 jiwa
1974	22.878.647 jiwa	663 jiwa
1975	23.183.592 jiwa	672 jiwa
1976	23.723.309 jiwa	688 jiwa
1977	24.010.328 jiwa	696 jiwa

(sumber : Sistim Gotong Royong dalam Masyarakat Desa Jawa Tengah Dep. P dan K. Proyek IDKD Th 1979/1980).

Penggolongan kepadatan penduduk di beberapa daerah tingkat II di Jawa Tengah, menurut catatan th. 1977 dapat digolongkan dalam empat katagori, yaitu :

- Daerah Kotamadya yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Surakarta : 9.515 jiwa/km².
- Daerah Kabupaten yang terpadat penduduknya adalah Kabupaten Klaten : 1.528 jiwa/km².
- Daerah Kabupaten yang sedang adalah Kabupaten Purbalingga : 839 jiwa/km².
- Daerah Kabupaten yang jarang penduduknya adalah Kabupaten Blora : 254 jiwa/km².

Usaha untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah Jawa Tengah ialah dengan mentransmigrasikan sebagian penduduknya ke daerah luar Jawa. Sasaran lokasi untuk menempatkan para transmigran dari Jawa Tengah tersebar di seluruh Indonesia seperti : Sumatra (Lam-

pung, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu), Kalimantan (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), Maluku dan Irian Jaya.

b. Daerah Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Statistik Kotamadya Semarang, Kotamadya tersebut yang memiliki luas 364.81 km², berjumlah penduduk 1.042.460 jiwa. Jumlah tersebut apabila diperinci berdasarkan jenis kelamin, maka akan diperoleh laki-laki sejumlah 511.830 jiwa, perempuan sejumlah 530.630 jiwa. Kemudian apabila kita lihat kepadatan penduduknya per kilometer persegi adalah 72.397 jiwa. Padatnya penduduk di Kotamadya Semarang, terutama di kecamatan Semarang Tengah, Utara dan Barat diperkirakan semakin meningkatnya urbanisasi.

Mengingat semakin terbatasnya areal tanah dipusat kota, maka untuk mengatasinya, telah diambil berbagai macam kebijaksanaan dalam bidang kependudukan, antara lain : program pemerataan penyebaran penduduk ke seluruh wilayah Kotamadya sesuai dengan tahap perencanaan kota dan program keluarga berencana serta program transmigrasi.

Penduduk Kelurahan Pleburan. Jumlah penduduk Kelurahan Pleburan sebanyak 8.482 Jiwa, dengan perincian menurut kelompok umur sebagai berikut (lihat tabel 2).

Tabel 2.

PENDUDUK KELURAHAN PLEBURAN MENURUT KELOMPOK UMUR (KE-
ADAAN BULAN SEPTEMBER 1983).

Kel. Umur/th.	Laki-laki	Wanita	Jumlah
0 - 4	678	695	1.373
5 - 9	445	453	898
10 - 14	457	466	923
15 - 19	506	529	1.035
20 - 24	464	472	936
25 - 29	306	316	622
30 - 34	272	279	551
35 - 39	258	263	521
40 - 44	227	237	464
45 - 49	193	201	393
50 - 54	101	109	210
55 - 59	98	108	206
60 - 64	88	93	179
65 -	82	87	169
JUMLAH	4.174	4.308	8.482

Sumber : Monografi Kelurahan Pleburan bulan September 1983.

Apabila kita perhatikan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, yaitu sekitar 1,5 %. Demikian pula jumlah penduduk usia sekolah lebih besar dibandingkan dengan penduduk dewasa. Penduduk usia sekolah 3.792 jiwa sedang jumlah orang dewasa 2.967 jiwa. Hal itu disebabkan antara lain karena penduduk Kelurahan Pleburan banyak pendatang dari daerah-daerah lain (Kabupaten-kabupaten wilayah Jawa Tengah). Mereka kebanyakan terdiri dari para pelajar dan mahasiswa yang menumpang pada keluarga-keluarga penduduk di kelurahan Pleburan.

3. SISTEM MATA PENCAHARIAN DAN TEKNOLOGI

a. Jenis-jenis mata pencaharian

Berdasarkan pencatatan hasil sensus tahun 1971,

jumlah penduduk Jawa Tengah ada 21.865.253 jiwa. Dari jumlah tersebut lebih kurang ada 89,23% tinggal di pedesaan.

Kalau penduduk usia 15 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun dianggap sebagai penduduk produktif, maka jumlahnya meliputi 13.808.948 jiwa pada tahun 1979, atau lebih kurang 55,9% dan sisanya merupakan penduduk yang tidak produktif. Dengan demikian dependency ratio menunjukkan lebih kurang 78,8% yang berarti tiap 100 orang usia produktif harus menanggung 79 orang lainnya yang tergolong tidak produktif. Suatu beban yang cukup berat, lebih-lebih bila diingat bahwa diantara penduduk kelompok produktif tersebut, banyak yang belum memperoleh kesempatan kerja.

Dari jumlah penduduk usia produktif tersebut yang merupakan angkatan kerja sebanyak 10.218.930 orang, lebih kurang 93,4% nya (9.544.480) bekerja pada berbagai lapangan pekerjaan seperti : pertanian (58,5%), pertambangan dan industri (11,5%), pembangunan/konstruksi (14,9%), perdagangan dan perusahaan asuransi (12,8%), jasa dan lain-lain (2,3%).

Selanjutnya mengenai mata pencaharian penduduk kelurahan Pleburan, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN PLEBURAN (BAGI ANAK USIA 10 TAHUN KE ATAS).

No.	Jenis kegiatan	Jumlah orang
1.	Pengusaha	3
2.	Buruh Industri	299
3.	Buruh Bangunan	442
4.	Pedagang	165
5.	Pengangkutan	363
6.	Pegawai Negeri (sipil-ABRI)	1.934
7.	Pensiunan	264
8.	Lain-lain (jasa)	537
	J u m l a h	4.007

Sumber : Monografi Kelurahan Pleburan September 1983.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa Pleburan sebagian besar adalah pegawai negeri (Sipil/ABRI) yang berjumlah 1.934 orang (48.26%), sedang yang kedua adalah buruh bangunan. Adapun yang termasuk lain-lain adalah seperti : tukang dalam berbagai ketrampilan (buruh kasar, tukang becak dll.)

b. Ketenagaan

Sektor pertanian merupakan sektor yang masih menentukan untuk wilayah Jawa Tengah. Angkatan kerja yang bekerja di sektor ini berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1961, 1971, sensus pertanian 1973 dan survey sosial ekonomi nasional bulan September tahun 1979 adalah 71,2 %, 57,9%, 55,8% dan 51,0% (dari jumlah seluruh angkatan kerja yang ada).

Keadaan seperti tersebut di atas, jelas masih cukup banyak tenaga kerja di wilayah Jawa Tengah bekerja pada sektor ini, baik yang bertindak sebagai pengusaha/majikan maupun buruh/buruh tani.

Potensi Jawa Tengah dalam sektor industri ini sebagian terbesar adalah industri Ringan dan Kerajinan Rakyat di samping industri-industri yang besar. Di dalam usaha penyebaran lokasi industri ke daerah-daerah di Jawa Tengah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah memperhatikan planologi daerah di samping memperhatikan faktor-faktor teknis dan ekonomi daerah setempat, terutama yang mempunyai efek positif dan dapat mendorong pembangunan serta pengembangan daerah. Industri Ringan dan Kerajinan Rakyat yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dan memiliki pertumbuhan yang cepat serta sesuai dengan wilayah potensi pengembangan. Akan tetapi akibat perkembangan serta kemajuan teknologi, maka produktivitas pekerja juga meningkat sehingga penambahan tenaga kerja juga makin sedikit, sebab pada umumnya penggunaan modal secara intensif lebih menguntungkan. Sedang di pihak penawaran tenaga kerja yang tersedia calon-calon pekerja, yang umumnya kurang pendidikan serta ketrampilannya tidak dapat di serap.

Di samping masalah kelebihan tenaga kerja terdapat pula masalah kekurangan tenaga kerja yang sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh permintaan

tenaga kerja/perusahaan. Salah satu sebab adalah bahwa syarat yang dikehendaki oleh pihak peminta tenaga kerja, dalam hal pendidikan, ketrampilan atau pengalaman tidak sesuai kemampuan yang ada pada pihak tenaga kerja.

c. Hubungan kerja

Seperti telah disebutkan di atas bahwa penduduk Jawa Tengah sebagian besar bermata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Karena sebagian besar penduduk daerah Jawa Tengah mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian, maka dalam membicarakan hubungan kerja ini akan diuraikan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertanian tersebut. Kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari mempersiapkan tanah, menanam bibit, menyiangi sampai memotong padi, memerlukan beberapa tenaga kerja.

Kegiatan awal dalam pertanian sawah adalah "mbedhah", yaitu : mengerjakan tanah pertanian sawah atau tegalan dengan menggunakan bajak (Jawa); *waluku* atau *luku* yang ditarik oleh kerbau atau sapi. Di tanah persawahan kebanyakan digunakan kerbau, sedang di tanah tegalan digunakan sapi sebagai hewan penarik bajak. Jika seorang petani tidak memiliki sendiri alat pembajak atau luku dan hewan penariknya, ia akan mempergunakan alat pembajak milik orang lain dengan memberikan upah. Oleh karena itu di daerah pedesaan pada umumnya terdapat banyak buruh tani dengan modal alat *luku* atau *garu* (sisir untuk meratakan tanah) dan hewan penariknya, sebagai salah satu cabang mata pencaharian sampingan.

Setelah tanah persawahan selesai dibajak, kemudian dilakukan penggarapan tanah tahap kedua, yaitu yang disebut "*nglawed*" (meratakan tanah dengan alat *garu*). Kegiatan *mluku* dan *nglawed* melibatkan dua sampai lima orang, tergantung pada luas tanah garapannya. Tingkat umur para tenaga kerja yang terlibat berkisar antara 15 - 50 tahun.

Waktu menanam padi atau *tandur* dilakukan oleh beberapa orang, antara 4 sampai 5 orang dan usia mereka berkisar antara 15 - 50 tahun. Mereka mendapat upah harian setelah bekerja antara jam 06.00 sampai jam

10.00, kadang-kadang dilanjutkan pada sore harinya antara jam 14.00 sampai jam 16.00. Tenaga kerja yang terlibat dalam tandur ada yang masih kerabat atau orang-orang bukan anggota kerabat.

Setelah tanaman padi mulai tumbuh, kegiatan selanjutnya adalah menyiangi padi yang disebut *Matun*. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh tenaga kerja wanita, usia antara 15 sampai 50 tahun. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan matun antara 5 sampai 20 orang menurut luasnya daerah yang disiangi. Upah yang diberikan kepada orang-orang yang matun berupa upah harian.

Waktu menuai padi atau *derep* dilakukan oleh sejumlah tenaga kerja baik laki-laki maupun wanita, tetapi sebagian besar adalah kaum wanita. Menurut tradisi upah mengerjakan *derep* berupa padi yaitu diambilkan sebagian dari hasil *derepannya*, yang disebut *bawon*.

Dalam sistim *bawon* terdapat perbedaan pemberian bagian dari hasil padi yang dipotongnya. Kerabat-kerabat dan para kenalan dekat yang turut membantu panen padi menerima seperenam sampai seperlima bagian, tetangga atau kenalan yang kurang dekat menerima seperdelapan sampai sepersepuluh bagian dan orang-orang yang umumnya terdiri dari kaum wanita, yang memang pekerjaannya buruh potong padi dan setiap musim panen berkeliling dari desa ke desa lain untuk buruh memotong padi, menerima sekitar sepersepuluh bagian dari hasil yang mereka potong (13:109).

Pada peserta dalam kegiatan panen padi tersebut ada kecenderungan untuk menunggu, baru melakukan kegiatan apabila ada permintaan dari pihak pemilik sawah. Sedang orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pihak pemilik sawah biasanya memperlihatkan sikap spontan, tanpa menunggu permintaan tentu segera datang untuk mengambil bagian dalam panen tersebut.

Pada jaman sekarang, karena jumlah kerabat, kenalan, tetangga dan buruh yang datang membantu memotong padi makin bertambah banyak, tentu saja merupakan beban yang sangat berat bagi pemilik sawah untuk mempertahankan sistim *bawon* yang tradisional. Oleh karena itu buruh wanita pemotong padi sekarang menerima tidak lebih dari sepersepuluh bagian padi hasil yang mereka

potong. Meskipun demikian jumlah buruh pemotong padi tetap saja bertambah banyak.

Adat *bawon* sekarang mulai tergeser dengan munculnya sistem baru yang disebut sistem *tebasan*, yaitu seorang petani pemilik sawah menjual sebagian besar padi yang sudah menguning kepada seorang pedagang dari luar desanya yang akan mengusahakan pemotongan padi. Pedagang yang disebut "penebas" tersebut biasanya datang dengan membawa buruh pemotong padi yang juga berasal dari desa lain yang jumlahnya biasanya tidak lebih dari lima orang.

Hubungan kerja seperti contoh dalam kegiatan pertanian tersebut di atas, terutama terdapat di dalam masyarakat pedesaan Jawa Tengah yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam bidang pertanian.

Hubungan kerja yang terdapat dalam masyarakat nelayan, terutama di daerah pantai utara Jawa Tengah mempunyai bentuk kegiatan yang berbeda. Hubungan kerja di antara mereka terjadi antara pemilik perahu yang disebut "*juragan*" dan para buruh nelayan yang disebut "*pendega*". Di kalangan masyarakat nelayan istilah yang lebih terkenal adalah "*wong mbelah*", yang diperkirakan berasal dari kata "gembel karo welah" yang berarti lekat dengan dayung. Jadi *wong mbelah* artinya orang yang kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari dayung.

Hubungan kerja antara juragan dan pendega pada dasarnya tidak ada ikatan tertentu. Seorang pendega sewaktu-waktu dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan seorang juragan, bilamana ia ingin bekerja pada juragan yang lain. Dalam kebutuhan hidup ada sifat ketergantungan antara pendega terhadap juragan secara ekonomis, misalnya apabila seorang pendega membutuhkan uang yang mendesak, ia akan minta bantuan pinjaman pada juragan. Pengembalian uang pinjaman itu dapat dilakukan dengan cara mengangsur yang diperoleh dari upah hasil menangkap ikan.

Hasil penangkapan ikan dibagi-bagi di antara juragan dan pendega, apabila juragan ikut serta dalam penangkapan ikan ditambah dengan sewa perahu dan peralatan. Jika juragan tidak ikut serta, maka ia akan memperoleh bagian dari hasil penjualan ikan berupa se-

wa perahu dengan peralatannya untuk menangkap ikan.

Di kalangan masyarakat nelayan, karena waktu yang diperlukan untuk menangkap ikan biasanya sehari-hari di laut, maka waktu yang terluang untuk mengerjakan pekerjaan sampingan hampir tidak ada. Sementara itu ada juga nelayan yang mempunyai keahlian membuat perahu untuk menangkap ikan. Para tukang ahli membuat perahu ini dapat mempunyai pekerjaan sampingan dengan kerja upahan apabila ada nelayan atau juragan yang menyuruh membuat atau memperbaiki perahu. Pekerjaan mereka sebagai nelayan masih tetap dilakukan. Pekerjaan para ahli pembuat perahu tradisional ini semakin terdesak dengan di dirikannya usaha pembuatan perahu bermotor di beberapa tempat.

Dari kalangan masyarakat petani di daerah pedesaan yang tanahnya kurang subur ada kebiasaan para buruh tani melakukan kerja *bara*, yaitu mencari nafkah di luar desanya dalam waktu tertentu. Kebanyakan dari mereka menjadi buruh penjaja makanan keliling, buruh bangunan atau buruh kasar. Pekerjaan *bara* ini dilakukan pada waktu selesai mengerjakan sawah atau ladang. Mereka menetap di kota-kota Jawa Tengah dalam beberapa minggu, bahkan kadang-kadang beberapa bulan. Pada musim panen mereka kembali ke desanya. Kebanyakan yang melakukan kerja ini adalah kaum laki-laki. Para buruh *bara* yang berasal dari satu desa biasanya ada yang menyewa rumah tinggal bersama yang disebut "*Pondhok bara*".

Dalam bidang perikanan darat bila kita perhatikan air yang dipergunakan, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : tambak dan perikanan darat dengan air tawar. Tambak yaitu jenis perikanan darat dengan air payau (setengah asin). Tambak banyak diusahakan di tepi pantai utara Jawa Tengah, mulai dari Kabupaten Brebes sampai Kabupaten Rembang. Jenis ikan yang dipelihara oleh para petani tambak adalah ikan bandeng, udang dll. Para petani tambak di daerah Pati, Rembang dan Demak, karena air laut di daerah ini mengandung kadar garam yang cukup baik, maka pada musim panas (Juli s/d September) mengalihkan usahanya dari pemeliharaan ikan/udang ke pembuatan garam.

Perikanan darat dengan air tawar seperti di kolam/empang, telaga, waduk, rawa dan sebagainya, biasanya

diusahakan oleh para petani di daerah pedalaman. Pusat pembenihan ikan di daerah Jawa Tengah di Ngrajak (Kabupaten Magelang) yang berfungsi selain sebagai pusat pemeliharaan ikan juga sebagai tempat penelitian bidang perikanan. Pemeliharaan perikanan air tawar di seluruh wilayah Jawa Tengah terutama di daerah bekas Karesidenan Kedu dan Banyumas, adalah jenis ikan mujahir, tawes, gurami, ikan mas, sepat dsb.

d. Teknologi sehubungan dengan mata pencaharian

Seperti telah disebutkan di muka sebagian besar penduduk daerah Jawa Tengah bekerja dalam bidang pertanian. Untuk menjamin kelangsungan peningkatan produksi pertanian diperlukan penyediaan air, pengaturan jaringan pengairan dan pengamanan luas tanah pertanian dan lingkungan hidup serta peralatan lainnya yang mendukungnya. Peralatan itu antara lain : bajak, cangkul, *garu* (alat penghalus tanah) dan alat-alat pertanian tradisional lainnya.

Dalam bidang perikanan laut sistem penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan perahu layar dan kapal bermotor. Penangkapan ikan secara tradisional dengan perahu layar di sepanjang pantai Laut Jawa dari Rembang sampai dengan daerah Brebes dan dipantai selatan di perairan Cilacap dan Kebumen. Sedang penangkapan ikan dengan kapal bermotor dilakukan di laut yang jauh dari pantai. Peralatan yang digunakan berupa jaring, prayang, trawl. Hasil yang berhubungan dengan daerah pantai di Kebumen yaitu berupa sarang burung lawet. Sebelum mengambil sarang burung itu didahului dengan upacara tradisional dengan pertunjukan wayang kulit. Peralatan yang dipergunakan untuk mengambil sarang burung berupa alat-alat yang tradisional pula yaitu berupa tangga yang terbuat dari bambu atau rotan dengan galah.

e. Hasil mata pencaharian

Produksi padi di Jawa Tengah dari tahun 1971-1979 seperti berikut : (produksi dalam ton).

1971 : 4.908.547	1974 : 5.236.955	1977 : 4.076.520
1972 : 4.538.200	1975 : 5.035.638	1978 : 4.641.308
1973 : 4.962.159	1976 : 3.718.005	1979 : 4.277.586

Adapun produksi bahan makanan di daerah Jawa Tengah yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedele seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.
PRODUKSI TANAMAN BAHAN MAKANAN DI JAWA TENGAH
TAHUN 1969 - 1979 (dalam ton)

TAHUN	JAGUNG	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	KACANG KEDELE
1969	325.312	1.769.449	203.480	47.683	37.147
1970	517.401	1.730.003	188.697	55.770	79.355
1971	361.950	1.873.530	172.657	52.539	60.919
1972	326.047	1.789.906	182.370	50.473	58.276
1973	1.098.238	2.734.161	282.836	55.674	125.088
1974	620.104	2.865.750	282.952	67.545	118.436
1975	711.391	2.694.129	303.049	82.286	108.978
1976	610.821	2.596.365	274.163	74.951	76.491
1977	635.279	2.244.654	227.845	67.292	91.120
1978	972.906	2.244.451	189.049	77.254	112.602
1979	734.769	2.456.384	196.965	70.494	122.550

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang.

Tabel 5.
PRODUKSI BEBERAPA JENIS TANAMAN HORTIKULTURA
TAHUN 1973 - 1977 (PRODUKSI TON).

No.	Jenis tanaman	1973	1974	1975	1976	1977
A.	Sayur-sayuran Dataran Rendah					
1.	Bawang merah	42.730	47.126	64.560	63.699	33.403
2.	Lombok	39.946	69.058	67.958	50.273	60.317
3.	Timun	8.911	11.672	13.978	11.384	19.304
4.	Kacang-kacang	29.037	45.395	33.313	41.347	45.997
5.	Tomat	3.208	4.502	2.188	2.754	9.965
6.	Terong	6720	7.766	9.875	11.255	11.978
7.	Lain-lain	25.626	55.490	30.601	18.358	10.516
B.	Sayur-sayuran Dataran Tinggi					
1.	Kentang	10.810	12.051	6.320	7.430	4.910
2.	Kobis	51.862	73.817	55.516	56.565	52.675
3.	Petai/sawi	12.139	14.681	10.243	9.194	10.053
4.	Wortel	7.264	7.285	3.091	771	1.498
5.	Daun bawang	2.427	2.747	4.383	5.893	4.316
6.	Bawang putih	4.751	6.052	1.193	1.148	983
7.	Lain-lain	9.206	12.832	8.472	2.949	940

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang.

Hasil mata pencaharian dalam bidang pertanian bagi masyarakat Jawa Tengah dapat memenuhi kebutuhan primer berupa pangan, papan dan sandang, meskipun pada daerah daerah tertentu yang tanah pertaniannya kurang subur kebutuhan primer tersebut tidak dapat terpenuhi dengan lengkap. Nampaknya tidak semua petani di daerah Jawa Tengah menggantungkan sumber kehidupannya dari produksi padi, sebab beberapa daerah di Jawa Tengah tidak semua cocok untuk tanaman padi.

Dalam sub bab tentang hasil mata pencaharian ini memang sulit untuk diuraikan secara terperinci masing-masing bidang mata pencaharian penduduk di daerah Jawa Tengah, karena berbagai bidang mata pencaharian tidak terdapat keseragaman dalam perincian hasilnya.

4. SISTEM KEKERABATAN

a. Garis Keturunan

Garis keturunan yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah bilateral. Sedang istilah kekerabatannya menunjukkan klasifikasi menurut angkatan/urutan keturunan. Dalam hal ini semua kakak laki-laki serta kakak wanita ayah dan ibu, beserta para isteri maupun suami mereka di klasifikasikan menjadi satu dengan menggunakan istilah *siwa* atau *uwa* (*Pak Dhe, Bu Dhe*). Sedang adik-adik dari pihak ayah dan ibu diklasifikasikan ke dalam dua golongan yang dibedakan menurut jenis kelamin, yaitu : *paman* (*Pak Lik*) untuk para adik laki-laki dan *bibi* (*Bu Lik*) untuk para adik perempuan.

Dalam adat perkawinan masyarakat Jawa terdapat ketentuan bahwa seseorang (laki-laki dan perempuan) tidak boleh kawin apabila : a). keduanya adalah saudara sekandung; b). anak-anak dua orang laki-laki bersaudara sekandung (disebut *pancer lanang* atau *pancer wali*); c). *sedulur misan*, yaitu saudara sepupu yang disebut *nakdulur*; d). apabila pihak laki-laki lebih muda menurut garis keturunan dari pada pihak perempuan.

Perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan kekerabatan seperti tersebut di atas diperkenankan. Perkawinan lazimnya dilakukan antara seorang *prawan* (gadis) dengan seorang *jaka* (jejaka). Ada juga perkawinan yang disebut "*ngarang wulu*", yaitu perkawinan antara seorang duda dengan seorang wanita, adik kandung almarhum isterinya. Perkawinan *wayuh*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki yang masih beristeri dengan wanita lain. *Diwayuh* berarti dimadu (disebut juga poligami).

Sebelum dilangsungkan suatu perkawinan, lazimnya didahului dengan suatu lamaran dari pihak laki-laki kepada keluarga si gadis. Lamaran tersebut dapat dilakukan oleh orang tua anak laki-laki atau wakil orang tuanya. Lamaran itu diterima oleh pihak orang tua si gadis. Jika orang tua si gadis telah meninggal, lamaran tersebut dapat diterima oleh wali atau kerabat dekat menurut garis keturunan laki-laki, misalnya kakak kandung atau kakak ayah si gadis. Melamar seorang ga-

dis untuk diperjodohkan dalam bahasa Jawa disebut *nakokake*. Sampai sekarang terutama di desa, masih ada perkawinan antara gadis dan jejaka yang belum saling mengenal. Perkawinan semacam ini biasanya terjadi atas kehendak kedua pihak orang tua, sehingga dapat disebut "kawin paksa". Jika antara gadis dan jejaka belum saling mengenal, maka dilakukan pertemuan pertama oleh pihak laki-laki untuk melihat calon isterinya. Peristiwa ini disebut "*nontoni*".

Setelah terdapat kesepakatan antara pihak si gadis dengan pihak laki-laki, maka dilanjutkan dengan mengadakan upacara pertunangan beberapa waktu kemudian. Pertunangan itu disebut "*peningsetan*", yang artinya sigadis telah diikat oleh seseorang (jejaka) dalam kata lain "*wis dipacangake*".

Dalam masyarakat Jawa berlaku suatu adat bahwa untuk menentukan hari perkawinan harus diperhitungkan hari kelahiran kedua calon pengantin serta hari pasaran masing-masing. Misalnya kelahiran si jejaka pada hari *Senin Pon* dan si gadis pada hari *Kemis Pahing*, maka harus dicari hari yang baik untuk mengadakan akad nikah atau *ijab kabul*.

Beberapa hari sebelum dilangsungkan upacara pernikahan, biasanya dilakukan upacara "*asok tukon*" atau "*srahsahan*", yaitu pihak keluarga laki-laki menyerahkan sejumlah uang atau barang, atau kombinasi antara keduanya kepada orang tua atau wali calon pengantin wanita. Upacara itu merupakan tanda maskawin yang disaksikan oleh kerabat-kerabatnya.

Selain sistem perkawinan dengan cara melamar seperti di atas, dalam masyarakat Jawa dikenal juga sistem perkawinan "*magang*" atau "*ngenger*", (jejaka sebelum menikah mengabdikan dirinya pada kerabat si gadis) Bentuk yang lain yaitu sistem perkawinan "*triman*", yaitu perkawinan yang terjadi karena seseorang memperoleh isteri sebagai pemberian atau hadiah dari salah satu lingkungan keluarga tertentu, misalnya keluarga keraton atau keluarga priyayi agung. Sedang wanita yang dihadiahkan itu telah diperisterinya lebih dahulu. Bentuk perkawinan lainnya yaitu yang disebut "*ngunggah-unggahi*", yaitu apabila dari pihak kerabat

si gadis yang melamar jejaka. "*Peksan*", yaitu suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita atas kehendak kedua orang tua mereka (kawin paksa). Pada umumnya perkawinan ini berupa perkawinan anak-anak atau perkawinan masa lampau.

b. Kelompok Kekerabatan

1. Kelompok Inti

Sebagai kelanjutan dari suatu perkawinan, maka terbentuklah suatu keluarga *batih*, atau *keluarga inti*, yang dalam masyarakat Jawa juga disebut *kulawarga*. Keluarga dalam masyarakat Jawa merupakan suatu kelompok sosial yang berdiri sendiri, serta memegang peranan dalam proses sosialisasi anak-anak yang menjadi anggotanya. Adapun seorang kepala keluarga inti atau keluarga *batih* disebut "*kepala somah*". Kepala *somah* dapat seorang laki-laki atau seorang wanita (apabila suami meninggal). Selanjutnya apabila ibu telah meninggal pula, maka diangkat salah seorang anak sebagai kepala keluarga/kepala *somah* yang baru atas persetujuan yang lainnya. Dalam hal ini lebih diutamakan anak laki-laki yang tertua.

Keluarga *batih* atau keluarga inti terdiri dari suami, isteri dan anak-anak mereka. Namun demikian dalam keluarga inti kadang-kadang terdapat pula anak tiri atau anak angkat dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Di Indonesia, termasuk pula di Jawa Tengah terdapat keluarga inti yang *poligini* artinya seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang.

Dalam kegiatan-kegiatan sosial, biasanya kepala keluarga (suami) berperan sebagai wakil dari keluarga yang di kepalainya, terutama dalam kegiatan yang sifatnya religius. Istri dapat pula mewakili keluarganya terutama dalam upacara perkawinan, kelahiran dan lain sebagainya. Walaupun dari sudut ekonomi, rumah tangga (*somah*) merupakan kelompok konsumsi dasar, namun dalam kegiatan produksi, jarang yang merupakan suatu unit produksi yang lengkap. Misalnya di kalangan para petani, karena pertanian padi harus melibatkan sejumlah tenaga kerja yang lebih banyak yang tidak dapat dise-

lesaikan oleh sebuah somah saja, maka dibutuhkan bantuan tenaga dari anggota somah yang lain.

Di samping tugas-tugas ritual dan ekonomi serta sosialisasi anak, keluarga inti menjalankan tugas yang lain, yaitu mengurus para anggota keluarganya yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti : sakit, menganggur, umur tua, yatim piatu dsb. Dengan demikian nampaknya aspek jaminan sosial dalam keluarga inti merupakan hal yang penting dalam masyarakat Jawa sebagai suatu keseluruhan.

2. Keluarga Luas

Keluarga luas (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri lebih dari satu keluarga inti (keluarga inti senior ditambah dengan keluarga inti dari anak-anaknya). Ada tiga macam keluarga luas, masing-masing ialah : keluarga luas *utrolokal*, *virilokal* dan *uxorilokal*. Keluarga luas *utrolokal* yaitu : keluarga yang terdiri dari keluarga inti senior di tambah dengan keluarga inti anak perempuannya. Keluarga luas *virilokal* yaitu : keluarga luas yang terdiri keluarga inti senior di tambah keluarga inti anak-anak lelakinya. Sedangkan keluarga luas *uxorilokal* yaitu : keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti senior ditambah dengan keluarga inti anak laki-lakinya/perempuan.

Sesuai dengan adat menetap sesudah menikah masyarakat Jawa, yang *matrivokal* (artinya : pengantin baru di tinggal di lingkungan keluarga istri, maka keluarga luas yang banyak dijumpai pada masyarakat yang bersangkutan (Jawa) adalah *utrolokal*).

Sebagai kepala keluarga dalam keluarga luas, adalah kepala keluarga inti senior. Meskipun dalam keluarga luas terdapat beberapa keluarga inti, namun masing-masing mewujudkan kelompok sosial yang berdiri sendiri sendiri, baik dalam anggaran rumah tangga maupun "dapurnya". Dengan demikian tidak semua keluarga inti dalam keluarga luas ini mempunyai "*pawon*" sendiri. Bila kepala keluarga luas meninggal, ia akan digantikan oleh salah seorang dari keluarga yang dianggap lebih senior.

Peranan kepala keluarga luas nampaknya hanya dalam

soal-soal urusan keluarga. Tentu saja usaha yang bertalian dengan hubungan keluarga dan urusan-urusan ke dalam seperti : pendidikan anak-anak, pengaturan anggaran belanja keluarga, serta usaha mencari sumber hidup, tetap berada di tangan masing-masing keluarga inti.

3. *Kindred*

Suatu bentuk kekerabatan yang lain ialah *kindred*, yang dalam masyarakat Jawa biasanya dapat disamakan dengan sebutan "*sanak sedulur*". Anggota-anggota *kindred* ini merupakan gabungan kerabat yang terdiri dari saudara-saudara kandung, saudara-saudara sepupu dari pihak ayah dan ibu, kerabat dari satu tingkat ke atas (saudara orang tua dari pihak ayah dan ibu) dan kaum kerabat dari angkatan satu tingkat ke bawah. Keluarga *kindred* ini berkumpul atau saling bertemu apabila ada peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga inti atau keluarga luas, seperti misalnya kematian salah seorang anggota keluarga, perkawinan, hari-hari raya keagamaan terutama Hari Raya Idulfitri dsb. Di dalam kenyataannya *kindred* pada masyarakat Jawa di pedesaan, hanya terdiri dari saudara kandung, saudara sepupu, para paman dan bibi, para ipar ayah maupun ibu dan kerabat-kerabat dekat pihak suami atau isteri.

4. *Alurwaris*

Masih ada satu bentuk kelompok kekerabatan yang disebut *alurwaris*, yang terdiri dari semua kerabat sampai tujuh turunan sejauh masih dikenal tempat tinggalnya. Tugas terpenting dari para anggota *alurwaris* adalah memelihara makam leluhur mereka. Biasanya salah seorang dari warga *alurwaris* yang bertempat tinggal di desa tempat makam leluhur mereka, ditunjuk untuk menghubungi anggota *alurwaris* yang lain yang tersebar di berbagai tempat untuk ikut bersama-sama memelihara dan merawat makam leluhur mereka.

Rupa-rupanya sukubangsa Jawa adalah suku bangsa yang lebih dahulu merasa perlu untuk membentuk organisasi kerabat atau perkumpulan *sanak sedulur*. Sekitar tahun 1930-an sudah terdapat perhimpunan-perhimpunan keluarga yang dalam bahasa Belanda disebut "*familie-*

bonden", yang bertujuan menyatukan orang-orang dari satu keturunan. Perkumpulan-perkumpulan keluarga orang Jawa yang sekarang banyak muncul sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dirintis oleh perkumpulan-perkumpulan keluarga pada jaman penjajahan Belanda. Perkumpulan-perkumpulan keluarga pada jaman penjajahan itu diantaranya bertujuan untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak berbakat yang orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya. Mereka yang tergabung dalam perkumpulan keluarga, sekarang disebut "Keluarga Besar", atau "*trah*", yaitu keturunan seorang moyang tertentu. Perkumpulan keluarga tersebut lengkap dengan pengurusnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan ziarah bersama ke makam moyang mereka dalam bulan Ruwah. Kegiatan ini disebut "nyadran"

c. Istilah Kekerabatan

Setiap suku bangsa mempunyai istilah untuk menyebut seseorang yang menjadi kerabatnya. Istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat Jawa, khususnya Jawa-Tengah, di dalam menyebut kerabatnya adalah sebagai berikut :

Embah (mbah), *Eyang* dan *Side*, adalah sebutan untuk orang tua ayah atau ibu. Seandainya orang tua ayah atau ibu laki-laki, maka dibelakang istilah tersebut ditambah "*kakung/lanang*". Sebaliknya seandainya perempuan ditambah dengan "*putri/wadon*". Dengan demikian menjadi "*embah kakung/putri*" atau "*embah lanang/wadon*". *Embah buyut* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua embah (satu generasi diatas embah).

Bapak/rama, adalah sebutan untuk seorang ayah (orang tua laki-laki ego). Sedang *ibu*, *mbok*, *simbok*, *biyung*, *mak*, adalah sebutan untuk orang tua perempuan ego.

Pak dhe, *Siwa*, *Uwa*, *Bapak Sepuh*, adalah sebutan untuk kakak laki-laki orang tua ego. Sedang *budhe*, *mbokdhe*, *siwa*, *uwa*, adalah sebutan untuk kakak perempuan ayah/ibu. *Pak lik*, *paman*, *lik*, adalah sebutan untuk adik laki-laki ayah/ibu. Sedang sebutan untuk adik perempuan ayah/ibu adalah *ibu cilik*, *bulik*, *bibi*, dan bisa juga *lik*.

Selanjutnya *kang*, *kangmas* (*kakang mas*), adalah sebutan untuk saudara laki-laki yang lebih tua. Sedang sebutan untuk saudara perempuan yang lebih tua adalah *mbak*, *mbakyu*. Sebutan untuk adik laki-laki adalah *dik* atau *dimas*. Kemudian untuk yang berjenis kelamin perempuan dapat *dhik* saja, tetapi dapat juga *dhiajeng* atau *jeng* saja.

Istilah-istilah yang timbul akibat perkawinan adalah sebagai berikut :

Bojo, *maratua*, *anak mantu*, *besan*, dan *ipar* (*ipe*). *Bojo* biasanya digunakan untuk menyebut suami/istri (ini digunakan biasanya pada waktu memperkenalkan suami/istri yang bersangkutan. *Maratua* adalah sebutan untuk mertua. Kemudian *besan* adalah sebutan yang digunakan oleh orang tua laki-laki terhadap orang tua perempuan dan sebaliknya. Sedang *ipar/ipe* adalah sebutan yang digunakan oleh suami terhadap saudara-saudara istri dan sebaliknya.

Sopan Santun Kekerabatan

Nampaknya sopan santun kekerabatan masyarakat Jawa erat sekali hubungannya dengan penggunaan bahasa Jawa. Seperti diketahui bahwa bahasa Jawa mempunyai tingkatan-tingkatan yang disebut "*undha usuking basa*". Pada garis besarnya tingkatan-tingkatan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga macam, masing-masing adalah *ngoko*, *krama* dan *krama inggil*. Penggunaan tingkatan-tingkatan bahasa tersebut dalam kekerabatan merupakan wujud yang nyata dari tingkah laku sopan santun. Tentu saja hal itu disertai dengan sikap yang hormat. Untuk lebih jelasnya, penggunaan tiap-tiap tingkatan *basa* tadi dalam pergaulan antar kerabat, dapat diikuti pada uraian berikut ini.

Bahasa Jawa *ngoko*, pada umumnya digunakan oleh kerabat yang termasuk dalam generasi yang sama (anak terhadap anak). Bahasa ini juga digunakan oleh generasi tua (ayah-ibu) terhadap generasi yang lebih muda (anak).

Bahasa yang lebih tinggi tingkatannya adalah *krama*. Bahasa ini di dalam kekerabatan biasanya digunakan oleh anak terhadap orang tuanya, atau anggota kerabat

yang termasuk dalam generasi orang tua (keatas). Adapun bahasa yang paling tinggi tingkatannya adalah *krama inggil*. Bahasa ini dalam hubungan kekerabatan biasanya juga digunakan oleh generasi yang lebih muda terhadap generasi yang lebih tua. Bahasa ini pada umumnya digunakan oleh orang-orang (kerabat) yang termasuk lapisan atas (priyayi).

Sopan santun dalam kekerabatan yang lain adalah adanya sikap saling memperhatikan, tolong menolong dan hal-hal lain yang menyangkut hubungan kekerabatan.



BAB III

LAPANGAN KERJA DI PERKOTAAN

1. PERKEMBANGAN LAPANGAN KERJA

a. Perkembangan Kota Penelitian

Kotamadya Semarang yang daerahnya sebagian merupakan dataran rendah (pantai laut Jawa) dan sebagian lainnya dataran tinggi (perbukitan candi), secara astronomis terletak diantara $6^{\circ}55'6''$ sampai dengan $6^{\circ}58'18''$ L.S. dan $110^{\circ}23'57''$ sampai dengan $110^{\circ}27'70''$ B.T. Selanjutnya apabila kita lihat letak administratifnya, maka Semarang adalah salah satu daerah tingkat II (Kotamadya) yang tergabung dalam propinsi Jawa Tengah. Malahan Semarang merupakan ibu kota dari propinsi yang bersangkutan. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sedang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan tinjauan historis geografis (Geographical History), antara abad VII sampai abad X Semarang hanya meliputi daerah perbukitan Candi yang ketinggiannya antara 25 meter sampai 250 meter. Pada waktu itu dataran aluvial belum terbentuk. Karena Bukit Candi merupakan daerah perbukitan yang ditumbuhi hutan dan ladang, maka penduduknya hidup dari perdagangan laut dan nelayan. Kemudian dalam abad ke-XI sampai XVI (Pada jaman kerajaan Mataram Hindu) Semarang berfungsi sebagai pelabuhan. Hal itu berarti Semarang telah meluaskan daerahnya ke-dataran rendah. Nampaknya perluasan tersebut diikuti dengan tumbuhnya pemukiman penduduk. Pada masa itu pantai Semarang meliputi daerah Merican, Kugas, Gunung Sawo, sebelah barat Gajah Mungkur, Karangumpul bagian atas, Sampangan, Panjangan, Simongan (daerah sekitar Gedung Batu), perbukitan Krapyak dan Jarakah.

Daerah-daerah pantai (hutan pantai) dan rawa-ra-

wa mulai dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan pertanian (sawah) dan perikanan. Wilayah Semarang menjelang tumbuh menjadi kota, terjadi setelah dataran aluvial terbentuk yaitu kira-kira sekitar permulaan abad XV. Jika kita perhatikan pertumbuhan Kali Semarang (yang menjadi muara Kaligarang, Kali Kreyo dan Kali Kripik) sekitar tahun 1500 - 1700, telah tampak pola dasar pengembangan Semarang. Pertumbuhan pertama ini dapat dianggap sebagai embrio kota, yaitu suatu titik tumbuhnya kehidupan wilayah yang menjurus ke perkembangan suatu kota. Suatu wilayah dapat disebut kota apabila memiliki unsur-unsur :

- 1) Kehidupan penduduk dengan segala kegiatannya;
- 2) Menjadi pusat pemerintahan, daerah atau lokal, dengan kegiatan administrasinya;
- 3) Kelengkapan fasilitas sosial, kantor-kantor instansi, toko-toko dan pasar-pasar, tempat-tempat hiburan;
- 4) Kelengkapan pelayanan sosial berupa tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat ibadat, fasilitas pelayanan kesehatan dsb.;
- 5) Batas fisik yang jelas;
- 6) Jalur sirkulasi lalu-lintas dengan perlengkapan-perengkapan jalannya.

Peletak dasar pembangunan kota Semarang adalah Kyai Pandan Arang. Sekitar tahun 1950 muara Kali Semarang telah mencapai daerah kampung Sleko sekarang. Pada masa pemerintahan Kayi Pandan Arang III ia telah memindahkan tempat pemukimannya ke daerah pegisikan baru (dekat muara Kali Semarang).

Semarang pada abad XVI termasuk wilayah kekuasaan Demak. Pada masa pemerintahan Adipati Semarang yang pertama (Yudonegoro) yang memerintah pada tahun 1683-1713, pusat pemerintahannya terletak di kompleks Pasar Johar dan pertokoan Kanjengan yang sekarang. Karena pada waktu itu sungai dan jalan yang berada dipinggirnya merupakan sarana transportasi yang penting, maka pusat-pusat pemukiman terletak sekitar sungai (Kali Semarang). Penduduknya kebanyakan orang-orang Jawa dan orang-orang Cina.

Orang asing (kulit putih) atau bangsa Belanda bertempat tinggal di sekitar Benteng "*de Vijf Hoek*" (benteng Ujung Lima) di daerah Sleko. Pembuatan jalan-jalan utama seperti Jalan Raden Patah, Pengapon Kranggan, Depok dan jalan Mataram merupakan perkembangan selanjutnya.

Perkembangan pemukiman masyarakat Jawa di Semarang pada tahun 1700, yaitu di jalan Petek-Poncol, Kampung Melayu, daerah Sukolelo, Kobong, dan Tawang sari. Perkembangan kota Semarang yang penting sesudah tahun 1700 adalah : Setelah terjadinya pemberontakan Cina tahun 1714 dan 1742 dan pada masa *Ge-meente van Semarang* (1 Januari 1906). Pemberontakan orang-orang Cina di Semarang adalah sebagai akibat dari pengaruh pembunuhan orang-orang Cina di Batavia dalam tahun 1940. Setelah peristiwa tersebut, Kompeni (Belanda) menggusur perkampungan Cina ke daerah sekitar Kali Semarang yang sekarang berupa kampung Pekojan, Gang Lombok dan Gang Pinggir. Penggusuran pemukiman orang-orang Cina tersebut disamping untuk mencegah timbulnya pemberontakan oleh orang-orang Cina, daerah tersebut merupakan daerah yang menguntungkan untuk perdagangan.

Wilayah perkampungan baru Cina ini kemudian dijadikan dasar pengembangan kota Semarang, yaitu dengan terbentuknya jalur perdagangan jalan Kranggan dan jalur jalan Mataram. Dalam segi perdagangan meskipun Kompeni Belanda mengadakan sistem "*Pajak Pas*" untuk membatasi kekuasaan perdagangan orang-orang Cina, namun akibatnya bahkan sebaliknya; yaitu memberikan peluang bagi orang-orang Cina untuk menjadi pedagang perantara antara Belanda dan Pri-bumi. Pemukiman Cina yang baru ini makin berkembang dan menjadi pusat kegiatan perdagangan.

Pemerintah Kompeni Belanda kemudian memanfaatkan bekas pemukiman orang-orang Cina di sekitar jalan Raden Patah menjadi kota perbentengannya yang wilayahnya meliputi daerah Tawang, Gedangan, Jurnatan sampai di daerah Berok (dekat Kantor Perbendaharaan Negara). Pada waktu itu di daerah tersebut telah dibangun Gereja Blenduk, Akademi Angkatan Laut dan Gedung Sositet.

Dengan dibangunnya daerah pertokoan, maka daerah benteng de Vijf Hoek praktis tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu pengembangan di arahkan disamping ke daerah *Pecinan* yang menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi orang-orang Cina juga daerah benteng Belanda. Kegiatan Kedua kutub ini dari segi ekonomi menjadi pusat perdagangan sampai sekarang.

Pengembangan berikutnya ialah pembangunan gedung gedung seperti :

Gedung Merdeka (de Vrijheid) yang berfungsi sebagai Kantor Gubernur Pantai Utara Jawa dan rumah kediaman Gubernur (bekas APDN Semarang). Pembangunan kedua gedung tersebut diikuti dengan pembuatan jalur lalu lintas seperti : jalan Bojong (sekarang jalan Pemuda) dan jalan Mataram (sekarang M.T. Haryono).

Setelah pembentukan Kotapraja tanggal 1 Januari 1906 yang diatur dalam staatsblad 1906 No. 20 barulah sistem pembangunan lingkungan dan fasilitas kota mulai diperhatikan. Hal itu di tandai dengan pembangunan perumahan Belanda di Halmahera dan Sompak. Kemudian dibuat pula saluran-saluran air untuk menanggulangi banjir (saluran "Siranda Kanal"). Selain itu pelabuhan juga diperbaiki dan diperluas dermaganya. Pada waktu itu kotapraja Semarang yang memiliki luas 9994 hektar, berpenduduk kurang lebih 100.000 jiwa.

Tahun 1975 penduduk telah berkembang menjadi 722.739 jiwa dengan luas areal yang tetap. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang makin bertambah sedangkan fasilitas-fasilitas kehidupan yang makin berkurang, maka dalam bulan Juni 1976 telah diambil langkah-langkah kebijaksanaan dengan mengadakan pemekaran Kotamadya Semarang, sehingga luas areal Kotamadya Semarang menjadi 34.655.61 Ha. dengan jumlah penduduk 971.963 jiwa (1976).

b. Perkembangan lapangan kerja

Masalah lapangan kerja sangat penting untuk dipakai sebagai salah satu indikator dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Mengingat salah satu

tujuan pembangunan adalah untuk meluaskan lapangan dan kesempatan kerja, maka pembangunan harus dapat menciptakan kesempatan kerja baik di kota atau di pedesaan.

GBHN TAP. No. II/MPR/1983 antara lain menyebutkan bahwa : Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang di samping meningkatkan produksi nasional, pertumbuhan ekonomi harus mempercepat pula pertumbuhan lapangan kerja. Karena pemberantasan pengangguran bagi Pembangunan Jangka Panjang, bukan saja karena kesempatan kerja memiliki nilai ekonomis, melainkan juga karena mengandung nilai kemanusiaan dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga dengan demikian memberi isi kepada asas kemanusiaan.

Untuk mengisi lapangan kerja yang akan tersedia, diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan ketrampilan yang sesuai dengan keperluan pembangunan; sehingga perluasan lapangan kerja dan pembinaan sistem pendidikan yang sesuai dengan keperluan pembangunan, atau yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan, harus dilaksanakan secara bersama dan serasi.

Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat : tetap memberikan kesempatan kerja yang banyak, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menggunakan alat-alat yang sebanyak mungkin dihasilkan sendiri, mendukung tercapainya sasaran pembangunan dan mempertinggi ketrampilan untuk menggunakan teknologi yang lebih maju di kemudian hari.

Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka ditetapkan sasaran pembangunan mengenai tenaga kerja pada PELITA IV, yaitu : perluasan dan pemerataan kesempatan kerja, serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja, merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu selalu mengusahakan tercapainya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin. Dengan jalan demiki-

an, maka di samping produksi meningkat, sekaligus dapat dicapai pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya perlu diambil langkah-langkah di berbagai sektor secara terkoordinasi dan terpadu untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sehubungan dengan ini perlu lebih ditingkatkan perencanaan ketenagakerjaan yang terpadu.

Selama ini sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di daerah Jawa Tengah, yaitu sekitar 59%, Penduduk Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 adalah 25.367,344 jiwa (dan sampai bulan Juni 1983 telah mencapai jumlah 26.181,964 jiwa), dengan kepadatan 742/Km². Kepadatan penduduk ini masih akan bertambah pada masa-masa mendatang, mengingat bahwa laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir (1971 - 1980) mencapai 1,6% per tahun. Dari jumlah penduduk itu, 15 juta jiwa adalah penduduk usia kerja (sampai bulan Juni 1983 sudah menjadi 18.244,232 jiwa). Sedangkan menurut tempat tinggal penduduk di daerah Jawa Tengah 89% bertempat tinggal di daerah pedesaan.

Jumlah pencari kerja di Jawa Tengah berjumlah : 127,2 ribu, yang terdiri dari pencari kerja perempuan (30,9 ribu) dan pencari kerja laki-laki (96,3 ribu). Berdasarkan daerah asalnya sebagian besar berasal dari daerah pedesaan (69%). Dalam waktu yang sama jumlah penduduk yang bekerja adalah 9.804,3 ribu dan dari jumlah itu 91% atau 8.921.100 orang bekerja di daerah pedesaan. Sedang sisanya sebanyak 883.200 orang bekerja di perkotaan.

Perkembangan lapangan kerja sebagai hasil pembangunan, khususnya di Jawa Tengah, perlu diketahui supaya dapat dijadikan evaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi inilah program pembangunan yang telah/sedang berjalan serta program pembangunan berikutnya selalu dapat disempurnakan demi tercapainya tujuan nasional yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

Masalah lapangan kerja, terutama mengenai pe-

nyediaan dan penyerapan akan sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu : tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Di daerah Jawa Tengah jumlah angkatan kerja yang merupakan persediaan tenaga kerja, setiap tahun bertambah dengan cepat, yaitu sekitar 1,76% atau antara 150.000 sampai 160.000 orang. Sedangkan jumlah angkatan kesempatan kerja yang produktif, yang diciptakan dalam masyarakat kurang mencukupi untuk menampung jumlah angkatan kerja yang tersedia. Keadaan inilah yang memberikan motivasi bagi Tim PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah) dalam rangka mencapai tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja.

Penduduk yang telah cukup umur atau yang telah termasuk klasifikasi angkatan kerja, membutuhkan pekerjaan. Bila tidak ada kesempatan kerja mereka akan menjadi penganggur. Sampai akhir tahun 1982/1983 penganggur di Jawa Tengah mencapai 3,52% dari angkatan kerja atau sebanyak 360.094 orang. Penduduk Jawa Tengah akan bertambah yang membutuhkan pekerjaan, apabila penduduk yang telah cukup umur untuk melakukan pekerjaan akan bertambah jumlahnya. Apabila penambahan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, berarti jumlah penganggur akan makin meningkat pula.

Walaupun pada Repelita II di Jawa Tengah angka pertumbuhan penduduk cenderung menurun dan berada lebih rendah jika dibandingkan perkiraan sebelumnya, masih terdapat keadaan yang tidak seimbang antara jumlah tenaga kerja dan daya tampung.

Tabel berikut ini adalah gambaran tentang perkembangan tenaga kerja penduduk Jawa Tengah dari tahun 1979 - 1983.

Tabel 6 : PERKIRAAN ANGKATAN KERJA DI JAWA TENGAH SELAMA PERIODE
1978 - 1983 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN

Kelompok	1978			1979			1980			1981			1982			1983		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10 - 14	284.940	201.986	486.125	248.024	171.930	418.954	237.405	187.244	424.649	228.508	180.848	387.352	211.758	152.737	364.492	196.886	142.915	339.801
15 - 19	718.136	481.806	1.200.940	741.298	508.779	1.250.077	778.448	533.619	1.310.068	811.951	557.338	1.389.082	845.082	582.535	1.427.190	877.190	608.541	1.483.731
20 - 24	808.884	341.876	948.770	884.482	372.925	1.057.407	781.379	400.911	1.182.290	838.275	428.148	1.287.421	915.171	457.630	1.372.801	982.088	486.363	1.478.430
25 - 34	1.438.388	883.803	2.331.988	1.438.843	912.740	2.352.583	1.418.357	902.988	2.319.390	1.382.858	888.591	2.291.448	1.388.384	882.942	2.252.308	1.322.377	854.804	2.177.181
35 - 44	1.521.384	903.712	2.424.976	1.541.711	932.810	2.474.321	1.535.248	951.880	2.486.908	1.528.783	974.217	2.503.000	1.522.318	980.088	2.512.414	1.480.485	1.005.891	2.486.376
45 - 54	941.880	582.817	1.504.297	988.875	580.585	1.548.470	988.070	588.632	1.594.702	1.023.285	615.883	1.638.918	1.081.554	632.673	1.684.227	1.078.774	650.829	1.729.603
55 - 64	443.985	286.784	710.348	458.825	276.827	733.552	469.867	281.840	751.715	483.388	288.217	788.586	488.224	285.720	781.944	508.969	290.882	797.851
65 +	207.081	90.038	297.100	208.112	89.904	298.016	202.158	88.985	291.144	198.273	103.608	288.881	180.455	87.086	277.541	174.845	82.753	257.598
	2.172.908		3.742.021	2.063.192	1.263.192	3.326.384	2.064.928	1.265.898	3.330.826	2.001.280	1.205.808	3.207.088	2.001.933	1.201.438	3.203.372	2.039.594	1.202.777	3.242.371

Catatan : Angka-angka di atas dihitung dengan mempergunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (labor force participation rate) dari statement III dan IV dalam "Naskah Proyeksi Angkatan Kerja Indonesia selama Repelita III" Dept. Tenaga Kerja Transmigrasi dan Biro Pusat Statistik, serta penduduk selama periode 1978 - 83 yang diperoleh dengan cara interpolasi penduduk Jawa Tengah tahun 1978 dan 1983.

Selanjutnya berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pelita III dan identifikasi strategis di Jawa Tengah, proyeksi angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 1984 - 1989, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

tabel 7.

PROYEKSI ANGKATAN KERJA DI JAWA TENGAH TAHUN 1984 - 1989.

	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Pertanian	6.706.348	6.911.878	7.028.778	7.148.392	7.270.046	7.393.739
Pertambangan dan Galian	30.328	30.844	31.368	31.902	32.445	32.997
Industri	1.348.024	1.370.951	1.392.976	1.416.681	1.440.791	1.465.305
Listrik, Gas, Air Minum	4.300	4.374	4.647	4.726	4.807	4.884
Bangunan	173.384	175.823	178.914	181.939	185.056	188.204
Perdagangan	1.479.149	1.504.288	1.530.089	1.556.105	1.582.587	1.609.513
Angkatan Berkas dan Lembaga	283.398	286.724	293.831	298.933	304.020	309.193
Keuangan	23.567	23.968	24.397	24.813	25.235	25.664
J a s a	1.095.124	1.113.743	1.132.734	1.152.013	1.171.618	1.191.558
J u m l a h	11.233.622	11.424.593	11.617.812	11.815.524	12.016.805	12.221.057

Sumber : Evaluasi Pelaksanaan Pelita ke III dan Identifikasi
sektor Strategis di Jawa Tengah yang telah diolah.

c. Jenis-jenis lapangan kerja formal

Berbicara tentang lapangan kerja formal, seolah-olah kita lalu berorientasi kepada jenis-jenis lapangan kerja yang dapat memberikan predikat pekerjajanya sebagai pegawai pemerintah atau pengusaha besar. Nampaknya hal itu tidak seluruhnya benar. Sebab lapangan tersebut hanya merupakan beberapa wujud dari berbagai macam pekerjaan formal. Meskipun demikian ada satu hal yang perlu diketahui bahwa batasan formal memang ada kaitannya dengan masalah hukum atau peraturan yang ditetapkan pemerintah. Hal itu dimaksudkan untuk membedakan lapangan pekerjaan yang disebut "informal". Perbedaan itu akan nampak lebih jelas, setelah pembaca mengikuti uraian jenis-jenis lapangan pekerjaan informal yang diuraikan pada sub bab berikutnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka lapangan

kerja formal yang terdapat di kotamadya Semarang antara lain : pegawai negeri baik daerah maupun pusat, para pengusaha seperti PT (Perseroan Terbatas) perhotelan, perusahaan angkutan dan lain sebagainya. Sebagai gambaran tentang pegawai negeri berikut ini akan dikemukakan jumlah tersebut berdasarkan golonganannya yang diperoleh dari kantor statistik Tingkat I Jawa Tengah, yaitu : untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat Daerah Tingkat I Jawa Tengah golongan I sejumlah 17.357 jiwa, golongan II sejumlah 18.458 jiwa, golongan III sejumlah 1.727 jiwa, dan golongan IV sejumlah 71 jiwa. Sedang untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah golongan I sejumlah 29.997 jiwa, golongan II sejumlah 14.431, golongan III sejumlah 866 jiwa dan golongan IV sejumlah 11 jiwa. Jumlah tersebut adalah berdasarkan tahun 1980.

d. Jenis-jenis lapangan kerja informal

Yang dimaksudkan dengan lapangan kerja informal adalah jenis-jenis pekerjaan yang tidak begitu menuntut keahlian atau ketrampilan khusus dan atau tidak begitu memerlukan manajemen yang rumit. Menurut para ahli yang berkompeten dalam masalah ini, ciri-ciri lapangan pekerjaan disektor informal adalah sebagai berikut :

1. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaannya.
2. Tidak terbentuk oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering di kategorikan liar).
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya, biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
4. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha lain.
5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
6. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam macam tingkatan tenaga kerja.

7. Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
8. Tidak mengenal perbankan, pembukuan, perkreditan dan lain sebagainya.

Dengan demikian menurut Soetjipto Wirosardjono dalam Presma 1976, halaman 25, yang dapat digolongkan kedalam kegiatan tenaga kerja disektor informal ialah kuli bangunan, kuli pelabuhan, penjaja makanan dan minuman, pedagang kaki lima, pedagang keliling (sayur, daging, buah, tukang minyak), penjual jasa-jasa perorangan seperti : tukang sepatu, tukang kayu, tambal ban, tukang patri, pembantu rumah tangga, tukang cukur dan lain sebagainya.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, maka yang termasuk pekerjaan disektor informal yang terdapat dikotamadya Semarang selain beberapa seperti yang telah disebutkan diatas, ialah : tukang becak, tukang sampah, penjahit, tukang kebun, dan lain sebagainya.

2. TENAGA KERJA

Sub bab tenaga kerja ini antara lain akan meliputi : Spesialisasi tenaga kerja, jenis tenaga dan pembagian kerja menurut seks, dan jenis tenaga serta pembagian kerja menurut umur. Untuk lebih jelasnya ketiga hal tersebut akan diuraikan satu-per-satu berikut ini.

a. Spesialisasi tenaga kerja

Seperti diketahui bahwa lapangan pekerjaan yang terdapat dikota (apalagi ibu kota propinsi), sangat kompleks. Kekomplekan tersebut tentu saja akan menuntut tenaga kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ini berarti bahwa lapangan pekerjaan di kota terutama yang formal, memang membutuhkan tenaga yang ahli dan trampil. Sebaliknya yang informal, hal yang demikian nampaknya tidak begitu diperhatikan.

Spesialisasi tenaga kerja di berbagai jenis lapangan pekerjaan formal di Kotamadya Semarang, nam-

paknya cukup jelas. Misalnya dalam suatu perusahaan ada tenaga kerja yang khusus memproduksi barang, kemudian ada tenaga kerja yang khusus memasarkan, dan lain sebagainya. Demikian juga di instansi-instansi pemerintah terdapat tenaga administratif, teknis dan lain sebagainya. Spesialisasi tersebut tentu saja dilatar belakangi oleh keahlian dan ketrampilan dari tenaga kerja yang bersangkutan. Dengan demikian spesialisasi tenaga kerja sangat erat hubungannya dengan keahlian serta ketrampilan seseorang (tenaga kerja), walaupun tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan.

b. Jenis tenaga dan pembagian kerja menurut seks

Jenis tenaga dan pembagian kerja menurut seks pada masyarakat kotamadya Semarang dapat digambarkan melalui beberapa lapangan kerja berikut ini.

Didalam perdagangan yang meliputi pedagang besar, menengah dan kecil, pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Pedagang eceran, yang termasuk dalam pedagang kecil biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Nampaknya jenis tenaga yang dibutuhkan di dalam lapangan ini, tidak begitu membutuhkan pendidikan yang tinggi atau keahlian yang diperoleh dari pendidikan formal.

Selanjutnya di dalam lapangan yang lain (industri) yang meliputi industri besar, menengah dan kecil, tenaga yang dibutuhkan adalah laki-laki dan perempuan. Industri seperti tekstil, rokok, kimia (obat-obatan), banyak membutuhkan tenaga kerja wanita dan anak-anak. Dengan demikian di dalam industri ini keahlian yang diperoleh dari pendidikan formal tidak begitu banyak berbicara dibandingkan industri-industri besar yang padat modal.

Didalam pemerintahan, keahlian dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal nampaknya sangat diperhitungkan. Adapun tenaga kerjanya meliputi laki-laki dan perempuan. Kemudian pariwisata yang dapat menampung tenaga kerja khusus atau umum, meliputi tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Transportasi darat dan laut, nampaknya didominasi

oleh kaum laki-laki. Sedang transportasi udara disamping laki-laki juga perempuan (pramugari). Lapangan pekerjaan lainnya yang banyak didominasi oleh kaum laki-laki adalah perikanan. Disini tenaga perempuan biasanya hanya membantu didalam hal memasarkan.

c. Jenis tenaga dan pembagian kerja menurut umur

Seperti telah disebutkan di bagian depan bahwa Kota madya Semarang tersedia lapangan kerja baik formal maupun informal. Di sektor formal seperti pegawai negeri atau lapangan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan aturan-aturan pemerintah, nampaknya tenaga kerja dipergunakan adalah tenaga yang ahli dan trampil. Artinya mereka mempunyai latar belakang pendidikan formal. Karena latar belakang tersebut, ditambah dengan aturan-aturan pemerintah, maka dengan sendirinya usia mereka disekitar 15 sampai dengan 55 tahun. Dengan kata lain para pekerja adalah remaja dan dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan.

Kemudian mengenai jenis tenaga dan pembagian kerja menurut umur disektor informal adalah sebagai berikut: Sektor informal yang tidak harus memiliki keahlian atau ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan formal, dengan sendirinya tenaga kerja yang dibutuhkan dapat anak-anak sampai orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Tenaga kerja anak-anak pada umumnya disesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Tentu saja pekerjaan yang dianggap berbahaya/berat dilakukan oleh orang dewasa, misal : tukang becak, tukang songkro dan lain sebagainya. Untuk anak-anak pada umumnya menjual koran, menyemir sepatu dan lain sebagainya.

3. SIFAT HUBUNGAN DAN KESEMPATAN KERJA

a. Kesempatan kerja dan hubungan kekerabatan

Masalah kesempatan kerja dalam hubungannya dengan hubungan kekerabatan, cukup menarik. Apalagi kalau dikaitkan dengan tenaga kerja pendatang (dari luar kota Semarang). Nampaknya pengaruh hubungan kekerabatan sangat kompleks. Ia tidak hanya mempengaruhi segi-segi kehidupan sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya

nya. Tetapi ia (hubungan kekerabatan) juga mempengaruhi kesempatan kerja. Dengan kata lain hubungan kekerabatan mempermudah seseorang (anggota kerabatnya) untuk memperoleh pekerjaan.

Pernyataan diatas dapat dengan mudah ditelusuri pada kelompok-kelompok tenaga kerja tertentu, baik yang digolongkan sebagai tenaga kerja klas tinggi maupun kelas rendah pada instansi-instansi atau lembaga ekonomi tertentu (baik pemerintah, swasta, maupun perorangan). Di tempat-tempat tersebut sering terjadi (kalau tidak boleh dikatakan sebagian besar) para pekerja banyak yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Hal tersebut akan lebih jelas (nampak) pada kelompok pekerja pendatang (suku bangsa Minangkabau). Selain diantara mereka ada yang menjadi pegawai negeri, namun lebih banyak yang bekerja disektor informal (dalam hal ini membuka kios restoran /warung Padang) dan pedagang kaki lima. Apabila kita perhatikan banyak dari mereka yang masih saudara (masih hubungan kekerabatan). Sebagai contoh yang lain ialah pekerja dibidang jasa perorangan (tukang becak). Dalam hal ini biasanya mereka masih ada hubungan kekerabatan di samping kesamaan daerah asal.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa kaitan antara hubungan kekerabatan dengan kesempatan kerja di kota Semarang masih cukup nampak.

b. Kesempatan kerja dan pendidikan

Masalah kesempatan kerja dalam hubungannya dengan pendidikan, nampaknya merupakan dua variabel yang saling berkaitan; khususnya untuk lapangan pekerjaan yang memerlukan keahlian. Kotamadya Semarang yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.042.460 jiwa dengan perincian 511.830 laki-laki dan 530.630 perempuan ternyata didominasi oleh penduduk yang berusia muda.

Kita tahu bahwa kotamadya memiliki sarana pendidikan yang dapat dikatakan memadai. Meskipun demikian, (barangkali, karena itu), mereka (yang tergolong usia muda). Sebagian besar masih berstatus se-

bagai pelajar atau mahasiswa, terutama yang berumur sekitar 10 sampai dengan 24 tahun. Malahan sampai sekitar 34 tahun. Sebagai konsekwensinya angka ketergantungan cukup tinggi. Hal ini dapat dimengerti, sebab mereka belum bekerja, yang berarti biaya kehidupannya masih ditanggung oleh orang tuanya atau saudaranya.

Bagi mereka yang sudah tidak sekolahpun (karena sudah lulus atau putus sekolah), belum tentu mau bekerja dilapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya (terutama yang sudah lulus). Idealnya memang demikian seperti yang dikatakan oleh Sediono MP Tjondronegoro. Menurut beliau bahwa pemberian kesempatan kerja baru bila ditunjang oleh pendidikan yang seluas-luasnya akan mendorong mobilitas yang vertikal dalam masyarakat serta memberi harapan baru bahwa prestasi kerja akan diberi imbalan yang tinggi (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1978 : 19). Namun kenyataan menunjukkan lain. Nampaknya bukan hanya penduduk pedesaan (yang terpelajar) saja yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai (diinginkan), penduduk kotapun demikian. Dengan demikian, maka hubungan atau kaitan antara kesempatan kerja dengan pendidikan masih mencerminkan kesesuaian.

c. Kesempatan kerja dan hubungan patron-klien

Apabila hubungan pertemuan/persahabatan sudah sedemikian tidak berimbang, sehingga salah satu pihak ada di atas pihak yang lain, maka hubungan pertemuan itu dapat berubah menjadi hubungan patron-klien. Dalam hubungan ini patron memberikan bantuan ekonomis dan perlindungan pada klien yang dapat berupa bantuan modal, pinjaman dll. Di pihak lain klien memberikan imbalannya dalam perwujudan rasa hormat-loyalitas, dukungan politis dll. Jadi hubungan kerja dapat terjalin dalam bentuk hubungan patron klien dan patron dapat memberikan kesempatan kerja kepada klien.

Dalam hubungan dan kesempatan kerja antara pihak

pencari kerja dengan pihak pemberi kesempatan kerja, satu sama lain saling mengharapkan (dalam arti tujuan utama kedua belah pihak ingin memperoleh keuntungan yang berupa barang, jasa atau sumber lain yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain). Namun demikian hubungan tersebut dalam kenyataannya ada kepincangannya baik dari segi fisik maupun ekonomi. Sehingga motivasi hubungan patron-klien sering titik beratnya pada kebutuhan klien.

Dalam kehidupan di kota, terutama kota-kota propinsi seperti kota Semarang, hubungan patron-klien nampak seiring dengan kepadatan penduduk kota tsb. yang semakin meningkat. Hal itu disebabkan banyaknya penduduk desa yang pergi ke kota dalam rangka mencari kerja sebagai hamba.

d. Imbalan dari pekerjaan

Untuk menguraikan secara terperinci mengenai imbalan dan pekerjaan penduduk Kotamadya Semarang, khususnya desa Pleburan, memang tidak mudah dan memerlukan penelitian khusus. Oleh karena itu dalam uraian tentang imbalan dan pekerjaan ini hanya akan disajikan beberapa aspek penghidupan, khususnya dalam bidang ketrampilan dan jasa.

Seperti telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu mengenai peningkatan jumlah penduduk di Kotamadya Semarang, yang berpengaruh pula dalam pengembangan pelbagai jenis lapangan kerja terutama dalam bidang ketrampilan dan jasa. Jumlah penduduk yang makin bertambah akan membutuhkan berbagai macam jenis jasa di samping kebutuhan akan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari.

Lapangan kerja dalam bidang jasa yang muncul di kota Semarang antara lain : pembantu rumah tangga (pramuwisma), jasa angkutan dalam atau luar kota, bengkel kendaraan bermotor, tukang pijat, makelar (rumah, tanah, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya. Imbalan dari masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut. Tukang pijat dengan pembayaran antara seribu rupiah sampai lima ribu rupiah. Pembantu rumah tangga dengan upah tiap bu-

lan dari sepuluh ribu rupiah sampai dua puluh lima ribu rupiah. Sedang bagi tukang becak penghasilannya antara Rp. 2.000,- sampai Rp. 5.000,- sehari.

Kota Semarang disamping sebagai pusat pemerintahan, dan perdagangan, juga sebagai pusat kegiatan pendidikan. Berbagai macam dan tingkat pendidikan terdapat di kota tersebut (mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat Perguruan Tinggi). Perkembangan pendidikan tersebut telah mendorong para pelajar dari daerah sekitarnya untuk datang ke Semarang dengan tujuan mencari atau meneruskan pendidikan. Perkembangan ini mempengaruhi usaha-usaha jasa penyewaan rumah/kamar (pemondokan). Uang sewa kamar tiap bulan antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 25.000, Uang pemondokan antara Rp. 15.000,- sampai Rp. 35.000,- tiap orang untuk sebulan.

Para buruh yang bekerja pada perusahaan milik perorangan atau pada industri makanan dan obat-obatan mempunyai penghasilan yang berbeda-beda menurut ketrampilannya. Kebanyakan para buruh tersebut terdiri dari kaum wanita remaja. Di Desa Pleburan terdapat sebuah perusahaan penerbitan buku yang buruhnya terdiri dari penduduk di sekitarnya. Mereka mendapat 2 kg beras dan uang lauk selama seminggu Rp. 450,- upah mingguan antara Rp. 1.500,- sampai Rp. 5.000,- dan tiap akhir bulan mereka memperoleh uang bulanan antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 15.000,-

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa imbalan dari pekerjaan pada umumnya berupa uang.

4. POLA PEMUKIMAN TENAGA KERJA

Tenaga kerja yang bekerja di kotamadya Semarang sudah barang tentu bukan hanya penduduk kota saja. Tetapi banyak diantaranya yang bertempat tinggal di luar kota. Dengan demikian ada 3 pola yang akan diuraikan dalam sub bab ini, masing-masing adalah : tidak menetap, menetap sementara, dan menetap. Untuk lebih jelasnya ke tiga hal (pola) tersebut akan diuraikan satu-persatu berikut ini :

a. Tidak menetap

Yang dimaksudkan dengan tidak menetap disini ada-

lah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya dengan sistem pulang pergi. Artinya : ia tidak menetap di kota. Tetapi langsung pulang ke rumahnya. Dahulu para pekerja yang berada di luar kota yang melakukan sistem *nglaju* ini tidak begitu banyak jumlahnya. Tetapi sekarang selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi (terutama kemajuan di bidang transportasi), nampaknya telah mempengaruhi sistem ini. Sebab mereka sekarang dapat dengan mudah menggunakan sarana transportasi (umum) untuk pergi dan pulang kerja dengan biaya yang relatif murah.

Tenaga kerja yang melakukan sistem ini kebanyakan adalah : para buruh bangunan, penjaja makanan, tenaga kerja dalam bidang transportasi dan lain sebagainya yang bertempat tinggal di sekitar kotamadya Semarang. Sistem ini juga banyak dilakukan oleh pekerja asal kota yang bekerja di daerah pemekaran kota seperti Demak, Ungaran, Salatiga, Kendal dan lain sebagainya.

b. Menetap sementara

Penduduk yang mencari pekerjaan atau bekerja untuk waktu yang lebih lama, dapat digolongkan tenaga kerja yang menetap sementara. Mereka itu kebanyakan terdiri dari buruh yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan seperti : perbaikan jalan dan jembatan, yang seringkali lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Karena jarak yang jauh itulah, mereka tidak dapat *nglaju*. Mereka perlu meninggalkan keluarganya untuk beberapa hari, minggu bahkan beberapa bulan. Mereka tinggal di barak-barak yang telah disediakan oleh proyek yang bersangkutan.

Ada pula tenaga kerja yang tidak *nglaju* dan menetap sementara di kota Semarang dalam beberapa minggu, atau bulan, yang disebut buruh "*bara*". Mereka itu kebanyakan berasal dari kota-kota sekitar Semarang atau beberapa kota di daerah Jawa Tengah (Demak, Kendal, Salatiga, Ungaran, Magelang, Ambarawa, Kudus, Surakarta, Klaten, Pekalongan, Boyolali dsb.). Adapun pekerjaan mereka lakukan adalah penjaja makanan, penjual bakso, soto, mie, penjual

jamu, sayuran, para pramuwisma, buruh pabrik, tukang becak dsb.

Beberapa tenaga kerja *bara* yang berasal dari desa yang sama, kadang-kadang ada juga yang menyewa rumah (kontrak) bersama-sama. Rumah sewaan itu disebut "*pondhok bara*". Para tenaga kerja *bara* ini tidak terlepas dari ikatan dengan desa asalnya. Karena mereka masih tercatat sebagai penduduk dari desa asal mereka. Dalam jangka waktu tertentu mereka kembali ke desanya untuk melakukan berbagai kegiatan dalam bidang pertanian seperti mengerjakan sawah atau tegalan (waktu musim tanam atau waktu musim panen). Di samping itu pada peristiwa-peristiwa tertentu tenaga kerja boro ini pulang ke desanya. Misalnya dalam bulan Ruwah (untuk melakukan ziarah ke makam para leluhur) hari raya Idulfitri, menghadiri perkawinan anggota keluarga atau kerabat yang lain, waktu ada kematian anggota keluarga atau kerabat, upacara adat seperti bersih desa, dan jika akan mengganti kartu penduduk atau apabila ada pemilihan lurah di desanya atau waktu pemilihan umum.

c. Tenaga kerja menetap

Tenaga kerja menetap di kota ada yang terdiri dari tenaga kerja sektor formal atau yang tergolong lapisan sosial atas atau menengah. Kebanyakan adalah para pegawai negeri yang menetap dengan menyewa rumah, menempati rumah miliknya sendiri, atau diusahakan oleh instansi/lembaga tempat bekerja.

Di kota Semarang pemukiman para pegawai ada yang letaknya berkelompok menurut instansinya masing-masing yang berupa rumah dinas, misalnya kompleks rumah Dinas PJKA, komplek perumahan pegawai salah satu Bank, kompleks perumahan para dosen Universitas Diponegoro (kampung Erlangga, termasuk wilayah Desa Pleburan), komplek perumahan Perhutani, (di Pleburan), kompleks perumahan para dosen dan karyawan IKIP negeri Semarang di Sampangan, dan kompleks perumahan pegawai Perusahaan Air minum Kotamadya Semarang, yaitu di desa Karangkumpul dsb.

Untuk tenaga kerja sektor informal atau yang

tergolong lapisan bawah, termasuk kaum gelandangan, umumnya bermukim di daerah-daerah perkampungan yang resmi ataupun kampung liar. Perkampungan biasanya terletak di dekat pusat-pusat pelayanan seperti pasar, pertokoan, terminal bis, setasiun kereta api, tepi sungai dsb.

Di dalam kota tiap toko, warung atau kantor dagang berusaha menempati lokasi di sekitar daerah konsumen (dekat pada jalan-jalan utama). Berbagai kegiatan di bidang jasa biasanya lebih senang menempati atau memilih lokasi di dekat atau dalam pusat kegiatan, misalnya sepanjang jalan utama, sekitar terminal bis, atau setasiun kereta api.

Toko-toko yang menjual keperluan sehari-hari seperti bahan makanan, sabun, rokok, sikat gigi, kancing baju dan yang lain, biasanya lebih senang memilih tempat yang agak di luar dari pusat kegiatan, mengingat bahwa para pembeli tidak begitu bersemangat untuk berjalan jauh dari rumahnya atau naik kendaraan bermotor menuju pusat kota.

Toko-toko yang menjual barang-barang mewah lebih senang mencari tempat dekat pusat kota. Supermaket di kota Semarang letaknya di dekat lapangan Pancasila yang lebih dikenal dengan sebutan lapangan Simpanglima. Di sekitarnya terdapat Masjid Baiturrahman, Gedung Olah Raga, Pertokoan Plaza, Gedung-gedung instansi pemerintah, gedung bioskop Gajahmada, Sekolah-sekolah, Gedung pertemuan Pancasila dan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Letak Supermaket tersebut dapat dicapai dari berbagai penjuru kota dengan fasilitas memadai.

BAB IV HUBUNGAN KEKERABATAN

1. POLA HUBUNGAN KEKERABATAN DALAM RUMAH TANGGA

Pada masyarakat Jawa, *Somah* merupakan satu-satunya unit terkecil dalam pertalian keluarga. *Somah* sebagai *nuclear family* (keluarga inti) biasanya hanya terdiri atas suami (kepala somah), isteri dan sejumlah anak-anak. Namun adakalanya anggota itu berkembang dengan ikut sertanya sanak saudara (kerabat) atau orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, anggota somah tidak berdiri sendiri, tetapi somah itulah yang bertindak dalam masalah-masalah penting. Setiap kelompok somah tampil dihadapan anggota kelompok somah yang lain sebagai satu unit sosial.

Melihat kenyataan itu, maka somah sebagai unit sosial yang terkecil pada masyarakat Jawa memegang peranan penting dalam aspek kekerabatan. Dalam hal ini kita mengenal adanya 3 bentuk kekerabatan. Yakni hubungan intern antara anggota somah, hubungan vertikal antara somah dengan keluarga besar (*brayat*) dan hubungan horisontal antara somah satu dengan somah lain di luar *brayat*. Bagaimanapun juga secara tradisional, kekerabatan pada masyarakat Jawa memberikan kesejahteraan emosional serta titik keseimbangan dalam orientasi sosial.

a. Hubungan suami dengan isteri

Dengan terbentuknya perkawinan yang berarti terbentuk somah baru, maka mulailah nampak fungsi masing-masing anggota somah. Laki-laki sebagai suami sekaligus juga kepala somah, sementara wanita sebagai isteri adalah orang kedua dalam unit sosial tersebut. Kepala somah tidak harus seorang laki-laki, sebab dalam kasus-kasus tertentu misalnya seorang janda dengan anak-anaknya, maka dialah yang dianggap sebagai kepala somah. Namun demikian adakalanya integritas somah tersebut belum dapat terwujud secara nyata. Hal ini terjadi pada somah-somah baru yang masih mengikuti orang tua/mertua. Sebab meskipun secara formal somah baru itu sudah

terpisah, namun dalam kenyataannya tempat tinggal bahkan juga ekonomis belum terjadi pemisahan.

Pada masyarakat Jawa pemisahan itu tidak berlaku mutlak dan spontan, namun cenderung secara bertahap. Mengingat pertimbangan psikologis, ekonomi, sosial dan kultural, maka somah baru untuk sementara waktu masih bergabung pada orang tua/mertua. Pemisahan baru terjadi jika somah baru itu secara ekonomis maupun emosional dipandang cukup *mapan* dan dewasa. Dengan sendirinya pada bentuk somah yang demikian itu, maka fungsi suami dan isteri belum berperan (mandiri) secara sosial. Sebegitu jauh suami bukan berfungsi sebagai kepala somah, ia tetap anggota somah dari orang tua/mertua. Sehingga hak-hak dan kewajiban sosialnya terbatas.

Pada umumnya, perkawinan di Jawa bersifat monogami. Meskipun bentuk poligami diijinkan, tetapi jarang dilakukan. Seandainya poligami itu terjadi, maka setiap rumah tangga isteri bersikap sebagai rumah tangga monogami. Secara ekonomis dan tempat tinggal isteri-isteri itupun terpisah. Jarang kita jumpai adanya bentuk perkawinan poligami yang menempatkan isteri-isterinya ditempatkan pada satu atap, sebagaimana yang sering terdapat di kalangan bangsawan.

Kasus-kasus poligami terdapat juga pada sejumlah responden. Adakalanya isteri yang bersangkutan sebagai isteri pertama atau isteri muda yang keberapa. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka bersikap sebagai rumah tangga monogami. Masing-masing isteri memiliki otonomi penuh atas rumah tangganya. Dalam hubungan ini, suami sebagai kepala somah itulah yang mengatur keberadaannya pada masing-masing rumah tangga isterinya.

Secara tradisional, dalam hubungan suami-isteri keluarga Jawa umumnya menempatkan suami setingkat lebih tinggi dari isteri. Sebagai kepala somah, suami adalah orang pertama, sedang isteri sebagai orang kedua dalam susunan keluarga somah. Adanya sebutan "*kanca estri*" dan "*kanca wingking*" bagi isteri yang konotasinya menunjukkan kedudukan/peranan

isteri di dapur, akan memperjelas perbedaan tingkat tersebut. Namun demikian hal itu bukanlah masalah prinsip dalam hubungan suami-isteri. Sebab dalam prakteknya isteri tetap memiliki otonomi penuh atas rumah tangganya. Perbedaan tingkat itu hanya untuk menunjukkan fungsi masing-masing, yakni suami sebagai pencari nafkah, sementara isteri sebagai pengelola ekonomi rumah tangga. Meskipun adakalanya pihak isteri justru sebagai tiang keluarga (pencari nafkah). Namun demikian pandangan masyarakat Jawa tetap tidak berubah yakni suami sebagai orang pertama dalam somah. Dalam hubungan ke luar baik vertikal maupun horisontal suami tetap sebagai peran utama. Sebagai kepala somah biasanya suami mendapat berbagai hak istimewa dibanding anggota somah yang lain. Misalnya dalam penyajian hidangan, tempat duduk, kamar tidur dll.

Eratnya hubungan emosional antara suami-isteri terlihat pada panggilan/sebutan bagi masing-masing. Adakalanya panggilan itu terus dipakai sejak pasang an muda hingga kakek-kakek. Namun dapat pula panggilan itu mengalami perubahan. Biasanya perubahan itu dipengaruhi oleh bertambahnya susunan keluarga secara vertikal, yaitu dengan lahirnya anak-anak, cucu, cicit dan seterusnya.

Pada pasangan muda yang belum mempunyai anak, panggilan akrab terhadap isteri adalah Dhik(Adhik) atau *Jeng(Dhiajeng)*, sedang untuk suami dipanggil Kang (Kakang), Mas atau *Kangmas (Kakangmas)*. Dalam hal ini *Jeng (diajeng)*, *Kangmas (Kakangmas)* biasanya berlaku di kalangan bangsawan (priyayi). Seding sebutan yang lain berlaku pada masyarakat biasa.

Dengan lahirnya anak-anak, maka panggilan tersebut cenderung berubah. Sejalan dengan proses sosialisasi anak baik suami maupun isteri menyebut dirinya sebagaimana anaknya memanggil orang tuanya. Maka perubahan yang terjadi adalah panggilan Pak (Bapak), Rama bagi suami. Seding untuk isteri adalah Mak (*Simak*). Mbok (*Simbok*), Yung (*Biyung*) atau ibu, yang semuanya mengacu kepada asal keluarga tersebut Sementara panggilan Papa atau Papi untuk suami dan

Mama atau Mami untuk isteri, pemakaiannya masih amat terbatas. Istilah tersebut hanya dipakai pada keluarga tertentu yang berorientasi ke masyarakat Metropolitan atau hanya sekedar menunjukkan prestise sosial saja.

Kebiasaan yang masih dipakai pada masyarakat urban adalah panggilan dengan menambah akhiran *e* atau *ne* bagi suami atau isteri. Sehingga muncul istilah *Pake* (*Bapake*), *Pakne* (*Bapakne*), *Mboke* (*Mbokne*), *Biyunge*, *Make*, *Ibune* dsb. Bahkan berlaku kemungkinan sebutan itu ditambah dengan nama kecil dari anak (biasanya dipakai nama anak yang pertama atau mba-rep). Misalnya anak pertama bernama Kuncung, maka untuk menyebut suami atau isteri menjadi *Bapake Kuncung*, *Mbokne Kuncung*, *Biyunge Kuncung*, *Ibune Kuncung* dsb. Sebutan demikian ini kemudian juga berlaku pada keluarga besar (*brayat*) atau masyarakat. Sehingga banyak nama kecil suami-isteri tertutup oleh panggilan yang mengacu pada nama anak pertama. Sebagai contoh *Pak Umar*, *Bapake Kabul*, *Biyunge Siman*, *Ibune Wati* dsb.

Perubahan kedua terjadi setelah lahirnya cucu. Seperti proses yang pertama, maka masing-masing suami-isteri menyesuaikan dirinya dengan panggilan cucunya. Istilah yang kemudian muncul adalah sebutan *Mbah* (*Embah* atau *Simbah Kakung* atau *Putri*, *Eyang Kakung* (*Eyang Putri*), *Pak Kaki*, *Mak Nini*, *Pak Tuwo*, *Mak Tuwa* dll. Sementara istilah *Opa* dan *Oma* pemakaiannya amat terbatas seperti halnya pemakaian istilah *Papi*, *Mami*.

Begitu pula setelah lahirnya buyut (*cicit*), perubahan panggilan juga terjadi menyesuaikan adanya si buyut. Istilah yang lajim dipakai adalah *Embah Buyut Kakung/Putri*, *Eyang Buyut Kakung/Putri*, bahkan sering disingkat *Yut* atau beberapa istilah lain yang berlaku di daerah-daerah setempat.

b. Hubungan Ayah dengan Anak-anak

Pada keluarga Jawa yang sudah maju, maka sikap orang tua terhadap anak laki-laki maupun anak perempuannya cenderung sama. Dalam berbagai hal orang tua akan memperlakukan hal yang sama kepada semua anak baik dalam masalah pendidikan, warisan, perka-

winan maupun aspek-aspek yang lain. Namun sikap demikian ini dalam prakteknya tidak dapat berlaku mutlak dan terbatas pada keluarga tertentu. Bagaimanapun juga sesuai dengan kodratnya, maka orang tua akan menempuh satu sikap berbeda terhadap anak laki laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya sikap tersebut dapat diikuti pada uraian berikut ini.

1. Hubungan Ayah dengan Anak Laki-laki.

Dari data yang terkumpul, sekitar 70% responden cenderung menempatkan anak laki-laki setingkat lebih tinggi dibanding anak-anak wanitanya. Dalam hal ini pengaruh adat patrilineal (garis ayah) menjadi faktor dominan. Berlakunya istilah "*Mikul Dhuwur Mendhem Jero*" menunjukkan bagaimana sikap dan harapan orang tua keluarga Jawa terhadap anak-anak laki-lakinya. Disini anak laki-laki diharapkan dapat men junjung tinggi nama dan derajat orang tua.

Adanya misi luhur pada anak laki-laki, tidak mengherankan bila sementara keluarga memberikan hak istimewa kepada anak-anak laki-laki, misalnya dalam hak waris, kesempatan mengenyam pendidikan formal dan berbagai fasilitas milik keluarga yang lain. Namun sebagai konsekwensinya orang tua akan lebih banyak menuntut dan selektif terhadap anak laki-laki. Sebab kegagalannya dianggap menyangkut prestise keluarga. Dalam pola orientasi demikian ini, maka isteri cenderung menyerahkan anak-laki-laki kepada suami (ayah). Karena dianggap ayah itulah yang lebih tahu pendidikan anak laki-laki.

Untuk mewujudkan harapan keluarga tadi, maka ayah lebih banyak berhubungan dengan anak dalam sikap yang lebih formal. Sejak kecil ayah akan berusaha mendidik anak laki-lakinya menjadi seorang militan yang dapat diandalkan dalam mewujudkan harapan keluarga. Maka tidak mengherankan bila di mata anak laki-lakinya, ayah adalah sebagai "Komandan atau Manager" dengan berbagai macam instruksi-instruksinya yang harus dijalani dengan patuh. Sehingga hubungan antara ayah dan anak-anak lebih bersifat rasional dan formal. Sebegitu jauh anak tidak dapat secara terbuka membicarakan sesuatu

yang menyangkut masalah pribadi, misalnya hubungan antara muda-mudi, percintaan dsb.

2. Hubungan Ayah dengan Anak Perempuan.

Dibandingkan sikap ayah terhadap anak laki-laki, terhadap anak perempuan ayah lebih banyak memberi kelonggaran. Satu-satunya tuntutan terhadap anak perempuan adalah yang menyangkut etika, norma susila dan moral. Hampir 100% responden menganggap mempunyai anak wanita ibarat memiliki barang pecah belah, bahkan secara ekstrim disebut pula "*Satru Mungging Cangklakan*" (Musuh yang selalu berada di dekatnya). Sehingga bagaimanapun juga harus tetap dijaga sampai saatnya mereka lepas dari keluarga (memasuki perkawinan).

Masalah etika, kesusilaan dan moral bagi anak wanita adalah merupakan hal yang mutlak, sebab dikaitkan dengan martabat keluarga. Orang tua masih dapat menerima kegagalan anak-anak perempuannya (misalnya dalam pendidikan formal), karier dll. Namun satu hal yang tidak bisa ditolerir ialah jatuhnya moral. Martabat orang tua akan jatuh bila anaknya bertindak tidak senonoh seperti hamil di luar nikah, perceraian, amoral, menjadi anak nakal (pelacur) sehingga menjadi pergunjingan masyarakat.

Pada sisi yang lain berlaku pula istilah "*Swarga Nunut Neraka Katut*" bagi anak wanita. Lebih dari 60% responden mengungkapkan hal yang sama tentang posisi anak perempuannya. Sebab dalam keadaan apapun akhirnya wanita harus mengikuti suami, baik dalam keadaan bahagia ataupun menderita. Tidak adanya keharusan *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* bagi perempuan, maka dalam hal-hal formal ayah lebih bersikap longgar. Sebegitu jauh ayah justeru mempercayakan pendidikan anak-anak perempuan kepada isteri. Sebab mereka perlu dipersiapkan untuk memasuki ketrampilan wanita. Sehingga dalam hal ini ayah cenderung bersikap sebagai pengamat. Hanya pada saat-saat yang dianggap berbahaya ayah turun tangan. Namun dalam keadaan biasa ayah cenderung mempercayakannya pada ibu.

Mengenai jauh dekatnya hubungan antara ayah de-

ngan anak, baik perempuan maupun laki-laki ditentukan oleh beberapa faktor. Selain orientasi masa depan keluarga/persepsi orang tua terhadap anak, sikap ayah, naluri psikologis si anak, maka keberadaan ayah dalam lingkungan keluarga juga merupakan faktor dominan terhadap keakraban mereka.

Dalam beberapa kasus anak merasa hubungan dengan ayahnya agak jauh, karena rendahnya frekwensi keberadaan ayah di rumah. Mekanisme kerja masyarakat kota yang begitu sibuk, jenis pekerjaan, kondisi sosial ekonomi dll, agaknya menjadi faktor penyebab tinggi rendahnya frekwensi keberadaan ayah dalam lingkungan keluarga. Sekitar 80% responden menyatakan bahwa ditengah kesibukan tugasnya, mereka masih sempat mengawasi anak-anak khususnya pada malam hari. Selain itu mereka juga tidak merasakan gangguan terhadap keakrabannya terhadap anak-anak.

Adapun tentang pemanfaatan hari libur sebagai acara keluarga hanya sekitar 8,25% responden menggunakannya sebagai acara rekreasi. Sementara yang lain lebih banyak tinggal di rumah sambil menyelesaikan/membantu pekerjaan rumah tangga.

c. Hubungan Ibu Dengan Anak-anak

Dibandingkan dengan ayah sebagai pencari nafkah, maka keberadaan ibu di samping anak-anak frekwensinya lebih tinggi. Dari jumlah 50% responden ternyata hanya 15% isterinya bekerja baik di sektor formal maupun non formal. Selebihnya adalah sepenuhnya ibu rumah tangga (*house wife*). Dengan sendirinya pada keluarga tersebut keberadaan ibu di samping anak adalah lebih besar, dibanding isteri yang bekerja. Hal mana ternyata mempengaruhi pola hubungan/keakraban terhadap anak-anaknya, meskipun hal ini tidak berlaku mutlak. Sebab frekwensi keberadaan bukanlah skala pengukur untuk menentukan kadar keakraban keluarga. Berikut ini adalah uraian yang lengkap tentang hubungan ibu dengan anak laki-laki dan anak perempuan.

1. Hubungan Ibu Dengan Anak Laki-laki.

Satu perbedaan yang nyata antara ibu dengan ayah

terhadap anak ialah lebih dekatnya hubungan emosional mereka. Dalam berbagai hal wanita (ibu) lebih banyak berbicara dengan perasaan, dibanding laki-laki (suami) yang bersifat lebih rasional. Naluri kewanitaan tersebut terus berlaku sejak ia mengandung, menyusui dan mengasuh anak, bahkan kemungkinan akan terus berlanjut hingga anak dewasa. Dalam beberapa hal menghadapi masalah hubungan antara ayah dengan anak-anaknya, biasanya ibu cenderung bersikap sebagai penengah.

Terhadap pendidikan anak laki-laki ibu lebih banyak memberi kelonggaran. Ia tidak akan memaksakan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Sebaliknya ia justru mendorong prestasi formal yang menyangkut kepentingan profesi, karier dan kepentingan masa depan. Hal mana identik dengan pandangan *Mikul Dhuwur Mendhem Jero*. Akibatnya ada sementara keluarga yang membebaskan anak laki-laki dari pekerjaan rumah tangga. Andaikata dibebani tugas pun biasanya terbatas pada tugas yang sesuai dengan kodrat laki-laki. Bagi ibu tidak akan merasa aib seandainya anak laki-laknya malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam pandangannya yang penting mereka dapat bekerja mencari nafkah, sukses dalam karier.

Oleh sebab itu peranan hubungan ibu terhadap anak laki-laknya lebih bersifat kompensasi, untuk mengimbangi hubungannya dengan ayah yang bersifat formal. Sehingga tidak jarang anak laki-laki lebih dekat dan bersikap terbuka terhadap ibu. Ia lebih akrab dengan ibu dan cenderung lebih cocok untuk diajak berbicara tentang masalah yang bersifat pribadi.

2. Hubungan Ibu dengan Anak Perempuan.

Berbeda dengan anak laki-laki, kepada anak perempuan ibu justru lebih ketat dan menekan. Sedikit banyak beban moral ibu lebih tergantung pada anak perempuannya. Ia akan merasakan aib besar jika anak gadisnya menjadi celan masyarakat karena tidak menguasai pengetahuan rumah tangga. Dalam kasus-kasus seorang gadis tidak dapat memasak, malas

bekerja, tidak dapat mengatur ekonomi keluarga dan sikap yang tidak senonoh, masyarakat cenderung menyalahkan peranan ibu. Ia dianggap tidak mampu mendidik anak perempuannya.

Adanya persepsi demikian itu membuat ibu bersikap keras dalam pendidikan anak perempuan. Sejak kecil anak perempuan dibimbing dan diperkenalkan pada berbagai tugas rumah tangga yang rutin. Secara bertahap anak dibebani tanggung jawab yang makin bertambah sejalan meningkatnya usia. Dengan proses sosialisasi tersebut, ibu berharap dapat mempersiapkan anak-anak perempuannya dengan baik. Sehingga mereka siap untuk memasuki dunia perkawinan.

Pola berpikir tersebut menyebabkan ibu agak mengesampingkan pendidikan formal. Sekitar 50% responden membenarkan pendapat demikian. Ia dapat memaklumi kegagalan anak perempuan di sektor formal, asal berhasil dalam pendidikan rumah tangga sebagai kompensasinya.

Meskipun ibu lebih bersikap keras terhadap anak-anak perempuan, namun secara emosional mereka tetap dekat. Sikap demikian jarang terjadi dalam hubungan antara ayah dengan anak. Sebagai buktinya, sekitar 70% responden menyatakan akan memilih ikut anak perempuannya, seandainya ia dalam keadaan terpaksa harus mengikuti salah seorang anak-anaknya. Sebab baginya akan lebih mudah menghadapi anak perempuannya sendiri yang telah diketahui sifat-sifatnya dibandingkan menantu perempuan yang masih asing.

Akrabnya hubungan antara orang tua baik ayah atau ibu terhadap anak, tercetus dalam panggilan bagi mereka. Sebutan *Nang* atau *Le (Thole)* berlaku bagi anak laki-laki. Sementara sebutan *Nok* atau *Ndhuk (Gendhuk)* berlaku bagi anak perempuan. Biasanya sebutan itu diikuti dengan nama-nama kecil. Unsur penghormatan anak terhadap orang tua biasanya diwujudkan dengan penggunaan bahasa Jawa halus (krama) oleh si anak. Meskipun dalam pergeseran nilai budaya sekarang penggunaan bahasa Jawa krama agak berkurang. Karena kurangnya penguasaan generasi muda sekarang bahkan ada keluarga yang cenderung menggu-

nakan bahasa Nasional dalam keluarga.

d. Hubungan Sesama Anak-Anak

Masalah pokok yang timbul pada masyarakat kota adalah tempat tinggal yang sempit, kurangnya tempat bermain dan lingkungan permukiman yang jelek. Pada lokasi penelitian, hanya sekitar 30% responden tinggal di daerah pemukiman yang ideal, lengkap dengan fasilitasnya. Selebihnya adalah masyarakat lapisan bawah, dengan kondisi pemukiman/lingkungan yang kurang baik. Tingkat sosial ekonomi, situasi lingkungan serta latar belakang pendidikan orang tua ternyata mempengaruhi hubungan antara anak-anak

Pada masyarakat lapisan atas, dengan kondisi tempat tinggal yang lengkap memungkinkan setiap anggota keluarga mendapat tempat tidur (kamar) tersendiri. Pada keluarga demikian ini, maka otonomi setiap anggota keluarga yang bersifat pribadi lebih terjamin, meskipun hanya terbatas pada kamar tidur. Mereka tidak akan begitu saja menyentuh milik anggota yang lain, lebih-lebih yang bersifat pribadi seperti surat-surat, dll. Selebihnya adalah fasilitas keluarga yang bisa dinikmati bersama. Misalnya penggunaan telepon, mobil, televisi, video dsb.

Sedang pada masyarakat lapisan bawah, umumnya rumah tempat tinggal mereka kurang memenuhi syarat. Sempit dan kadang-kadang jumlah anggota keluarganya besar sehingga berdesak-desakan. Dengan demikian tidak memungkinkan setiap anak memiliki fasilitas yang bersifat pribadi. Mungkin sejumlah anggota keluarga tinggal pada satu ruangan. Pemisahan baru dilakukan ketika anak beranjak dewasa, yakni antara anak laki-laki dan akan-anak perempuan.

Akibatnya pola hubungan yang terbentuk pada keluarga tersebut ialah adanya kebersamaan dalam berbagai hal. Bahkan adakalanya batas pemilikan pribadi pun kabur. Terbatasnya fasilitas menyebabkan sesuatu menjadi milik bersama yang harus dipakai bergantian (dinikmati bersama). Pengaruh yang mungkin timbul ialah tumbuhnya solidaritas dan tenggang rasa di antara anak-anak. Mereka saling bantu memban-

tu. Terbatasnya fasilitas memaksa mereka selalu berada dalam kebersamaan agar dapat menikmati fasilitas yang ada, yakni ikatan keluarga yang lemah. Lingkungan permukiman daerah Pleburan dikelilingi oleh daerah-daerah hiburan, seperti THR- Tegalwaring, gedung bioskop, shopping centre dan Simpang Lima. Terbatasnya fasilitas di rumah menyebabkan mereka mencarinya di luar rumah. Akibatnya rumah hanya sebagai sekedar pos sementara. Selebihnya, kegiatan banyak dilakukan di luar rumah.

Dalam masyarakat Jawa keakraban hubungan antara saudara baik laki-laki maupun perempuan sedikit banyak masih terkandung unsur penghormatan kepada pihak yang lebih tua. Sehingga dalam keluarga kita kenal adanya istilah *Mas (Kangmas)* atau *Kang (Kakang)* untuk menyebut kakak laki-laki. Sedang *Yu* atau *Mbak (Mbakyu, Mbak Ayu)* terhadap kakak perempuan. Sedang terhadap adik laki-laki atau perempuan dipakai sebutan *Dhik (Adhik)* atau *Dhi (Adhi)*. Dalam hubungan ini tidak dibenarkan adanya sifat njangkar terhadap saudara tua. Bahkan pada keluarga tertentu masih berlaku seorang saudara muda harus memakai bahasa krama terhadap saudara tua.

Secara tradisi, keluarga Jawa menempatkan anak-anak yang sejenis pada kamar yang sama. Akibatnya pada sejumlah responden yang memiliki sejumlah anak berlainan jenis, masalah keakraban menjadi masalah sendiri. Satu kecenderungan yang nampak mereka lebih akrab dengan sesama jenisnya. Agaknya pola bermain yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi faktor penyebab keakraban hubungan anak.

Pada umumnya jenis permainan anak laki-laki membutuhkan tempat bermain yang luas dan banyak aktifitas fisik. Dengan sendirinya mereka cenderung ke luar rumah, mencari tempat bermain yang luas agar dapat bermain layang-layang, sepak bola, berlari-lari dsb. Sebaliknya jenis perempuan tidak terlalu membutuhkan tenaga fisik yang berlebihan sehingga tidak memerlukan tempat luas. Bahkan dapat dilakukan di lingkungan rumah. Perbedaan pola bermain menye-

babkan mereka memilih saudaranya yang sejenis. Sebab tidak mungkin seorang anak laki-laki mengikuti saudara perempuannya bermain boneka di rumah. Sebaliknya kecil kemungkinannya anak perempuan ikut saudara laki-laknya bermain layang-layang atau bersepak bola.

Namun setelah anak beranjak dewasa, pola hubungan itu pun mengalami pergeseran. Sebab masalah yang dihadapi bukan hanya permainan. Meningkatnya usia menyebabkan problem mereka semakin kompleks. Lebih-lebih adanya hubungan muda-mudi yang membutuhkan pemecahan dengan banyak menggunakan unsur perasaan. Sekurang-kurangnya 50% responden menyatakan bahwa setelah mulai dewasa, ternyata anak-anak cenderung akrab pada saudara dewasa. Ternyata anak-anak cenderung akrab pada saudara lawan jenis. Dalam masalah-masalah pribadi mereka lebih terbuka pada saudara lawan jenis. Sedang pada saudara sesama jenis mereka justru dapat bersaing. Frekwensi persaingan ini lebih tinggi di antara sesama wanita.

Adapun faktor pendorong lebih akrabnya hubungan saudara lain jenis itu adalah rasa saling membutuhkan. Saudara perempuan sedikit banyak perlu perlindungan dan dukungan untuk kelancaran kegiatannya. Dalam berbagai kegiatan ia perlu dikawal, diantar atau dijemput yang hanya dapat dipenuhi oleh saudara laki-laki. Sebaliknya dalam menghadapi problem muda-mudi misalnya, seorang anak laki-laki perlu curahan hati. Dalam masalah yang menyangkut perasaan, ia akan lebih cocok bila berbicara dengan saudara perempuan yang dapat memahami perasaan itu. Sebab pada umumnya saudara laki-laki lebih acuh tak menanggapi, bahkan dinilai "cengeng" dsb.

Pada sejumlah responden juga memperoleh jawaban yang sama tentang hubungan anak-anak setelah menikah. Umumnya menyatakan hubungan anak-anaknya yang lain jenis lebih akrab setelah mereka hubungan antara anak-anak perempuan dengan ipar perempuan.

e. Hubungan Antara Keluarga Inti Dengan Anggota Rumah Tangga Lainnya

1. Hubungan suami dengan anggota rumah tangga lainnya.

Somah sebagai unit sosial yang terkecil dapat berbentuk keluarga inti yakni suami, isteri dan anak-anak. Namun dapat pula bertambah dengan hadirnya sejumlah anggota di luar keluarga inti, baik itu kerabat atau orang lain. Hal itu dimungkinkan karena begitu luasnya ikatan kekerabatan pada keluarga Jawa. Sehingga selain bertanggung jawab terhadap keluarga inti sendiri, seseorang Jawa mempunyai kewajiban moral untuk membantu anggota keluarga (kerabat). Khususnya terhadap mereka yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri seperti : sakit, manganggur, lanjut usia, yatim piatu dsb.

Hadirnya orang-orang lain menjadi anggota keluarga tidak merubah fungsi suami sebagai kepala somah. Bagaimanapun juga suami tetap pada kedudukannya sebagai orang pertama. Sedang orang di luar keluarga inti tetap sebagai anggota somah, sekalipun mereka itu dalam pertalian keluarga secara vertikal mempunyai kedudukan/posisi yang lebih tinggi. Misal nya orang tua, kakek-kakek, uwak, paman, kakak, mertua dsb.

Atas dasar kenyataan itu, maka sekitar 70% responden (suami) menyatakan dapat menerima hadirnya orang lain dalam keluarganya. Tentunya penerimaan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomis. Pada umumnya mereka tidak begitu mempertimbangkan faktor ekonomis belaka, namun lebih menekankan pada faktor sosial dan emosional. Lebih-lebih bila orang lain itu berperanan besar bagi kesejahteraan sosial yang bersifat batiniah.

Pandangan semacam inipun dapat diterima pada keluarga yang bergerak pada usaha produksi. Secara umum mereka melihat manusia sebagai unsur produksi. Namun demikian anggapan ini tidak dapat diperlakukan secara mutlak. Dalam beberapa kasus ia harus mengesampingkannya, sebaliknya unsur emosional lebih utama. Sebab bagaimanapun juga adanya unsur penghormatan yang ditentukan oleh faktor usia, posisi dalam urutan keluarga, seks dsb. masih dominan pada keluarga Jawa.

Dengan demikian sikap suami terhadap orang lain yang masuk dalam lingkungan keluarganya ditentukan oleh posisi orang lain tersebut dalam ikatan keluarga luas. Suami dapat bersikap sebagai pemimpin terhadap pihak yang lebih rendah posisi urutan keluarga. Misalnya terhadap adik kandung, sepupu, ipar, keponakan dll. Namun ia akan bersikap lain terhadap orang yang menempati posisi lebih tinggi dalam urutan ikatan keluarga. Misalnya terhadap orang tua, mertua, kakek dan yang lain secara vertikal.

2. Hubungan isteri dengan anggota rumah tangga yang lain.

Seperti halnya dengan suami, maka isteri dalam keluarga Jawa juga akan bersikap sama. Posisi seorang pendatang dalam somahnya amat menentukan bagaimana isteri harus bersikap. Namun demikian secara umum isteri cenderung melihat mereka itu dalam kaitannya dengan penyelesaian tugas-tugas rumah tangga, lebih-lebih bagi mereka yang posisi urutan keluarga berada di bawahnya. Jelasnya isteri dapat menerima kehadirannya sepanjang mereka bermanfaat bagi tugas-tugas rumah tangga.

Dalam pada itu hadirnya orang lain, meskipun bersamaan jenis, namun tidaklah merubah fungsi isteri sebagai orang kedua dalam somah. Bagaimanapun juga isteri tetap sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, sementara orang lain sebagai pelengkap. Sekalipun orang tersebut secara vertikal kedudukan dalam keluarga lebih tinggi. Misalnya ibu, mertua perempuan, kakak perempuan dari orang tua, bibi, kakek dsb. Dengan sendirinya kehadiran mereka-mereka ini lebih besar dirasakan manfaatnya oleh isteri. Sebab dalam beberapa hal ia dapat membagi tugas-tugas rumah tangga.

Namun demikian aspek emosional dalam hubungan antara isteri dengan orang lain rupanya lebih kuat, seandainya orang lain itu bersamaan jenis. Sebagai contoh ikutnya kakak atau adik perempuan dalam keluarganya sedikit banyak dapat mempengaruhi sikap/hubungannya. Ia dapat menerima dengan baik sepan-

jang kehadiran mereka tidak menggoyahkan posisinya sebagai isteri. Sebaliknya sikapnyapun dapat berubah seandainya posisinya terancam. Hampir 60% responden wanita (isteri) menyatakan keberatan diikuti kakak atau adik perempuan, adik sepupu atau keponakan perempuan pihaknya. Baginya akan merasa aman jika diikuti saudara perempuan dari pihak suami.

3. Hubungan Anak-anak Dengan Anggota Rumah Tangga Lainnya.

Dalam kenyataannya sikap/hubungan anak-anak terhadap anggota rumah tangga lain amat ditentukan oleh sikap orang tuanya, pendidikan keluarga dan jaminan atas kepentingan dirinya. Seandainya ketiga faktor tersebut berkadar positif maka sikap anak-anak terhadap orang lain itupun positif. Namun jika salah faktor bernilai negatif, maka sikapnyapun dapat negatif.

Sekitar 60% responden menyatakan bahwa anak-anak nya menerima dengan baik kehadiran orang lain dalam rumah tangga. Lebih-lebih jika orang lain masih ada hubungan kerabat. Mereka dapat menerima bahkan memberikan sebagian haknya kepada orang lain tersebut, dengan batas-batas tertentu. Bahkan ada sementara anak-anak yang tidak keberatan sama sekali jika orang tuanya bersikap sama terhadap orang lain. Meskipun jumlahnya hanya sekitar 15% dari seluruh jumlah responden. Namun selebihnya merasa keberatan atas hadirnya orang lain dalam keluarga. Alasannya bertitik tolak pada faktor ekonomi, emosional dan lain-lain.

Penolakan mereka pada umumnya adalah adanya kekuatiran terganggunya kepentingan mereka, baik secara ekonomis maupun sosial. Adanya orang lain dalam keluarga sedikit banyak akan mengganggu kebebasan anak di rumahnya sendiri. Dengan demikian mereka cenderung menolak orang lain lebih-lebih bagi mereka yang berada pada garis lebih rendah posisinya dalam urutan keluarga. Adanya sikap menolak ini, seandainya dipaksakan maka akan mempengaruhi sikap ataupun penghormatan terhadap orang lain itu.

Pada garis besarnya masuknya orang lain/kerabat dalam suatu keluarga (sumah) dimungkinkan oleh tra-

disi Jawa. Namun adanya pergeseran nilai, tinggi rendahnya ikatan kekerabatan, pengaruh lingkungan perkotaan, kondisi permukiman, kondisi sosial ekonomi, faktor emosional dan hubungan kerabat menyamping (perkawinan) amat mempengaruhi hal tersebut. Sebab pada umumnya faktor-faktor tersebut sedikit banyak cenderung melemahkan ikatan brayat dengan somah. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan kesibukan, mekanisme kerja di kota, orientasi individualistis dan materialistis pada masyarakat kota, rendahnya frekwensi hubungan personal antara anggota kerabat, maka pola perluasan somah secara horisontal cenderung semakin menipis. Kemungkinan yang besar adalah masuknya orang lain dalam fungsi yang berkaitan dengan produksi/unsur ekonomi.

2. POLA HUBUNGAN KEKERABATAN DI LUAR KELUARGA BATIH

a. Hubungan Keturunan

1. Hubungan vertikal

Seperti pada masyarakat Bali, Dayak, Toraja dan Makasar, maka sistim kekerabatan pada masyarakat Jawa adalah berdasarkan pada susunan bilateral atau parental. Bentuk kekerabatan ber-sisi dua itu menempatkan kerabat baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu pada kedudukan yang sama dengan istilah kekerabatan sama. Secara vertikal, masyarakat Jawa mengenal 10 istilah kekerabatan pada generasi ke atas dan 10 istilah kekerabatan pada generasi ke bawah dari pada ego sebagai berikut :

Ego, anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gropak senthe, debog-bosok, galih asem. Sedang keatas adalah : wong tua (Bapak/ibu), mbah, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, grobak-senthe, debog-bosok dan galih asem.

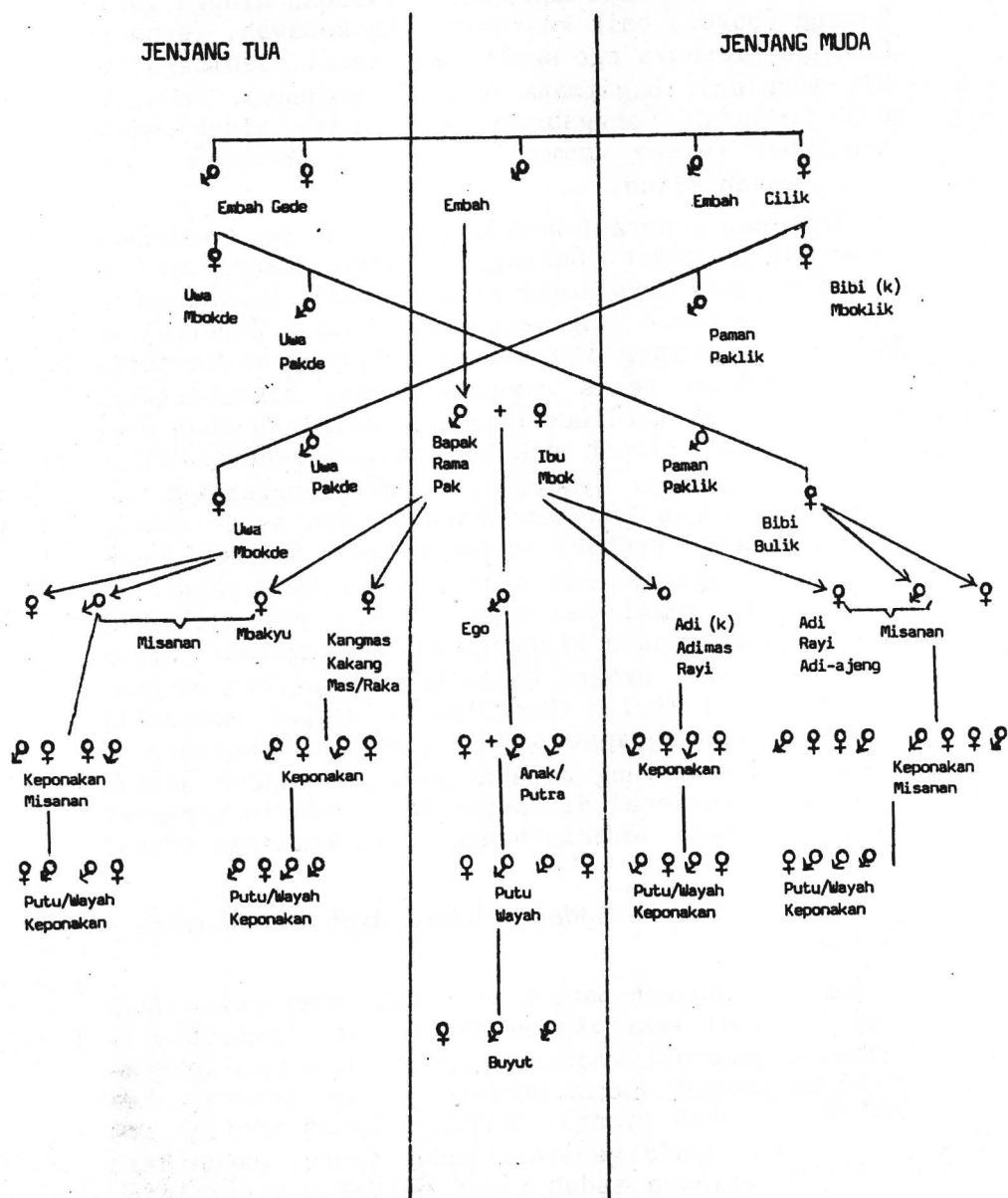
Masyarakat Jawa memberi istilah kekerabatan yang sama pada generasi ketiga (buyut) hingga generasi kesepupuh (galih asem). Istilah tersebut berlaku terhadap generasi keatas maupun kebawah.

Berhubung usia rata-rata bangsa Indonesia jarang yang mencapai lebih dari satu abad, maka pada masyarakat Jawa hanya mengenal keturunan hingga garis ketiga (buyut) baik keatas maupun kebawah. Terhadap Canggah biasanya ego masih amat kecil, sehingga sulit mengingat bagaimana wajah Canggahnya. Sebaliknya terhadap Canggahnya, ego sudah tidak mampu mengingat karena umumnya pada usia tersebut seseorang sudah *pikun*.

Terhadap generasi keatas penghormatan masyarakat Jawa begitu besar. Sehingga dikenal adanya istilah *leluhur* (asal kata *luhur* atau tinggi). Penghormatan terhadap leluhur yang merupakan tradisi kepercayaan asli nenek moyang itu hingga sekarang masih terus hidup. Bahkan terus dipelihara dan dikembangkan. Hal ini jelas terlihat adanya tradisi *Ruwahan* atau *Nyadran* (yang lebih dikenal dengan sebutan *Kirim Leluher*). Tradisi *Nyadran* yang diselenggarakan bulan *Ruwah* (Jawa) adalah acara khusus untuk *ziarah* (bersih kubur, *nyekar*) ke makam nenek moyang. Secara tidak langsung pada saat itu sering dipakai sebagai acara reuni keluarga. Gejala yang sekarang nampak ialah adanya *sistim Trah*, yang melanda sebagian masyarakat urban. Dalam hal ini mereka berusaha mencari silsilah (asal-usul) dengan mengambil seorang tokoh sebagai *pancer* (pembentuk keluarga). Biasanya tokoh yang dipakai sebagai *pancer* adalah tokoh yang terkenal di masyarakat. Semakin terkenal tokoh itu, maka semakin bangga pula keluarga (*Trah*) itu.

a. *Hubungan Ego Terhadap Saudara Ayah dan Saudara Ibu.*

Selain hubungan bentuk vertikal, masyarakat Jawa juga mengenal kekerabatan menyamping (horizontal). Terhadap generasi keatas, istilah hubungan kekerabatan horisontal hanya terdapat hingga generasi kedua (embah atau eyang). Sedang kebawah istilah itu hanya sampai pada generasi kedua (putu, wayah atau cucu). Selebihnya sudah tidak diadakan klasifikasi peristilahan. Untuk jelasnya periksa diagram sbb. :



Mengenai hubungan antara ego terhadap saudara baik dari pihak ayah maupun ibu, masyarakat Jawa tidak memberikan istilah khusus bagi masing-masing. Baik kerabat dari pihak ayah maupun ibu disebut dengan istilah yang sama. Satu-satunya perbedaan terhadap generasi keatas ialah adanya sebutan *Gede* untuk kaum tua (kakak dari orang tua) dan *Cilik* bagi kaum muda (adik dari orang tua). Istilah itu juga berlaku bagi saudara dari kakek/nenek. Namun demikian masyarakat Jawa masih membedakan sebutan bagi jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Terhadap kaum tua (saudara tua atau uwak), ego menyebutnya dengan istilah *Pak Dhe* (Bapak *Gedhe*), *Rama Gedhe*, *Rama Ageng*, *Uwa* atau *Siwa* (*Siwa Lanang*) bagi *Uwak* laki-laki. Sedang istilah *Bu Dhe* (*Ibu Gedhe*). *Mbok Dhe* (*Simbok Gedhe*). *Mak Dhe* (*Simak Gedhe*), *Uwa* dan *Siwa* (*Siwa Wedok*) berlaku bagi *Uwak* perempuan. Semuanya itu berlaku bagi uwak dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Sebaliknya hubungan *Uwak* terhadap ego, disebut hubungan *Purunan* atau *Prunan* (kemenakan). Istilah *prunan* atau *purunan* itu berlaku umum untuk menyebut semua kemenakan (anak dari adik laki-laki/perempuan) baik dari garis suami maupun isteri. Panggilan yang lazim terhadap kemenakan di Jawa adalah sebutan *Nak* (Anak), atau memakai istilah seperti orang tua terhadap ego. Yakni sebutan *Le*, *Gus* atau *Nang* untuk anak laki-laki dan *Nok*, *Ndhuk* serta *Wuk* bagi anak perempuan.

Sebagaimana terhadap *Uwak*, maka hubungan ego, terhadap kaum muda (adik dari orang tua) juga tidak membedakan istilah bagi saudara dari pihak ayah maupun pihak ibu. Perbedaan yang ada hanya untuk membedakan jenis kelamin. Sebutan *Pak Lik* (Bapak *Cilik*), *Bapak Alit*, *Rama Alit*, *Lik* atau *Paman* berlaku terhadap adik laki-laki ayah ataupun ibu. Sedang istilah *Bu Lik* (*Ibu Cilik*) atau *Bibi* berlaku bagi adik perempuan ayah ataupun ibu.

Hubungan antara ego dengan *Paman* ataupun *bibi*, pada masyarakat Jawa disebut sebagai hubungan *Keponakan* (Kepenakan-krama) atau *alo*. Hal ini amat ber-

beda dengan istilah pada bangsa Melayu atau Minangkabau. Mereka tidak membedakan antara istilah Mak-Kemenakan seperti di Jawa. Istilah Kemenakan berlaku bagi anak dari Uwak maupun anak dari Paman/Bibi. Sedang di Jawa istilah itu dibedakan menjadi 2 yakni Prunan atau Purunan anak dari saudara muda (adik), sedang Keponakan adalah sebutan untuk anak dari saudara tua (kakak). Dalam hubungan ini seorang paman/bibi menyebut Keponakannya dengan istilah Nak (Anak) atau menggunakan istilah seperti Nang, Gus, Le, Nok, Ndhuk dan Wuk.

Dalam pada itu, tradisi Jawa tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar keluarga. Dalam hal ini hubungan perkawinan yang dapat terjadi ialah antara ego laki-laki dengan saudara sepupu perempuan atau antara ego perempuan dengan saudara sepupu laki-laki.

b. Hubungan Ego Dengan Saudara Orang Tua Ayah dan Hubungan Ego Dengan Saudara Orang Tua Ibu.

Yang dimaksud disini ialah hubungan antara ego dengan saudara-saudara kakek atau nenek, baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu. Pola hubungan yang berlaku adalah mirip dengan bentuk hubungan antara ego dengan saudara-saudara ayah/ibu. Dalam hal ini ego tidak membedakan istilah bagi saudara-saudara kakek dari garis ibu maupun garis ayah.

Untuk membedakan kedudukan masing-masing terhadap kakek, maka istilah yang lazim dipakai adalah istilah Gedhe (besar) dan *Cilik* (kecil). Sebutan Embah Gedhe (Embah Dhe) atau Eyang Ageng dipakai bagi saudara tua kakek. Sedang istilah Embah Cilik (Mbah Lik), Embah Alit, Eyang Alit berlaku bagi saudara muda kakek.

Sebutan Embah Gedhe (Mbah Dhe, Eyang Ageng, Embah Cilik, Mbah Lik, Eyang Alit) dipakai secara umum, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun demikian istilah itu tidak mutlak dipakai. Sebab ada sementara keluarga yang menyebut Mbah Dhe ataupun Mbah Lik adalah sebagaimana ego menyebut kakek/neneknya sen-

diri. Sehingga istilah yang lazim ialah Embah Kakung, Embah Putri, Eyang Kakung, Eyang Putri, Embah Raka atau Embah Rayi dll.

Terhadap ego perempuan, maka baik Embah Gedhe maupun Embah Cilik (garis keturunan laki-laki) mempunyai kewajiban yang sama seperti kakek, uwak, paman dan saudara sepupu laki-laki. Dalam keadaan mendesak ia dapat menjadi wali dalam perkawinan ego (perempuan).

Adanya garis kekerabatan khusus antara ego dengan Embah Gede dan Embah Cilik, maka hal ini juga mempengaruhi istilah kekerabatan terhadap anak keturunan mereka. Terhadap anak dari Embah Gedhe, ego berkedudukan sebagai kemenakan (prunan). Sehingga ego menyebut mereka sebagai Pak Dhe (Bapak Gedhe), Siwa, Bu Dhe (Ibu Gedhe, Mbokdhe dsb). Sebaiknya terhadap anak dari Embah Cilik ego menempatkan diri sebagai keponakan (alo). Sehingga ego menyebut mereka sebagai Paman, Pak Lik, Bibi, Bu Lik dsb.

*c. Hubungan Ego Dengan Saudara Orang Tua Kakek/
Hubungan Ego Dengan Saudara Orang Tua Nenek.*

Yang dimaksud dengan hubungan ini ialah antara ego dengan saudara-saudara buyut (Embah Buyut, Eyang Buyut) baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu.

Dalam Hubungan ini ego tidak mengadakan istilah klasifikasi kekerabatan. Artinya istilah yang dipakai ego adalah istilah yang dipakai untuk menyebut buyutnya. Baik terhadap saudara tua dari buyut maupun terhadap saudara muda buyut, ego menyebutnya dengan istilah yang sama. Bedanya hanyalah untuk membedakan jenis kelaminnya. Maka istilah yang berlaku adalah Mbah Buyut Kakung, (Embah Buyut Kakung) Eyang Buyut Kakung atau Eyang Buyut Raka bagi saudara laki-laki buyut. Sementara istilah Mbah Buyut Putri (Embah Buyut Putri), Eyang Buyut Putri atau Eyang Buyut Rayi) bagi saudara perempuan buyut

Dalam masyarakat kota, hubungan antara ego dengan saudara-saudara buyut biasanya sudah agak renggang. Hal ini dikarenakan tempat bermukim yang berjauhan dan rendahnya frekwensi pertemuan di an-

tara mereka. Bahkan dalam kekerabatan sering disebutkan hubungan ego dengan mereka dan anak keturunannya sebagai *sedulur adoh* (saudara jauh). Sebab pada kekerabatan Jawa yang dikenal hanya sampai hubungan saudara tingkat I (misanan atau misan atau nak dulur) dan saudara tingkat II (mindonan). Sedangkan hubungan tunggal *canggih* (generasi IV) atau saudara tingkat III kurang begitu dikenal.

d. Hubungan Ego dengan anak-anak Saudara Ego.

Dalam hubungan antara Ego dengan anak-anak saudara ego, maka yang menentukan istilah kekerabatan adalah kedudukan ego terhadap saudara-saudaranya. Jika ego merupakan saudara tua (kakak) maka hubungan dengan anak saudara adalah sebagai mamak dengan kemenakan (Uwak-Prunan). Sebaliknya jika ego adalah saudara muda (adik), maka hubungan yang terjadi adalah antara Paman dengan keponakan (alo).

Dengan demikian istilah yang berlakunya amat berbeda. Dalam hubungan *Uwak dengan Prunan*, maka ego disebut sebagai Pak Dhe (Bapak Gedhe), Uwak, Siwa, Rama Ageng, Bapak Ageng. Bu Dhe (Ibu Gedhe), Mbok Dhe, Mak Dhe dsb. Sebaliknya Ego dapat menyebut Prunannya dengan sebutan Nak (Anak) atau sebutan Nang, Le, Gus, Nok, Ndhuk, Wuk, dsb. yang biasa dipakai orang tua prunan tsb.

Sebaliknya dalam hubungan Paman dengan Keponakan (alo), maka ego disebut sebagai Pak Lik (Bapak Cilik), Bapak Alit, Paman, Bu Lik (Ibu Cilik), Ibu Alit, Bibi dsb. Sedangkan terhadap keponakan (Alo)nya ego dapat menyebutnya sebagaimana Uwak terhadap prunan atau sebagaimana orang tua terhadap anaknya.

Hubungan antara Uwak-prunan dan paman-keponakan biasanya amat akrab. Baik wak maupun paman mempunyai kewajiban moral terhadap anak-anak saudaranya. Bahkan dalam keadaan khusus Uwak/paman laki-laki dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan prunan/keponakan perempuan.

2. Hubungan Horizontal

Hubungan saudara tiri dapat terjadi akibat per-

kawinan poligami, poliandri atau karena putusanya hubungan perkawinan suami-isteri. Yang lazim di Indonesia perkawinan adalah bentuk monogami dan poligami. Sedang bentuk perkawinan poliandri jarang sekali terjadi pada masyarakat maju. Bentuk perkawinan tersebut hanya berlaku dikalangan masyarakat yang masih terbelakang (primitif). Sedang putusanya hubungan perkawinan dapat disebabkan akibat perceraian atau kematian. Dalam kasus-kasus inilah dimungkinkan masuknya orang ketiga (suami/isteri baru) dalam keluarga (batih), sehingga terjadi hubungan bapak/ibu/saudara tiri.

a. Hubungan Ego Dengan Saudara Tiri Seibu.

Hubungan *saudara tiri Seibu* terjadi, jika ibu kandung ego menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai beberapa orang anak. Disini ego berkedudukan sebagai *anak gawan* (anak bawaan) pihak isteri berhadapan dengan ayah tiri, saudara tiri (anak bawaan ayah) dan saudara tiri seibu.

Pada masyarakat Jawa, hubungan ego dengan saudara tiri seibu lazim disebut hubungan *Sedulur Asu* (Saudara Anjing), *Sedulur Tunggal Susu* (Saudara Sesusuan) atau kedua istilah itu digabungkan menjadi *Sedulur Asu Tunggal Susu*.

Mengapa istilah tersebut dipakai? Agaknya orang hanya melihat kebiasaan/perilaku kehidupan binatang anjing. Seekor anjing betina biasanya kawin dengan sejumlah pejantan. Namun ia tidak membedakan terhadap anak-anaknya. Masing-masing anaknya mendapat perlakuan yang sama. Ia akan sama-sama menyusui mereka semua.

Bagi ego, ia tidak menghadapi kesulitan emosional terhadap ibu kandungnya. Meskipun mungkin ada perbedaan perlakuan/sikap ayah terhadap ego dan saudara-saudara tiri, namun secara batin ia selalu merasa mendapat perlindungan dari ibu kandung. Dengan berbagai cara ibu kandung masih dapat memberikan kompensasi/perlindungan kepada ego. Sikap ibu terhadap ego tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi sikapnya terhadap saudara-saudara tiri seibu.

Lebih-lebih bila kita lihat frekwensi keberadaan

orang tua di tengah keluarga, maka keberadaan ayah di rumah amat jarang. Sebab sebagai pencari nafkah ia lebih banyak bekerja di luar rumah. Sehingga ikatan emosionalnya terhadap ibu lebih banyak mendapat kelonggaran. Ia dapat dengan terbuka berbicara terhadap ibu kandungnya. Jadi secara material/ lahiriah ego mungkin dibedakan, namun di lain pihak ego mendapat kompensasi perlindungan batin. Oleh sebab itu secara umum hubungan ego dengan saudara tiri seibu (sedulur asu) adalah lebih akrab.

Dalam masalah hak waris, ego pada hubungan ini mempunyai beberapa hak. Di satu pihak ego mempunyai hak waris atas harta ayah kandungnya. Di lain pihak ia juga mempunyai hak yang sama seperti saudara tiri seibu atas harta bawaan ibunya. Sedang terhadap harta *Gana-gini* ibu dengan ayah tirinya, ia tidak memiliki hak warisan.

b. Hubungan Ego Dengan Saudara Tiri Sebapa.

Hubungan saudara tiri sebapa terbentuk setelah ayah kandung ego kawin dengan wanita lain dan melahirkan beberapa orang anak. Disini ego berkedudukan sebagai *anak gawan* (anak bawaan) pihak suami. Ia akan berhadapan dengan seorang ibu tiri, saudara-saudara tiri (bawaan ibu) dan saudara tiri se-ayah.

Masalah yang timbul dalam hubungan ego dengan saudara tiri seayah, adalah dipengaruhi oleh sikap ibu tiri terhadap ego atau sebaliknya. Dalam masyarakat Jawa ada pemeco tentang sikap ibu tiri yang merebus anak tirinya pada tempayan panjang (Digodhog kualo dawa). Selain itu juga beredar dongeng sekitar kekejaman ibu tiri. Misalnya Brambang Abang Bawang Putih, Melati Kecubung, Klenting Kuning yang biasanya diceritakan nenek/ibu menjelang tidur, memberikan image buruk terhadap ibu tiri.

Meskipun dalam kenyataannya, banyak terjadi kasus bahwa ibu tiri justru lebih baik daripada ibu kandung, namun sikap apriori terhadap ibu tiri sudah mewarnai sebagian besar masyarakat Jawa. (Hal demikian ini dianggap sebenarnya salah tetapi dianggap benar karena berlaku di masyarakat).

Dengan sendirinya, adanya sikap apriori terhadap salah satu pihak maka akan merupakan hambatan emosional atas hubungan antara ego dengan ibu tiri. Lebih-lebih dengan masuknya pengaruh dari pihak-pihak luar terhadap ego. Baik dari lingkungan kerabat maupun orang lain. Sikap apriori yang keras biasanya muncul dari kerabat ibu kandung ego. Sebab bagaimanapun juga mereka menilai bahwa masuknya wanita lain adalah sebagai *maru* (saingan) terhadap anak/saudara perempuannya. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika mereka lalu berusaha menarik ego ke pihaknya untuk memusuhi ibu tiri.

Dalam berbagai kasus pertentangan antara ego dengan ibu tiri, biasanya ditentukan oleh berbagai faktor. Antara lain jenis kelamin ego, sikap ayah/suami, sikap ibu tiri, pendidikan dan lingkungan. Padahal kondisi tersebut amat mempengaruhi hubungan antara ego dengan saudara tiri sebapa. Dalam hal ini jika faktor pengaruh bernilai positif, maka hubunganpun positif. Sebaliknya jika faktor pengaruh negatif, maka hubungan juga negatif.

Pada berbagai kasus pertentangan tajam biasanya timbul jika ego (wanita) berhadapan dengan ibu tiri. Agaknya ego melihatnya hanya dari sisi emosional, ia memandang ayahnya telah mengkhianati perkawinan dengan ibu ego. Sehingga ia lebih peka terhadap hal-hal yang sifatnya emosional. Hal demikian ini jarang dijumpai jika ego (pria). Sebab umumnya ego (laki-laki) memandangnya dari sudut kepentingan rasional. Sikap menolak pada ego (laki-laki) baru timbul apabila terdapat ketimpangan-ketimpangan. Misalnya perbedaan perlakuan, sikap dsb. yang lebih bersifat lahiriah.

Sementara itu sikap ayah/suami, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tinggi/rendahnya frekwensi keberadaan ia di rumah. Rendahnya frekwensi suami berada di rumah, memungkinkan si ibu tiri bersikap membedakan ego terhadap saudara tiri yang lain. Selain itu lemahnya kontrol suami juga membuka peluang terhadap masuknya informasi yang salah dan berat sebelah. Sehingga dalam memutuskan sesuatu, maka ada pihak yang merasa diperlakukan kurang adil.

Akibatnya timbul konflik batin antara berbagai pihak.

Dalam pada itu, meskipun suami/ayah secara lahiriah telah bersikap adil, namun ego masih merasakan kurangnya perlindungan batin. Sikap laki-laki yang bersifat rasional, menyebabkan secara intuitif kurang peka terhadap masalah-masalah yang lebih bersifat emosional. Sehingga dalam segi batin hubungan ego kurang terpenuhi oleh ayahnya. Oleh sebab itu tidak jarang bila ego kemudian memilih ikut kerabat daripada ikut ayah dengan ibu tiri.

Dalam masalah warisan, ego memiliki beberapa hak. Yang pertama ia berhak atas seluruh harta kekayaan bawaan ibu kandungnya. Kedua adalah hak ibu kandunganya dalam harta gana-gini. Sedang warisan dari ayah kandunganya, ego mempunyai hak yang sama seperti saudara-saudara tiri seayah. Biasanya masalah warisan ini merupakan problem tersendiri di kalangan saudara, baik kandung atau lebih-lebih terhadap saudara tiri. Kurangnya kesadaran hukum, kurang lazimnya mem-formal-kan masalah hak suami-isteri atas seluruh harta benda (bawaan, Gana-gini) di kalangan masyarakat Jawa dlsb. menyebabkan ahli waris di kemudian hari menghadapi kesulitan dalam hal pembagian waris.

c. Hubungan Ego dengan Saudara Sepupu Tingkat I.

Yang dimaksud hubungan ini adalah hubungan ego dengan saudara sepupu. Tradisi kekerabatan Jawa menyebutnya sebagai *sedulur Misanan* (saudara misan), *nak-ndulur* atau *nak sanak tunggal embah*, dan sebagai *sedulur cedhak* (saudara dekat). Saudara Misanan ini berlaku baik terhadap anak-anak dari uwak (kakak ayah/ibu) maupun paman/bibi (adik ayah/ibu).

Terhadap mereka itu, ego memanggilnya dengan istilah kekerabatan sebagaimana ia memanggil saudara kandunganya. Sebutan Mas, Kangmas (Kakangmas), Kang (Kakang), Raka berlaku bagi kakak sepupu laki-laki. Sedang istilah Mbak, Mbakyu (Mbokayu), Yu atau Kangmbok dipakai untuk kakak sepupu perempuan. Sebaliknya terhadap adik sepupu laki-laki yang berlaku adalah Dik (Adik). Dhi (Adhi), Dhimas (Adhimas) atau

Rayi. Untuk adik sesepuh wanita adalah Dhik (Adhik), Dhi (Adhi), Jeng, Dhiajeng (Adhi-ajeng) atau Rayi.

Demikian eratnya hubungan ego terhadap sepupunya, maka dalam hal-hal khusus mereka dapat bertindak selaku wakil keluarga. Misalnya perkawinan ego (perempuan), maka kakak sepupu laki-laki atau adik sepupu laki-laki dapat bertindak sebagai wali.

d. Hubungan Ego Dengan Saudara Sepupu Tingkat II.

Hubungan ego dengan saudara sepupu tingkat II lazim dikenal dengan istilah *sedulur mindoan* dan sudah merupakan *sedulur adoh* (saudara jauh). Sebab hubungan ini terjadi karena dari buyut yang sama (*sedulur tunggal buyut*). Bahkan bagi *sedulur adoh* ini sering disebut pula dengan istilah *Munthukutan sambel*. Karena sudah agak jauh maka hubungan *mindoan* ini kurang begitu akrab, kecuali bagi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan atau di pedesaan.

Namun, meskipun saudara jauh masyarakat Jawa masih menggunakan istilah kekerabatan untuk menyebut saudara ego menyebut saudara sepupu berlaku adalah sebagaimana Istilah Mas, kang, Kangmas, Kakang, Raka, Yu, Mbak, Mbakyu, Kakangmbok dll. dipakai untuk menyebut saudara *mindoan* dari kaum tua (saudara tua ayah/ibu). Sebaliknya istilah Dhik (Adhik), Dhi (Adhi), Adhimas, Dhiajeng, Rayi dsb. berlaku bagi saudara *mindoan* dari kaum muda (saudara muda ayah/ibu).

Tradisi Jawa tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antara sesama *mindhoan*.

b. Hubungan Karena Perkawinan

Pada masyarakat Jawa, perkawinan adalah merupakan bagian terpenting dalam proses hidup seseorang. Sehingga amat sulit bagi kebanyakan keluarga untuk menerima keputusan anak untuk tidak menjalani perkawinan selama hidupnya. Lebih-lebih jika hal itu berlaku pada anak perempuan. Bagi orang tua kejadian itu merupakan aib di mata masyarakat sebab masyarakat menganggap anak perempuannya *tidak laku kawin* (*ora payu omah-omah*). Oleh sebab itu banyak

orang tua yang kemudian cenderung mengawinkan anak perempuannya pada usia muda.

Perkawinan antara orang-orang tak bersaudara (orang lain), akan menyebabkan terjadinya ikatan dua kelompok. Sedang perkawinan antar kerabat, berfungsi sebagai usaha mengukuhkan ikatan keanggotaan kelompok yang bersangkutan.

Dalam tata cara perkawinan Jawa yang bersifat perental, hal itu tidak dapat dilihat hanya dari kerangka organisasi kekeluargaan, namun aspek ekonomi dan gengsi ikut menentukan peranan pula. Adanya syarat *bebet-bibit-bobot* (pangkat, asal-usul dan kekayaan) menunjukkan betapa dominan kepentingan keluarga dalam perkawinan anak-anaknya. Maka tidak jarang dalam berbagai kasus, kepentingan anak banyak dikorbankan demi kepentingan keluarga.

Adanya ketergantungan sosial dan psikologis anak kepada orang tua, menyebabkan perkawinan perental keluarga Jawa amat ditentukan oleh orang tua kedua belah pihak. Selain pertimbangan kepentingan aspek ekonomi, prestise sosial, kekerabatan (unsur *bebet-bibit-bobot*) maka dikaitkan pula dengan perhitungan magis tertentu. Sehingga *pretungan* (petungan) kelahiran calon mempelai kedua belah pihak menjadi syarat utama yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga tidak jarang rencana perkawinan dibatalkan karena perhitungan hari kelahiran (*neton*), keduanya dianggap tidak cocok. Sehingga seandainya diteruskan diperkirakan akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, baik terhadap mempelai maupun keluarga. Misalnya, salah satu pihaknya sengsara, tidak menemui kebahagiaan, salah satu pihak (orang tua) meninggal dsb. Maka meskipun, dalam pemilihan jodoh generasi muda mendapat kebebasan, namun dalam penentuannya amat ditentukan oleh orang tua kedua belah pihak.

Dengan adanya berbagai pertimbangan, maka tidak mengherankan jika banyak terjadi perkawinan di lingkungan keluarga. Sekitar 30% responden menyatakan perkawinannya terjadi antar keluarga sendiri.

Selebihnya kawin dengan orang lain, bahkan luar daerah yang sebelumnya tidak saling mengenal.

Masing-masing pihak menyatakan segi-segi keuntungannya. Pola perkawinan dalam keluarga, keuntungannya ialah bahwa dari aspek bebet-bibit-bobot tidak lagi diperhitungkan sebab asal keluarga calon suami/isteri sudah jelas. Selain itu harta keluarga juga tidak jatuh kepada keluarga lain terungkap dalam kata-kata "*Ben ora Keliya*". Manfaat yang lain juga untuk menyambung persaudaraan yang mungkin hampir putus "*Ngumpulke Balung Pisah*". Kerugiannya ialah seandainya terjadinya perceraian, maka kekerabatan dapat putus sama sekali.

Sementara perkawinan di luar keluarga, keuntungannya adalah bertambah ikatan kekeluargaan menyamping. Yang semula tidak ada ikatan keluarga, maka dengan terjadinya perkawinan terjadi ikatan kekerabatan (perbesan) dsb. Seandainya terjadi perceraian, maka ikatan keluarga pun tidak begitu dirugikan.

1. Hubungan Suami Dengan Keluarga Isteri.

Dalam perkawinan Jawa, meskipun dengan terbentuknya somah berarti terjadi pemisahan ekonomis dan tempat tinggal, namun pelaksanaannya tidaklah mutlak. Ada kalanya pasangan suami-isteri baru, untuk sementara waktu mengikuti orang tua salah satu pihak, sampai tiba saatnya secara ekonomis maupun psikologis mereka dianggap mapan untuk berdiri sendiri.

Setelah perkawinan berlangsung, maka ikatan suami dengan keluarga isteri makin diperkuat. Dalam hal ini suami berkedudukan sebagai pendatang pada keluarga isteri. Dalam kedudukan/istilah kekerabatan ia menempatkan diri sebagaimana kedudukan isterinya dalam keluarga. Sehingga terhadap seseorang kerabat, ia menyebutnya dengan istilah kekerabatan yang berlaku bagi isterinya.

Secara tradisi, di Jawa dikenal adat warisan *se-pikul segendhong* (sepikul sakgendhongan) yakni sepi-

kul (dua bagian) untuk laki-laki dan segendhongan (sebagian) untuk wanita. Berdasarkan tradisi ini maka setiap anak laki-laki akan mendapat warisan rumah, pekarangan dan sawah dari orang tuanya. Sementara anak wanita lajimnya mendapat warisan perhiasan (anggon-anggon atau emas-berlian dsb.), dan peralatan rumah tangga. Tentu saja tradisi ini hanya terbatas bagi keluarga yang mampu.

Namun demikian tradisi demikian tidaklah berlaku mutlak, lebih-lebih bagi masyarakat kota, yang menghadapi kesulitan masalah perumahan. Sedang di pedesaan pun tradisi tersebut juga mulai berkurang. Pada umumnya mempersiapkan rumah dsb. bagi mempelai baru adalah sesuatu yang riskan, mengingat bahwa pasangan baru biasanya secara ekonomis maupun emosional masih labil. Pembangunan rumah yang menelan biaya tinggi adalah perbuatan yang sia-sia, bila sewaktu-waktu terjadi perceraian di antara mereka. Oleh sebab itu lajimnya untuk sementara mereka terpaksa menumpang di rumah orang tua, sambil menunggu saat hingga dipandang mapan. Biasanya setelah perkawinan berlangsung satu-dua tahun atau telah membuahkan anak. Pada saat demikian inilah biasanya keluarga pihak laki-laki memisahkan anaknya dengan jalan membuatkan rumah tersendiri di pekarangan (dalam lingkungan rumah orang tua) atau di tempat lain di desa.

Dengan adanya tradisi demikian ini maka ikatan suami dengan keluarga isteri, biasanya terbatas. Sebab amat tabu bagi suami untuk ikut pada keluarga isteri, khususnya di daerah pedesaan. Isterilah yang mengikuti ke rumah pihak suami. Dengan sendirinya kunjungan suami ke pihak isteri hanya terbatas pada kunjungan-kunjungan kekeluargaan biasa.

Sebagai pendatang pada keluarga isteri, maka dalam keluarga besar isteri, suami menyesuaikan diri/berkedudukan seperti isterinya dalam urutan kekerabatan keluarga besar. Terhadap seorang anggota kerabat, ia menggunakan istilah kekerabatan seperti halnya isterinya terhadap kerabat yang bersangkutan. Namun istilah yang wajar itu hanya berlaku da-

lam perkawinan exogami. Sebagai orang luar suami tidak menghadapi kesulitan dalam mengetrapkan istilah kekerabatan hanya dengan melihat faktor usia, penghormatan, status/kedudukannya dalam urutan kekerabatan keluarga besar.

Sebaliknya dalam perkawinan endogami, maka menggunakan istilah kekerabatan dapat menjadi kacau. Lebih-lebih jika kedudukan isteri termasuk dalam kaum tua dibanding kedudukan suami, (*keprenah tuwa atau awune luwih tuwa*). Untuk sementara waktu akan timbul berbagai kejanggalan dalam penggunaan istilah kekerabatan. Kejanggalan ini mungkin berlaku antara suami-isteri itu sendiri, hubungan menantu dengan mertua, besan-besan; antara sesama ipar bahkan menu-runnya terhadap anak-anak dari hasil perkawinan itu. Namun demikian untuk mengatasinya biasanya anak-anak selalu mengikuti garis keturunan ayah.

Dengan masuknya suami pada keluarga isteri, maka suami mempunyai berbagai hak dan kewajiban sosial terhadap kerabat isteri, meskipun dalam pembentukan *trah* ia tidak termasuk dalam garis keturunan yang menentukan. Dalam berbagai hal suami harus memberikan kedudukan yang sama antara kerabatan dirinya sendiri dengan kerabat isteri. Berbeda dengan masyarakat Batak yang mengenal marga, hingga kerabat suami lebih dominan kedudukan/pengaruhnya terhadap somah. Hal itu tidak berlaku pada masyarakat Jawa. Patrilineal disini hanya berlaku pada somah. Somah bersifat mandiri. Sementara kerabat hanya berada di latar belakang. Mereka memberi dukungan, sumbangan, bantuan, kesaksian dll., masing-masing sesuai fungsinya dalam keluarga besar.

2. Hubungan isteri dengan keluarga suami.

Pada masyarakat Jawa yang patrilineal, maka isteri mengikuti suami. Maka dalam istilah kekerabatan ia mengikuti kedudukan suami baik dalam perkawinan endogami maupun exogami. Tanpa memandang faktor usia, status/kedudukan dalam urutan keluarga maka secara otomatis ia disebut dengan istilah kekerabatan sesuai posisi suami. Dengan sendirinya

unsur penghormatan disini memegang peranan penting.

Meskipun kerabat pihak suami tidak berpengaruh dominan terhadap somahnya, namun isteri mempunyai kewajiban-kewajiban sosial terhadap keluarga suami. Ia mempunyai otonomi penuh terhadap keluarga (soma). Sebaliknya ia mempunyai kewajiban moral terhadap keluarga pihak suami, khususnya pada situasi khusus/mendesak. Misalnya memberikan perlindungan/penampungan pada kerabat yang sekira tidak mampu, bantuan moral/finansial adanya keperluan keluarga seperti perkawinan, perhalatan. Dalam hal demikian sedapat mungkin isteri harus dapat bersikap adil tanpa membedakan perlakuan terhadap kerabat pihaknya atau kerabat suami.

Pada masyarakat patrilineal di Jawa, maka dengan terbentuknya perkawinan secara otomatis isteri menanggalkan nama keluarganya. Untuk selanjutnya ia melekatkan nama keluarga suami. Dalam pembentukan *trah* iapun juga melepaskan haknya pada kerabatnya ia masuk dalam *trah* suami.

Namun dalam kenyataannya, banyak terjadi kasus perbedaan sikap/perlakuan pada salah satu pihak. Sikap berat sebelah itu dapat terjadi karena kesenjangan status sosial keluarga suami/isteri, adanya hambatan psikologis, kemampuan finansial yang berbeda.

3. Hubungan Keluarga isteri dengan Keluarga suami.

Dengan terbentuknya perkawinan, maka hubungan kekerabatan diperluas secara menyamping. Pada masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya penggabungan berdasarkan kebutuhan biologis antara seorang perjaka dengan gadis semata. Namun mempunyai fungsi sosial yang mencakup berbagai aspek kepentingan yang lain. Lebih-lebih bila perkawinan itu *exogami*, maka hubungan kekerabatan mencakup ikatan kerabat keluarga kedua belah pihak. Dalam hal ini hubungan yang ada adalah hubungan *perbesanan*.

Dalam hubungan *perbesanan*, maka pihak suami selanjutnya dianggap sebagai kaum tua, sedang pihak

isteri dianggap sebagai kaum muda. Sehingga peristilahan kekerabatan yang berlaku adalah antara saudara tua dengan saudara muda, yakni kakak-beradik. Hal itu tidak hanya berlaku bagi kedua orang tua yang berbesanan (orang tua laki-laki/orang tua perempuan), namun juga terhadap saudara-saudara pihak laki-laki maupun perempuan.

Untuk selanjutnya orang tua pihak suami akan menyebut *besan*-nya dengan istilah-istilah kaum muda. Misalnya *Dhik* (*Adhik*), *Dhi*, *Adhimas*, *Dhiajeng*, *Jeng* dsb. Sebaliknya orang tua pihak perempuan akan menyebutnya dengan istilah kaum tua seperti *Kakang*, *Kakangmas*, *Mbakyu* (*Mbokayu*) dsb. Namun di kalangan masyarakat kota suatu hal yang lajim adalah panggilan umum seperti *Bapak/Ibu*.

Demikian pula hubungan kekerabatan antara saudara pihak suami dan pihak isteri, yang berlaku adalah hubungan akak beradik. Kerabat pihak suami dianggap sebagai saudara tua (*kakak*), sementara kerabat pihak isteri dianggap sebagai saudara muda (*adik*). Sehingga istilah *Kakang*, *Kangmas*, *Mbakyu* (*Mbokayu*), *Mbak*, *Yu* dsb lajim dipakai untuk menyebut saudara-saudara suami. Sedang istilah kekerabatan *Dhik*, *Adhimas*, *Jeng*, *Dhiajeng*, *Rayi* dsb dipakai untuk menyebut saudara-saudara isteri.

Selain tempat tinggal yang umumnya lebih dekat dengan kerabat isteri, maka sikap suami lebih menentukan tinggi rendahnya frekwensi hubungan kekerabatan mereka. Biasanya suami kurang begitu memperhatikan masalah kekerabatan berhubung dengan kesibukan kerjanya. Sehingga dalam hal tersebut ia lebih mempercayakan pada peranan isteri. Maka dari itu tidak mustahil jika isteri lebih mendekatkan keluarga (anak-anak) terhadap keluarganya dibandingkan terhadap keluarga suami.

Namun demikian hubungan perbesanan ini pada beberapa hal yang khusus biasanya lebih akrab. Meskipun keakraban ini ditentukan pula tingkat keharmonisan rumah tangga anak-anaknya. Apabila rumah tangga suami-isteri harmonis, maka ikatan kekerabatan antara *besan* juga berlangsung baik. Namun jika hubungan suami-isteri terjadi keretakan/kurang

harmonis, maka hubungan antar besan pun juga terpengaruh.

Kedudukan suami-isteri, sedikit banyak juga ikut mempengaruhi hubungan antara besan. Suatu *somah* yang telah terpisah/mandiri baik secara ekonomis/tempat tinggal secara psikologis lebih menguntungkan hubungan kekerabatan antar besan. Kemandirian somah membuat masing-masing pihak merasa lebih bebas untuk berkunjung kepada suami-isteri yang bersangkutan. Dalam hal ini baik keluarga pihak suami maupun isteri tidak merasakan adanya hambatan psikologis, sebagaimana seandainya suami-isteri yang bersangkutan masih mengikuti mertua salah satu pihak. Sebab dengan adanya besan/keluarganya membuat salah satu pihak segan untuk bersikap di dalam rumah tangga anaknya.

Pada masyarakat kota, dimana ikatan kekerabatan sedarah umumnya agak renggang karena faktor kerja, perbedaan tempat tinggal, status sosial yang berbeda dan hambatan-hambatan psikologis yang lain, maka ikatan kekerabatan menyamping merupakan satu posisi untuk mengeratkan kekerabatan. Meskipun hubungan perbesanan hanya terbentuk setelah perkawinan anaknya, namun karena berbagai faktor justeru hubungannya akan lebih dekat dibanding keluarga sedarah. Lebih-lebih dengan adanya cucu-cucu maka ikatan besan dapat lebih erat. Begitu pula ikatan dengan saudara-saudara pihak suami dan isteri yang lain. Suatu kebiasaan yang lajim dikalangan masyarakat Jawa adanya Pemeo "*Mangan ora mangan yen kumpul*", disini mengandung pengertian yang luas yakni adanya unsur kerukunan dan eratnya hubungan kekerabatan. Sehingga pada masyarakat Jawa jika tidak mungkin berhubungan dengan keluarga sedarah, maka kekerabatan perbesanan menjadi prioritas kedua untuk mengikat persaudaraan. Pada prioritas ketiga adalah ikatan daerah seasal, dan senasib.

3. POLA HUBUNGAN KEKERABATAN DALAM KELUARGA LUAS

a. Hubungan suami dengan mertua

Hubungan suami dengan orang tua isteri adalah

hubungan antara menantu dengan mertua. Baik dalam perkawinan bentuk endogami maupun exogami, maka suami adalah sebagai kepala keluarga dari *somahnya* dan mempunyai hak otonomi penuh. Meskipun ia ikut/menumpang pada *mertua*, namun suami tetap mempunyai otonomi atas *somahnya*. Hanya saja otonomi disini pada lingkup yang terbatas. Otonomi sepenuhnya hanya akan diperoleh suami apabila *somahnya* telah melepaskan diri baik secara ekonomi maupun tempat tinggal. Bila pada masyarakat pedesaan, adalah satu hal yang tabu seorang suami ikut mertua (isteri), pada masyarakat kota pandangan demikian cenderung bergeser. Sebab tidak jarang di daerah kota suami kemudian ikut mertua karena berbagai faktor. Misalnya : alasan psikologis karena isteri anak tunggal dalam keluarga, ikatan cucu terhadap kakek/nenek, kesulitan perumahan dsb.

Masalah yang timbul dalam hubungan ini adalah berkisar pada aspek psikologis suami terhadap *somahnya*. Dalam beberapa hal suami tidaklah dapat bersikap bebas. Sedikit banyak otoritas dan integritasnya sebagai suami tidak dapat berjalan wajar. Di satu pihak ia cenderung mengatur *somah*-nya sesuai pola tersendiri, namun di lain pihak ia masih harus menjaga hubungannya/kedudukannya dengan adanya mertua. Karena tidak mustahil adanya mertua yang akan selalu ikut mengatur kehidupan anak-anaknya, karena dianggap belum cukup dewasa/mapan. Campur tangan yang lebih besar lagi akan nampak dalam hal pendidikan anak-anak. Kecenderungan yang umum seorang kakek/nenek untuk memanjakan cucu merupakan faktor yang amat rawan dalam hubungan antara menantu dan mertua. Hal-hal semacam ini akan berkurang kadarnya seandainya *somah* yang baru sudah mandiri dan terpisah tempat tinggal dengan mertua.

Satu gejala lain, pada *somah* yang masih menjadi satu dengan orang tua, maka ia pun belum menanggung beban sosial sepenuhnya. Bahkan masyarakat lingkungannyapun kadangkala belum memasukkan mereka dalam perhitungan *somah yang mandiri*. Dengan sendirinya beban dan hak sosial mereka masih terbatas.

Suami sering-sering belum dianggap sebagai Kepala Somah. Yang dianggap sebagai kepala *somah* adalah sang mertua. Dalam berbagai kewajiban sosial, seandainya ia tampil, ia hanya dianggap sebagai wakil dari mertuanya. Sebaliknya pada somah yang berdiri sendiri, maka dalam hubungan kemasyarakatan ia memiliki suatu integritas dan otonomi tersendiri. Sehingga beban/hak/kewajiban sosialnya adalah sama dengan *somah-somah* mandiri yang lain.

Dalam tradisi Jawa, maka hubungan kekerabatan antara suami (menantu) dengan mertua adalah sebagai anak dengan orang tua. Istilah kekerabatan yang berlaku adalah sebagai Bapak/Ibu dengan anak. Biasanya mertua menggunakan bahasa *Jawa Ngoko* terhadap menantu. Sebaliknya menantu menggunakan bahasa *Jawa Krama* (Madya maupun Inggil), tergantung lingkungan.

Istilah kekerabatan yang lajim dipakai ialah sebutan Bapak, Ibu, *Rama*/ Ibu, Bapak/*Simbok*, Bapak/*Simak* (*Mak*) untuk menyebut mertua. Namun dengan lahirnya anak-anak maka sering menantu beralih sebutan sebagaimana cucu terhadap kakek/nenek, misalnya dengan istilah *Mbah Kakung*/Putri, *Eyang Kakung*/putri dsb. Tujuannya untuk membiasakannya dengan adanya cucu. Sebaliknya panggilan *Nak*, *Le*, *Gus*, *Nang* adalah istilah yang lajim dipakai mertua untuk memanggil menantu. Namun ada sementara daerah yang menyebut menantunya dengan sebutan *Ten* (asal kata dari Anak-mantu atau *Anak-manten*). Selanjutnya dengan lahirnya cucu, maka panggilan mertua terhadap menantu (laki-laki) pun sering berubah. Perubahan yang lajim ialah mengikut sertakan nama cucunya yang pertama. Mungkin hal ini adalah untuk membedakan dengan menantu-menantunya yang lain. Misalkan cucu pertama Saleh, maka terhadap ayahnya (menantu) mertuanya menyebutnya sebagai *Bapake Saleh*, *Pakne Saleh* dsb.

b. Hubungan isteri dengan mertua

Satu-satunya kesulitan dalam hubungan menantu wanita (isteri) dengan mertua, biasanya terletak pada aspek psikologis menantu perempuan dengan mertua perempuan. Hal semacam ini jarang dijumpai pada

hubungan menantu laki-laki dengan mertua perempuan.

Pada umumnya penilaian mertua terhadap menantu laki-laki, lebih bersifat lahiriah, yang biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat formalitas, materialistis dan aspek kebanggaan lahir. Misalnya kebanggaan terhadap karier formal, kekayaan, kemasyhuran, gelar, penghormatan masyarakat dsb. Adanya konsep *mikul dhuwur mendhem jero*, yang dalam hal ini belum tentu dapat dipenuhi oleh anak kandung, namun dapat pula dikaitkan dengan anak menantu.

Hal tersebut amat berbeda dengan penilaian terhadap menantu wanita. Secara kodrati, anak wanita hanya berkedudukan sebagai pengikut/pendamping suami (konsep *swarga nunut neraka katut*). Sehingga bagaimanapun juga pembawa nama harum keluarga, kejayaan, kekayaan baik lahir batin adalah laki-laki atau suami. Dalam hal ini isteri (menantu) hanya sebagai pelengkap. Dengan sendirinya mertua memiliki tuntutan tersendiri yang biasanya lebih bersifat nilai-nilai batiniah. Misalnya adanya kesetiaan, kepatuhan, sikap, terhadap suami/kerabatnya dan moralnya.

Dengan sendirinya dalam hal ini ada dua kutub yang saling bertolak belakang. Yakni di satu pihak menantu wanita dan di lain pihak mertua (wanita), masing-masing dengan konsep yang berbeda, bahkan sering bertolak belakang.

Pada hakekatnya, masing-masing pihak merasa mempunyai hak yang sama terhadap suami/anak laki-lakinya. Mertua perempuan sebagai ibu kandung merasa merawat/mengasuh anak laki-lakinya sejak kecil hingga dewasa, sehingga ia masih merasa mempunyai kewajiban untuk mengatur si anak. Sebaliknya, menantu perempuan merasa mempunyai hak sepenuhnya atas suami, sehingga mertua tidak perlu campur tangan. Adanya kesamaan emosional/perbedaan persepsi antara keduanya tidak jarang timbul konflik batin yang mewarnai kedua belah pihak.

Ibu mertua masih ingin mengatur/menuntut hak dari anak laki-laki yang diasuh/dirawat sejak kecil.

Sebaliknya menantu perempuan merasa haknya dilangkahi/dicampuri oleh mertua. Dengan sendirinya semakin tajam perbedaan itu akan mempertajam pula pertentangan/konflik di antara mereka. Sebenarnya hal tersebut dapat dinetralisir, bilamana masing-masing pihak mau bertenggang rasa dan membatasi diri pada hak dan kewajibannya. Atau apabila paling tidak ada saling pengertian di antara keduanya. Masing-masing pihak harus mengurangi rasa egoisme diri dengan menghormati hak/kepentingan orang lain. Di satu pihak menantu mengerti hubungan emosional antara mertua dengan anak laki-lakinya. Sebaliknya mertua menghargai otonomi menantu atas rumah tangganya (*somah*).

c. Hubungan suami dengan saudara orang tua isteri

Yang dimaksud dalam hubungan ini adalah hubungan antara suami dengan uwak, paman, bibi dari pihak isteri. Seperti halnya hubungan menantu laki-laki pada mertua, maka hubungan menantu keponakan dengan uwak/paman dan bibinya juga tidak banyak timbul problem. Sebab dalam hubungan tersebut baik uwak/paman/bibi lebih banyak berhubungan dengan perunan/keponakan wanita (isteri). Sementara itu si suami lebih banyak berada di luar rumah. Selain itu jarang sekali saudara orang tua isteri ikut/menumpang pada menantu keponakan. Biasanya hubungan mereka amat terbatas pada saat-saat khusus yang frekwensi perjumpaannya amat jarang.

Seandainya terjadi kontak maka hubungan mereka tidak secara langsung. Dalam menghadapi kesulitan yang memerlukan bantuan suami maupun saudara dari isteri akan menggunakan isteri sebagai *mediator*. Sehingga kemungkinan terjadinya konflik lebih dapat dihindarkan.

Dalam istilah kekerabatan, maka suami menempatkan dirinya sebagaimana isteri terhadap saudara orang tua. Istilah Pak Dhe (Bapak Gedhe), Bu Dhe (Ibu Gedhe), Siwa Lanang, Siwa Wedok, Rama Ageng, Rama Gedhe, Ibu Ageng dsb. berlaku untuk menyebut saudara tua dari mertua baik laki-laki maupun perempuan.

Sedang suami akan menggunakan istilah Paman, Pak Cilik (Pak Lik), Mbok Lik (Mbok Cilik), Bibi dsb. untuk menyebut saudara muda mertua.

d. Hubungan isteri dengan saudara orang tua suami

Yang dimaksud istilah hubungan antara isteri dengan saudara dari ayah/ibu mertua, baik dari muda ataupun tua. Istilah kekerabatan yang berlaku adalah sebagaimana suami menyebut saudara tua ataupun saudara muda dari orang tua isteri.

Sebutan Uwak, Pak Dhe, Bu Dhe, Siwa Lanang, Siwa Wedok (Siwa Wadon), Rama Ageng, Ibu Ageng, Mbok Dhe dsb. berlaku bagi saudara tua dari mertua laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya terhadap saudara muda mertua berlaku istilah kekerabatan Lik (Pak Cilik), Bu Lik (Ibu Cilik), Mbok Lik, Paman, Bibi dsb.

Dalam hubungannya dengan isteri saudara orang tua suami biasanya kurang dapat bersikap bebas. Sebab lajimnya masalah rumah tangga/keuangan berada ditangan isteri sebagai pengelolanya. Akibatnya kebebasan mereka terhadap keluarga yang bersangkutan dibatasi oleh perasaan segan. Dalam berbagai hal mereka membatasi diri, mengingat keponakan/prunan yang berhubungan darah langsung adalah suami. Sehingga adanya masalah/kesulitan yang memerlukan bantuan sedikit-tidaknya pasti diketahui orang lain (dalam perkawinan exogami). Hal ini akan berbeda jika isterilah yang berhubungan darah secara langsung. Sebab bagaimanapun juga di kalangan masyarakat Jawa ada kecenderungan untuk bersikap *perwira*. Dalam konotasi *berbasa-basi*.

Nilai-nilai *kejawan* akan menganggap tabu apabila orang mengutarakan kesulitannya secara langsung. Meskipun seorang tamu belum makan (perutnya lapar), namun ia akan mengatakan sudah kenyang. Demikian pula dalam hubungannya terhadap keponakan/kemenakan yang bukan hubungan sedarah. Sebegitu jauh ia akan berusaha menutupi kesulitan/kesusahan yang sebenarnya amat membutuhkan pertolongan. Mengapa demikian karena dalam berbagai hal kedua belah pihak tidak

ingin apabila kekurangan dirinya diketahui oleh kerabat perbesanan. Sebab dalam hal ini mereka tidak ingin apabila martabatnya turun dimata kerabat perbesan (besan).

e. Hubungan suami dengan saudara-saudara isteri

Hubungan yang berlangsung disini adalah hubungan antara suami dengan saudara ipar (ipe). Terhadap kaum tua berlaku sebutan sebagai kakak ipar, sedang terhadap kaum muda yang berlaku adalah adik ipar, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah kekerabatan yang berlaku adalah sebutan yang dipakai isteri terhadap saudara-saudaranya. Sehingga sebutan Kang, Kakangmas, Mas, Yu, Mbakyu (Mbokayu), Kakangmbok, Raka dsb. berlaku terhadap saudara tua pihak isteri. Namun dengan lahirnya anak-anak hasil perkawinan, maka terhadap kakak ipar suami sering menggunakan istilah yang dipakai anak-anak untuk menyebut uwaknya, seperti Pak Dhe, Bu Dhe, Siwa, Rama Ageng dsb. Sedang terhadap adik ipar, istilah kekerabatan juga seperti yang dipakai isteri terhadap saudara mudanya seperti Dhik, Dhi, Adhimas, Jeng, Adhiajeng dll. Selanjutnya dengan lahirnya anak-anak, sebutanpun bisa beralih menirukan kebiasaan keponakan terhadap paman/bibinya, seperti : Pak Lik, Bu Lik, Bibi dsb. Dengan maksud membiasakan anak-anaknya terhadap Uwak atau Paman/Bibinya.

Dalam keluarga Jawa tidak tertutup kemungkinan seorang adik ipar mengikuti kakak. Mengingat berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam hubungan suami dengan ipar, maka banyak keluarga yang menempuh kebijaksanaan hanya mengikutkan (*ngenger*) kakak atau adik laki-laki kepada kakak perempuan (isteri) Hal ini adalah untuk menjaga berbagai kemungkinan. Sebab tidak jarang terjadi hubungan seorang antara seorang suami dengan ipar perempuan. Dalam adat Jawa dibenarkan terjadinya kemungkinan perkawinan ganti tika, yakni antara seorang suami dengan saudara iparnya ketika isterinya meninggal. Tradisi demikian ini umumnya lebih disukai keluarga wanita. Sebab bagaimanapun juga anak-anak yang ditinggalkan masih dipelihara oleh uwak/bibi yang sedarah, se-

hingga nasibnya akan lebih baik jika ia dipelihara oleh ibu tiri.

f. Hubungan isteri dengan saudara-saudara suami

Seperti hubungan suami dengan saudara-saudara isteri, maka hubungan yang berlaku disini juga hubungan ipar (sedulur ipe). Dengan sendirinya istilah-istilah yang berlakupun juga tetap sama dengan hubungan antara suami dengan saudara isteri. Terhadap saudara tua suami, isteri menyebutnya dengan istilah kekerabatan kaum tua, sedang terhadap saudara muda suami, isteri menyebutnya dengan istilah kekerabatan kaum muda. Istilah-istilah kekerabatan yang menyebut hubungan suami/isteri dengan keluarga/saudara suami maupun isteri itu seluruhnya juga berlaku baik terhadap saudara *misanan* ataupun saudara *mindonan*. Yang membedakan peristilahan hanyalah kaumnya, status dalam urutan keluarga dan penghormatan.

Dalam hubungan isteri dengan saudara-saudara suami, maka adanya tradisi *ngenger* juga dibatasi dalam masalah jenis kelamin. Demi keutuhan keluarga, maka tradisi *ngenger* (menumpang) pada ipar perempuan oleh adik/kakak laki-laki suami akan disinghiri. Kebiasaan yang lajim dalam *ngenger* ialah ikutnya adik laki-laki dari pihak isteri. Meskipun dalam kenyataannya perkawinan ganti tikar antara seorang *janda* dengan kakak/adik ipar laki-laki juga dibenarkan menurut tradisi Jawa.

Kecenderungan yang umum bagi saudara isteri adalah lebih bebas ikut pada kakak perempuan (isteri). Sebab bagaimanapun juga keberadaan isteri di rumah, sesenang isteri sebagai pengelola rumah tangga, memungkinkan saudara isteri memperoleh kebebasan. Sementara saudara suami masih dibatasi adanya kesenangan terhadap ipar perempuan. Sedang di lain pihak suami pada umumnya kurang memperhatikan hal-hal yang dianggap remeh dan dapat diselesaikan/telah diserahkan kepada pihak isteri.



BAB V

BEBERAPA ANALISA

1. PERGESERAN KEDUDUKAN DAN PERANAN SUAMI DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

a. Pergeseran kedudukan suami

Untuk menentukan prosentase pergeseran kedudukan suami di daerah penelitian memang agak sulit, karena keadaan responden yang bermacam-macam baik dalam bidang lapangan kerja maupun dalam bidang sosial. Untuk menguraikan secara terperinci mengenai pergeseran kedudukan suami para responden memang tidak dapat disajikan dalam laporan ini, mengingat bahwa terdapat bermacam-macam kasus. Mengenai pergeseran kedudukan suami pada masyarakat Jawa akan diuraikan yang bersifat umum.

Pergeseran kedudukan suami dalam kedudukannya sebagai kepala somah dapat terjadi apabila :

- suami telah meninggal;
- suami bertugas di luar daerah atau belajar di luar negeri; sedang isteri berada di rumah bersama anak-anak (pergeseran sementara);
- apabila terjadi perceraian dan anak-anak ikut ibunya.

Kedudukan suami dalam bidang sosial, untuk beberapa hal dapat digantikan oleh anak laki-laknya yang sudah dewasa, misalnya untuk menghadiri kenduri di rumah tetangganya, kerja bakti di kampung, rapat-rapat yang diadakan oleh kampung atau desa. Seorang anak laki-laki yang sudah dewasa dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai wali dalam akad nikah saudara perempuannya (kakak/adik kandung).

Kedudukan seorang suami sebagai kepala somah dalam keluarga inti atau keluarga batih, akan tergeser apabila ia pertempat tinggal bersama orang tuanya sendiri atau pada keluarga isteri, karena kepala somah berada pada kepala somah keluarga inti senior.

Dalam kehidupan masyarakat kota, pergeseran kedudukan suami dapat terjadi karena beberapa hal, sebagai contoh misalnya seorang isteri yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan, dalam instansi perkumpulan dsb. Sesungguhnya pergeseran kedudukan suami karena isteri pangkatnya lebih tinggi, hanya terdapat dalam bidang kedinasan. Sedang kedudukan suami sebagai kepala somah di rumah inti tidak tergeser karena kepangkatan isteri.

Seorang informan menceritakan bahwa suaminya tidak bekerja lagi karena tersangkut persitiwa G 30 S sehingga isterinya yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Waktu salah seorang anak perempuannya menikah, dalam surat undangan yang dicantumkan adalah nama isteri di depan nama suaminya. Meskipun kenyataannya suaminya masih hidup, tetapi karena isteri menganggap bahwa kedudukan suaminya sebagai pencari nafkah telah tergeser.

Contoh lain misalnya seorang isteri kepala desa yang menjabat sebagai camat di desanya atau di wilayahnya, dalam urusan dinas suami adalah dibawah kekuasaannya. Namun bukan berarti bahwa kedudukan suami sebagai kepala somah juga ikut tergeser.

b. Pergeseran peranan suami

Pergeseran peranan suami dalam kedudukannya sebagai kepala somah dapat terjadi apabila ada perceraian. Dalam hal ini apabila anak-anak ikut ibunya, maka peranan suami dalam bidang pendidikan terhadap anak-anaknya akan tergeser oleh peranan isteri yang menggantikan suami dalam mendidik anak-anak. Tidak jarang pula bahwa suami yang sudah bercerai kemudian menikah lagi dengan wanita lain peranannya sebagai pemberi nafkah terhadap keluarganya juga akan tergeser dengan sendirinya, karena kebanyakan tidak lagi memberikan nafkah untuk anak-anaknya.

Dalam kehidupan keluarga dikota-kota besar peranan suami sering tergeser karena kedudukan sang isteri dalam bidang pemerintahan, tugas-tugas dalam pekerjaannya atau dalam kegiatan sosial. Tidak jarang terjadi bahwa sang suami sebagai seorang pe-

nganggur atau pensiunan, sedang isterinya bekerja mencari nafkah, sang suami dirumah melakukan kegiatan pekerjaan rumah tangga seperti memasak mencuci atau mengasuh anak-anak. Dalam kasus semacam ini sebutan kepada isteri sebagai "kanca wingking" mungkin tidak berlaku.

Apabila terjadi perceraian, anak-anak biasanya dan juga lebih baik ikut pada ibunya. Meskipun tidak jarang pula terjadi ibunya akan menikah lagi sekali atau lebih. Akibatnya setelah dewasa anak-anak mempunyai ikatan yang lebih kuat terhadap ibunya daripada terhadap ayahnya. (6;48). Pertimbangan untuk tetap bersama ibu, karena pendapat umum dalam masyarakat Jawa bahwa ibu tiri lebih jahat daripada bapak tiri.

Kedudukan wanita dalam masyarakat Jawa pada umumnya sangat kuat. Sebagian besar pekerjaan, termasuk berbagai corak pekerjaan seperti kerja di sawah/ladang, dagang kecil, jual beli borongan, usaha kecil berupa industri rumah tangga, pembantu rumah tangga dan mengajar, semuanya terbuka bagi wanita. Wanita dapat memiliki tanah pertanian dan mengawasi penggarapannya. Dengan demikian tidak mengalami kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri serta anak anaknya, asal saja mau.

Pada somah yang *matrifokal*, wanita mempunyai otoritas, pengaruh dan tanggung jawab yang lebih daripada sumai. Wanita mempunyai bidang yang luas untuk bergerak dalam lingkungan keluarga dan kerumahtanggaan. Isterilah yang memberikan keputusan akhir terhadap sebagian besar masalah dalam rumah tangga. Dia mengendalikan semua keuangan keluarga dan meskipun diberikannya penghormatan formal kepada sang suami serta dalam soal-soal urusan rumah tangga yang penting selalu mendengar pertimbangannya, biasanya dialah yang dominan. Keluarga yang benar-benar didominasi oleh suami memang jarang terdapat.

c. Pergeseran Orientasi terhadap Kerabat

Gerak lajunya pembangunan di Indonesia telah membawa perkembangan dan perubahan sikap orang-

orang Jawa, yang mengakibatkan pergeseran orientasi terhadap kerabat. Melalui wahana pendidikan dimungkinkan seseorang dari lapisan bawah menduduki posisi yang penting dalam bidang pemerintahan yang semula hanya dapat diduduki oleh mereka yang berposisi tinggi.

Perkembangan teknologi dan sarana transportasi memungkinkan suatu bentuk kekerabatan dalam masyarakat Jawa mengalami perkembangan pula sehingga dapat menimbulkan pergeseran orientasi terhadap kerabat, misalnya dalam sistem perkawinan, pemilihan jodoh dsb.

Dalam masyarakat Jawa terdapat suatu pandangan tradisional mengenai perjodohan dengan semboyan : *bibit, bebet, bobot*, yaitu *bibit* artinya berdarah keturunan orang baik-baik, tidak ada yang mempunyai penyakit keturunan; *bebet*, artinya mempunyai darah priyayi atau bangsawan; sedang *bobot* artinya dari keluarga yang mampu atau berharta. Pandangan tradisional semacam itu telah tergeser oleh perkembangan pendidikan dewasa ini, yaitu bahwa kesempatan memperoleh pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi setiap warganegara Indonesia, sehingga memungkinkan mereka yang berdarah keturunan bukan priyayi melalui pendidikan akan dapat menduduki posisi yang bermartabat tinggi.

Orang Jawa tidak mempunyai konsep keluarga sederhana sebagai kesatuan dan tidak ada pula istilah khusus untuk pengertian itu. Kata-kata yang dimilikinya (*kulawarga, sedulur, sanak sedulur* dsb). Sekedar berarti saudara saja. Orang Jawa membedakan antara "*sedulur cedhak*" (saudara dekat) dan "*sedulur adoh*" (saudara jauh). Yang termasuk pengertian "Saudara dekat" yaitu orang tua ayah dan ibu (Kakek dan nenek kedua belah pihak), saudara-saudara kandung ayah dan ibu serta anak-anak mereka. Dalam pengertian istilah kekerabatan Jawa "*nak dulur*" atau "*sedulur misanan*" yaitu saudara sepupu dari pihak ayah dan ibu serta anak-anak mereka (kindred)

Dalam kenyataannya *sedulur misanan* jarang ber-

kumpul dan bertempat tinggal dalam satu tempat desa atau kota. Masih ada kemungkinan sedulur misanan bertempat tinggal dalam satu wilayah desa, tetapi jarang terjadi dalam satu kota. Karena tempat tinggal mereka berjauhan, maka diantara sedulur misanan kadang-kadang ada yang tidak saling mengenal. Hal semacam itu biasanya disebut "*kepaten obor*" (arti-sebenarnya kematian suluh), artinya seseorang yang tidak mengenal sanak saudaranya karena tidak pernah bertemu atau dipertemukan. Tidak jarang terjadi suatu perkawinan antara saudara dekat yang sebelumnya tidak saling mengenal asal-usulnya. Perkawinan yang masih ada hubungan kerabat disebut "*ngumpulake balung pisah*" (mengumpulkan tulang yang terpisah).

Untuk mempersatukan saudara dekat yang ada hubungan dari satu keturunan, maka dalam masyarakat Jawa ada kebiasaan membentuk perkumpulan keluarga yang disebut "*trah*". Sesungguhnya tradisi mengadakan perkumpulan trah semula timbul dari kalangan kerabat keraton, yaitu orang-orang yang termasuk dalam daftar silsilah seorang raja. Perkumpulan Trah yang mula-mula berdiri di Yogyakarta pada tahun 1912 yaitu perkumpulan trah keturunan Kesultanan Yogyakarta. Di Surakarta dalam tahun 1937 dibentuk perkumpulan *Trah Jipang*. "*Paguyuban Trah Hamengku Buwana I*" didirikan secara resmi dalam tahun 1951, meskipun mungkin perkumpulan tersebut telah terbentuk secara tidak resmi sebelum tahun 1951.

Kecuali pembentukan perkumpulan trah dikalangan keluarga kraton, yaitu para ndara (bangsawan), kemudian golongan priyayi juga membentuk suatu perkumpulan trah, misalnya *Ikatan Keluarga Soemodilogo*, yang berdiri dalam tahun 1970.

Di Yogyakarta dan Surakarta kebiasaan mendirikan perkumpulan trah juga terdapat di kalangan golongan *santri*, yang kebanyakan didirikan oleh golongan *santri kauman*. Trah santri misalnya *Bani Muhammad Raji* (didirikan dalam tahun 1955), *Ikatan Bani Mu'min* (1954) dsb.

Disamping itu ada juga perkumpulan trah dari ka-

langan "*wong cilik*". Sesudah Kemerdekaan Indonesia banyak muncul perkumpulan trah wong cilik, misalnya "*Trah Mbok Berek*" yang didirikan dalam bulan September 1979. Mbok Berek adalah keluarga petani yang berasal dari desa di dekat Candi Sari (Kalasan), terkenal karena usahanya membuka warung makan Ayam Goreng Mbok Berek. Sesudah Mbok Berek meninggal, namanya diabadikan dalam warung makan ayam goreng "*Mbok Berek*" dan cabang-cabangnya terdapat di kota-kota seperti Semarang, Surakarta, Bandung dan Jakarta yang didirikan oleh para keturunannya.

Dalam masyarakat Jawa ada tradisi bahwa saudara sepupu paralel pada pihak jalur ayah (laki-laki) tidak boleh atau berpantang saling menikah, yaitu anak-anak dari dua orang laki-laki bersaudara kandung, dalam istilah Jawa dinamakan "*pancer wali*". Pancer wali tersebut dalam tata cara pernikahan menurut agama Islam adalah bertanggung jawab menyerahkan untuk dinikahkan pengantin wanita kepada petugas nikah.

Dalam perkawinan adat yang melarang pernikahan antara pancer wali tersebut sesungguhnya bukan berdasarkan hukum Islam. Dalam masyarakat Jawa selalu dihindari perkawinan dari orang-orang yang masih ada hubungan darah dekat. Namun kini sering terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dari jalur keturunan lebih muda dengan seorang wanita dari jalur keturunan yang lebih tua, yang masih bersaudara dekat, dalam istilah Jawa disebut "*awune luwih tuwa*". Meskipun kenyataannya sang laki-laki usia lebih tua daripada si wanita. Perkawinan diantara mereka menurut adat Jawa sering dihindari. Namun kenyataannya sering terjadi perkawinan semacam itu seperti seorang "*paman*" memperisteri kemenakannya sendiri, menurut garis hubungan kerabat, atau sebaliknya seorang "*bibi*" diperisteri oleh "*kemenakan*" laki-laki

2. PERGESERAN KEDUDUKAN DAN PERANAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA

a. Pergeseran kedudukan isteri

Perkawinan merupakan suatu yang sangat penting

dalam perjalanan hidup seseorang. Di Jawa perkawinan merupakan pertanda terbentuknya suatu somah baru, yang biasanya akan segera melepaskan diri secara ekonomi maupun tempat tinggal, terpisah dari keluarga orang tua.

Perkawinan tersebut melibatkan dua buah somah yang akan dipersatukan melalui lahirnya seorang cucu yang menjadi milik bersama. Dalam masyarakat Jawa sebaiknya perkawinan dilakukan di antara mereka yang tidak ada pertalian saudara atau kerabat.

Pergeseran kedudukan isteri dapat terjadi jika suatu perkawinan itu berakhir dengan perceraian.

Pergeseran kedudukan isteri seperti tercermin dalam peribahasa Jawa yang berbunyi "swarga nunut neraka katut" yang mengandung pengertian bahwa wanita yang sudah bersuami dikiaskan kebahagiaan dan kesengsaraannya tergantung pada sang suami. Namun keadaan sekarang peribahasa semacam itu, lebih-lebih dalam kehidupan di kota-kota besar, tidak sesuai lagi.

Pergeseran kedudukan isteri dalam hubungannya dengan perkawinan, misalnya seorang gadis dari keturunan keluarga priyayi yang ayahnya memiliki gelar kebangsawanan "Raden", yaitu ia menikah dengan seorang jejaka yang bukan keturunan yang memiliki gelar "Raden", maka anak-anak mereka tidak berhak menggunakan gelar kebangsawanan tersebut.

Tetapi sebaliknya seorang laki-laki yang bergelar "Raden" jika ia memperisteri seorang wanita yang bukan berasal dari keturunan priyayi, anak-anak yang lahir dari kelahiran perkawinan mereka berhak memakai gelar "Raden" (untuk anak laki-laki) dan "Raden Rara" (untuk anak-anak perempuan).

Namun kehidupan di kota-kota besar asal keturunan yang berdarah bangsawan atau bukan umumnya tidak banyak dipersoalkan. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sukses hidupnya di kota-kota umumnya tidak karena darah keturunan bangsawan.

Pergeseran kedudukan isteri dalam rumah tangga apabila isteri dari keturunan bangsawan bersuamikan

seorang laki-laki yang bukan berdarah bangsawan, tetapi menduduki jabatan tinggi, maka kedudukan isteri terpendang bukan karena kebangsawanannya, tetapi karena martabat suaminya.

Dalam masyarakat Jawa dan juga pada suku bangsa lainnya, apabila seorang wanita telah menikah, panggilan nama dirinya akan terhapus oleh nama dari suaminya. Misalnya seorang wanita bernama Suwarti diperisteri oleh seorang laki-laki bernama Abdullah maka ia akan terbiasa dengan sebutan Nyonya Abdullah atau Ibu Abdullah.

b. Pergeseran peranan isteri

Pergeseran peranan isteri karena perceraian, dapat terjadi apabila suami memperisteri wanita lain sedang isteri yang pertama kembali kepada keluarga orang tua. Di rumah keluarga orang tua. Di rumah keluarga orang tuanya wanita yang sudah pernah menjadi isteri tersebut peranannya sebagai anggota keluarga inti orang tuanya, sering pula ikut serta anak-anaknya.

Perceraian memang sering terjadi di kalangan keluarga petani, para buruh kecil, yang memandang perceraian itu tidak baik namun juga tidak buruk sama sekali. Beberapa faktor penyebab perceraian di kota tetapi kasus penyelewengan seksual adalah yang terbanyak. Seorang informan (wanita) menjadi isteri seorang pegawai rendahan, semula hidup berbahagia, tetapi setelah mempunyai anak dua orang, perkawinannya berakhir dengan perceraian, karena sang isteri tergoda oleh seorang pemuda yang usianya lebih muda daripada dia. Alasan perceraian karena ibu mertuanya sering mencampuri urusan rumah tangganya.

Seorang informan wanita yang lain minta cerai kepada suaminya dengan alasan sejak kelahiran anaknya yang kedua suaminya menderita penyakit jiwa, kalau marah sering memukul isterinya dan malas bekerja. Isterinya terpaksa mencari nafkah dengan cara buruh mencuci pakaian beberapa tetangga sekitarnya. Si suami kembali ke rumah orang tuanya yang

tinggal sekampung dengan tempat tinggal suami-isteri tersebut. Anak-anaknya diambil oleh nenek dari pihak suami karena si suami adalah anak tunggal. Jika si isteri ingin melepaskan rasa rindunya kepada anak-anaknya dengan memberikan makanan, alat-alat sekolah atau uang selalu dilarang oleh sang mertua.

Pergeseran peranan isteri dalam kehidupan keluarga-keluarga di kota sebagai akibat modernisasi, terutama melanda keluarga pejabat dan para pegawai yang serba sibuk. Kebanyakan para suami yang sibuk menyebabkan mereka jarang berada di tengah-tengah keluarga, yaitu isteri serta anak-anak, sehingga isteri sering hanya sebagai pengasuh anak-anak di rumah dan tergeser peranannya sebagai isteri.

Seperti halnya pergeseran peranan suami, apabila setelah menikah ia bersama isterinya bertempat tinggal bersama dengan orang tua si isteri. Sebaliknya jika isteri ikut keluarga si suami yaitu bertermat tinggal bersama di rumah orang tua suami, pergeseran peranan isteri sering terjadi karena ibu mertua yang ingin selalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

c. Pergeseran orientasi kerabat

Dalam kehidupan beberapa keluarga di kota jika suami isteri keduanya bekerja menjadi pegawai instansi pemerintah atau swasta, menjadi guru dsb., sehingga untuk perawatan dan mengasuh anak-anaknya terpaksa diserahkan kepada pembantu atau salah seorang anggota kerabatnya. Kadang-kadang ada pula yang menitipkan anak-anak pada Panti-panti Penitipan Anak selama ditinggal oleh ayah dan ibunya bekerja. Namun tidak jarang pula yang menyerahkan asuhan anak-anaknya kepada salah seorang keluarga dari pihak suami atau isteri.

Salah satu faktor yang juga dapat menimbulkan pergeseran orientasi kerabat yaitu perceraian yang banyak menimpa keluarga-keluarga di perkotaan. Faktor perceraian di kota yang terbanyak adalah karena kasus penyelewengan seksual. Bagi suami yang tidak

bersedia menceraikan isteri pertamanya biasanya berusaha supaya isterinya bersedia dimadu karena ia akan mengawini wanita lain. Jika terjadi demikian, maka si suami terpaksa harus memberikan belanja kepada dua rumah tangga.

Pergeseran orientasi kerabat dalam masyarakat Jawa di perkotaan umumnya terjadi karena tempat tinggal para anggota kerabat berjauhan, bahkan ada pula yang berada di luar pulau Jawa, sehingga tidak mudah untuk saling berhubungan. Pertemuan antara anggota kerabat biasanya terjadi apabila ada kegiatan dalam salah satu keluarga misalnya jika ada perkawinan, kematian atau pada hari-hari besar keagamaan misalnya Hari Raya Idulfitri.

Supaya terpelihara hubungan antara sesama anggota kerabat ada yang mengadakan sistem arisan keluarga. Di kota-kota besar sistem arisan tidak lagi hanya terbatas untuk lingkungan kerabat tertentu, sering menjadi makin luas, yaitu meliputi berbagai kelompok seperti lingkungan pekerjaan, lingkungan wilayah tempat tinggal atau lingkungan daerah asal, Misalnya orang-orang yang berasal dari daerah Banyumas di kota Semarang mengadakan suatu perkumpulan Banyumas, orang-orang yang berasal dari Pekalongan, Wonogiri, Pati dsb. juga mengadakan perkumpulan berdasarkan asal daerah. Mungkin dalam perkumpulan asal daerah tersebut juga terdapat beberapa anggota yang masih ada hubungan kerabat. Namun yang menjadi orientasi perkumpulan tersebut dasarnya bukan karena adanya hubungan kerabat.

3. PERGESERAN KEDUDUKAN DAN PERANAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

a. Pergeseran kedudukan anak

Di kalangan penduduk di kota-kota besar mengenai bentuk perkawinan cenderung pada perkawinan yang tidak ada hubungan kekerabatan, karena apabila perkawinan itu terjadi dari keluarga yang dekat, jika terjadi suatu perceraian, maka dapat mengakibatkan hubungan keluarga dekat itu menjadi retak.

Hubungan antara ayah-anak mempunyai intensitas

khusus, yaitu waktu si anak sudah mulai dapat berjalan sampai menjelang masa memasuki sekolah. Sesudah si anak mulai memasuki masa sekolahnya hubungan dengan ayah menjadi kurang dekat lagi. Tetapi hubungan dengan ibu akan tetap kokoh sepanjang hidupnya. Selama satu babak paling awal kehidupan si anak itulah aspek peranan sang ayah itu tergeser.

Segera sesudah anak menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan bisa dipercaya, baik laki-laki maupun perempuan, diberi tugas mengasuh (momong) adiknya yang masih kecil. Pada umumnya kakak baik laki-laki atau perempuan, memberikan kasih sayang yang mendalam atas momongannya itu dan tanpa disadari tidak dihindari perasaan iri terhadap adiknya yang kecil. Hubungan antara kakak perempuan dan adik laki-lakinya merupakan salah satu diantara pertalian di kalangan orang-orang dewasa Jawa yang paling tahan lama. Kakak perempuan, sebagai halnya ibu, dikatakan mempunyai perasaan cinta tanpa syarat terhadap adik laki-lakinya.

Seorang anak tunggal atau anak terkecil di tengah keluarga dimungkinkan lebih lama bersifat kekanak-kanakan, tetapi tidak demikian halnya bagi anak yang masih mempunyai saudara-saudara yang lebih muda.

Seorang anak laki-laki yang mulai menginjak masa remaja biasanya hubungan dengan ayahnya kurang dekat. Unsur-unsur yang menyebabkan kerenggangan yaitu timbulnya perasaan *wedi* (takut), *isin* (malu) dan *sungkan* (segan). Anak-anak Jawa diajar tentang bagaimana dan bilamana ia harus *wedi* dan *isin*. Antara ibu dan anak biasanya tidak pernah ada perasaan *isin*.

b. Pergeseran peranan anak

Ketika anak berkembang menjadi dewasa, dia mulai menyetujui bahwa orang di sekitarnya tidak peduli sebagaimana yang dahulu diperbuatnya. Selanjutnya dia diharapkan mematuhi orang tuanya dan jika si anak ingkar dari harapan itu merekapun akan menerima hukuman dari orang tuanya.

Pergeseran peranan anak ketika mulai memasuki masa remaja yaitu hubungannya dengan ayahnya mulai merenggang, tetapi hubungan dengan ibunya masih tetap akrab.

Sesudah kira-kira berumur 6 tahun, secara perlahan-lahan anak sudah mulai memasuki dunia yang ada diluar keakraban Somah. Di kota hampir semua anak pergi ke sekolah untuk belajar bagaimana tingkah laku hormat terhadap guru. Anak perempuan kecil mulai berkenalan dengan dunia jual beli, belajar untuk keluarga, kadang-kadang juga menggantikan peranan ibu selama waktu tertentu.

Anak laki-laki kecil diberi kebebasan bermain dengan teman-teman sebayanya. Di pedesaan anak laki-laki kecil sudah mulai mengenal pekerjaan membantu orang tuanya misalnya menggembala ternak. Anak perempuan harus tinggal di rumah dan belajar bertanggung jawab mengenai rumah tangga.

Anak-anak dari golongan priyayi sering kali memperoleh kebebasannya bermain sedikit lebih terlambat daripada anak golongan lain, karena orang tua mereka melarangnya bermain-main dengan anak tetangganya karena khawatir bahwa mereka akan mempengaruhi anak-anaknya dengan perbuatan yang tidak baik. Namun anak-anak priyayi akhirnya juga harus bersekolah dan mulailah mereka bergaul dengan teman-teman sebayanya.

Perasaan yang pertama-tama melalui pergeseran peranan ayah dan yang dengan demikian memberikan kesempatan kepada anak untuk pertama kali memainkan peranan selayaknya sebagai orang dewasa. Menemui hubungan yang semakin meningkat antara anak-anak dan orang dewasa di luar keluarga, sehingga anak Jawa ini buat pertama kali mempunyai kesempatan yang luas dan berarti untuk melakukan transisi ke arah kedewasaan yang bercorak Jawa.

c. Pergeseran Orientasi kerabat

Ketika anak laki-laki menginjak remaja biasanya ia boleh memulai mencari nafkah, tetapi dalam kelu-

arga di kota-kota kebiasaan mencari nafkah dalam usia remaja tidak bersifat umum, kebanyakan mereka masih melanjutkan sekolahnya.

Perubahan yang terjadi di dalam hubungan kemasarakatan masa remaja tersebut bertalian dengan tercapainya pula kematangan seksual. Bagi anak perempuan masa remaja ini menurut adat sedapat mungkin segera dikawinkan. Tetapi kini perkawinan tersebut mungkin ditunda beberapa tahun, biasanya karena alasan sekolah. Khitan hanyalah merupakan langkah pertama bagi anak laki-laki menuju kedewasaan. Dari saat-saat terakhir masa kanak-kanaknya, anak laki-laki diharapkan bersikap hormat terhadap ayahnya, menghindari berbicara dengannya kecuali jika sangat perlu.

Bagi seorang anak perempuan, masa remaja diawali dengan datangnya menstruasi pertama, sedangkan bagi anak laki-laki dengan upacara khitanan. Umumnya anak laki-laki dikhitan dalam usia antara 10-14 tahun. Periode masa remaja bagi anak laki-laki berlangsung lebih lama dari pada anak perempuan.

Dalam masyarakat pedesaan masih terdapat kebiasaan mengawinkan anak perempuan dalam usia dibawah 17 tahun. Meskipun anak perempuan lebih awal memasuki jenjang perkawinan, namun mereka tetap lebih banyak bergantung pada ibu dan ayahnya sepanjang hidupnya.

Hubungan antara anak laki-laki dengan ayahnya terdapat kecanggungan, sehingga mempersulit mereka hidup bersama. Setelah menikah anak laki-laki lebih banyak cenderung untuk memisahkan diri dari keluarga orang tuanya, tetapi tidak tertutup kemungkinannya untuk bertempat tinggal bersama dengan orang tua pihak isteri.

Seorang bapak yang ingin memerlukan bantuan tenaga laki-laki untuk pekerjaannya, misalnya dalam berdagang atau bekerja disawah, biasanya lebih cenderung kepada menantu laki-laki dari pada kepada anak laki-lakinya sendiri. Seorang laki-laki dewasa yang terpaksa harus bertempat tinggal terpisah dari

keluarganya di kota lain lebih cenderung untuk bertempat tinggal bersama saudaranya perempuan dari pada saudaranya laki-laki, jika keduanya berada se-kota.

Poligami kebanyakan melanda para keluarga petani kaya, pengusaha atau pedagang. Namun di kalangan penduduk kota juga terdapat poligami di kalangan para pegawai negeri kebanyakan keluarga poligami membagi diri dalam keluarga terpisah untuk menghindari perselisihan di antara isteri-isterinya. Dalam hal demikian masing-masing rumah tangga secara sosial dan ekonomi terpisah dan masing-masing tidak berbeda seperti somah yang diperluas.

Kebanyakan poligami tidak dilakukan secara musyawarah dengan isteri pertamanya, tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan harapan agar supaya isteri pertamanya tidak akan mengetahui. Karena suami dituntut untuk mendapat ijin dari isteri pertama sebelum mengambil isteri kedua, maka perkawinan secara sembunyi-sembunyi tersebut melanggar hukum. Tetapi mereka sering mengelabui pejabat-pejabat agama setempat.

Apabila poligami secara sembunyi-sembunyi akhirnya diketahui oleh isteri pertama, maka segera mendatangi pejabat agama untuk diselesaikan.

D A F T A R P U S T A K A

- Astrid s. Susanto, Dr. Phil., *Pengantar Sosial dan Perubahan Sosial*. Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1977.
- BAPPEDA KOTAMADYA SEMARANG, *Program Penentuan Hari Jadi Kota Semarang*, Semarang, 1977.
- Bayu Surianingrat, Drs. *Pemerintah dan Administrasi Desa*. PT. Mekar Djaja, Bandung, 1976.
- Bintarto, Prof. Drs. R., *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Judul asli : *The Religion of Java*. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Pustaka Jaya, Jakarta 1981.
- Geertz, Hildred. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Diterbitkan oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS-UI, Jakarta, 1981.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. Diterjemahkan oleh Hersri, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta, 1983.
- Hans-Dieter Evers. *Sosiologi Perkotaan*. Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia. Penerbit LP3ES, Jakarta, 1982.
- Harjowirogo, Drs. Marbangun., *Manusia Jawa*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1983.
- Ihromi T.O. (editor), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Penerbit P.T. Gramedia, Jakarta, 1980.
- JAWA TENGAH SELAYANG PANDANG, Kantor Sensus & Statistik Propinsi, Daerah ingkat I Jawa Tengah, Semarang 1981.
- Kartodirdjo dkk., Sartono. *Sejarah Nasional Indonesia III*, Departemen P & K, Jakarta, 1975.
- Koentjaraningrat (Penyunting). *Masalah-Masalah Pembangunan*. Bunga Rampai Antropologi Terapan. Penerbit LP3ES, Jakarta, 1982.

Koentjaraningrat (Redaksi), *Metode-Metode penelitian Masyarakat*. Penerbit P.T. Gramedia, Jakarta, 1977.

Koentjaraningrat., Prof. Dr. (Redaksi), *Manusia dan Kebudayaan* Cetakan keenam. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981.

Perwodarminto, W.Y.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1951.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*, Jakarta, Departemen P & K, 1978.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah*, Dep. P & K, Jakarta, 1978.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, *Rencana Kota Semarang*, 1975 - 2000.

Sagimun MD dan Rivai Abu (ed), *Sistim Gotong Royong dalam Masyarakat Desa Daerah Jawa Tengah*. Dep. P & K. Proyek IDKD 1979 / 1980.

Syafri Sairin, *Javenese Trah*. Kin-Based Social Organization, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982.

I N D E K S

A

Aji Saka, 24
Alur Waris, 42
Aluvial, 16
ALuvial Hidromorf, 16
Aluvial Kelabu, 16
Aluvial Margalif, 16
Asok tukon. 39

B

Batih , 40
Bawon , 32, 33
Bekel , 18
Bibi , 38
Bojo , 44
Brayat , 70
Bun Upas, 15
Buyut , 70

C

Celering, 17

D

Dara gepak , 18
Dawuan , 17
Derep , 32
Dewatacengkar, 24
Dolog , 17

E

Embah (mbah) , 43
Erosi , 17
Eugene Dubuis, Dr, 24
Eyang, Eyang buyut, 43

G

Gambut , 16
Gajah biru , 17
Garu , 47
Gewesten , 11

H

Hutan agatis , 17
Hutan cagar alam , 17
Hutan pinus , 17
Hutan primer , 17

I

Ijab Kabul, 39

J

Jeng (dhiajeng), 69
Joglo , 22

K

Kamituwa, 18
Keluarga inti , 40
Kepala somah, 40
Kindred, 42
Kanca estri , 68
Kanca wingking , 68
Kota atas , 20
Kota bawah , 20
Krama, Krama Inggil, 44, 45
Kucing hutan, 17
Kulawarga , 40

L

Lanang, 43
Limasan , 18
Luku , 31

M

Magang , 39
Maratuwa, 44
Margalit, 16
Matun, 32

Mbah (embah), 43
 Mbedah, 31
 Mbok (simboke), 43
 Mikul dhuwur, mendem jero, 71, 72

N

Nak dulur , 38
 Nakokake, 39
 Ndhuk , 85
 Ngarang wulu , 38
 Ngenger , 39
 Nglaju , 64
 Nglawed , 31
 Ngoko , 44
 Ngunggah-unggahi, 38
 Nok, 85
 Nontoni , 39
 Nuclear family, 67
 Nyadran, 43

O

Ordonantie , 12

P

Paman, 38
 Pancer lanang , 38
 Pandega , 33
 Pancer wali, 33, 38
 Pawon, 41
 Podsolik, 16
 Poligini, 40
 Pondhok bara, 34
 Prawan, 38
 Provincie ordonantie, 12

S

Sanak sedulur, 43
 Sedulur misan, 38
 Semarang Gewest, 12
 Siwa (uwa), 43
 Somah, 40

Serotong, 18
Staads gemante, 13
Staatsblad, 12, 13
Suwarga nunut neraka katut, 72
Syuu, 13

T

Tandur, 31
Tawang gantungan, 68
Tebasan, 33
Trah, 43
Triman, 39
Trinil, 31

U

Utrolokal, 41
Uwa, 43

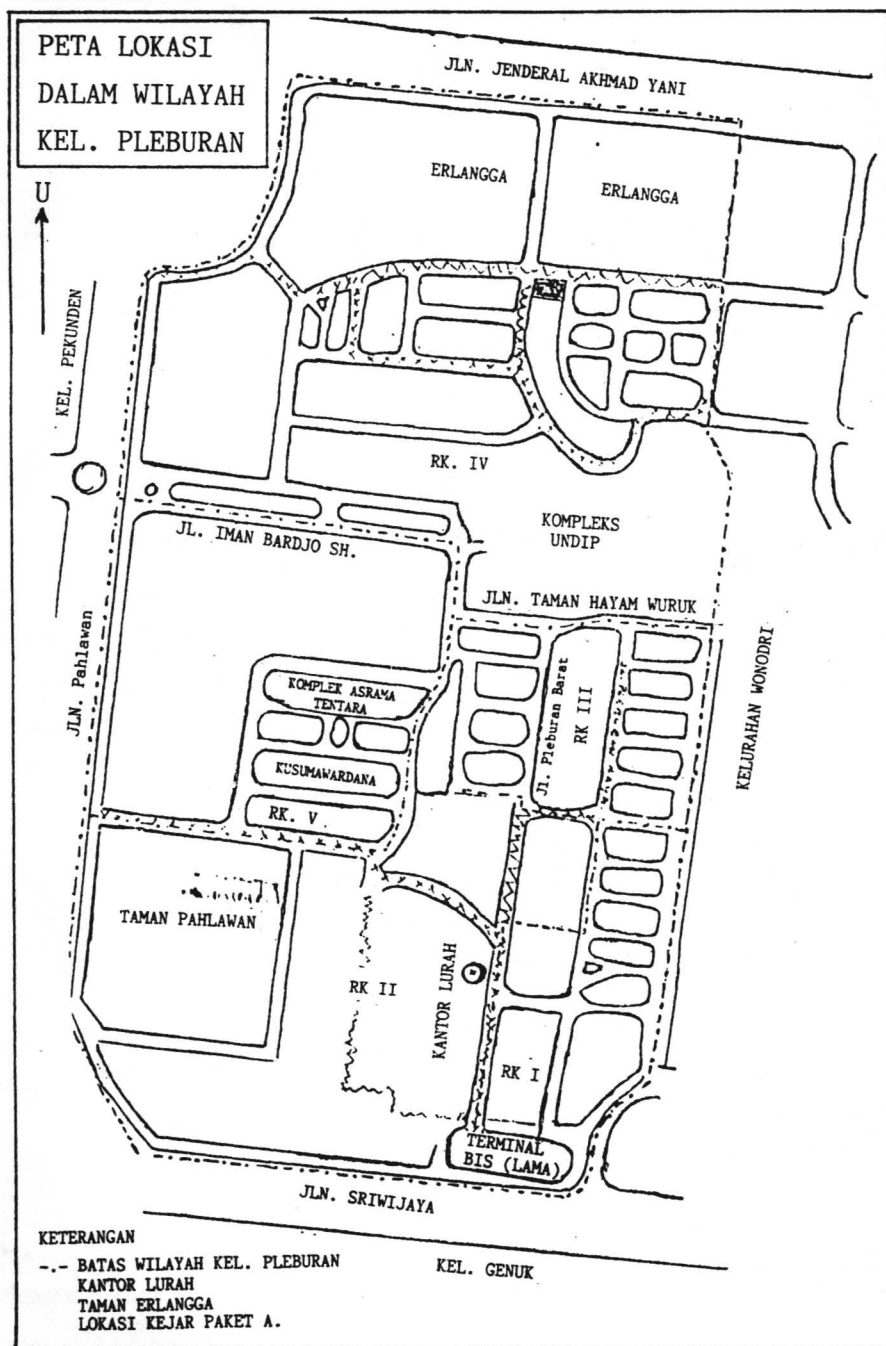
V

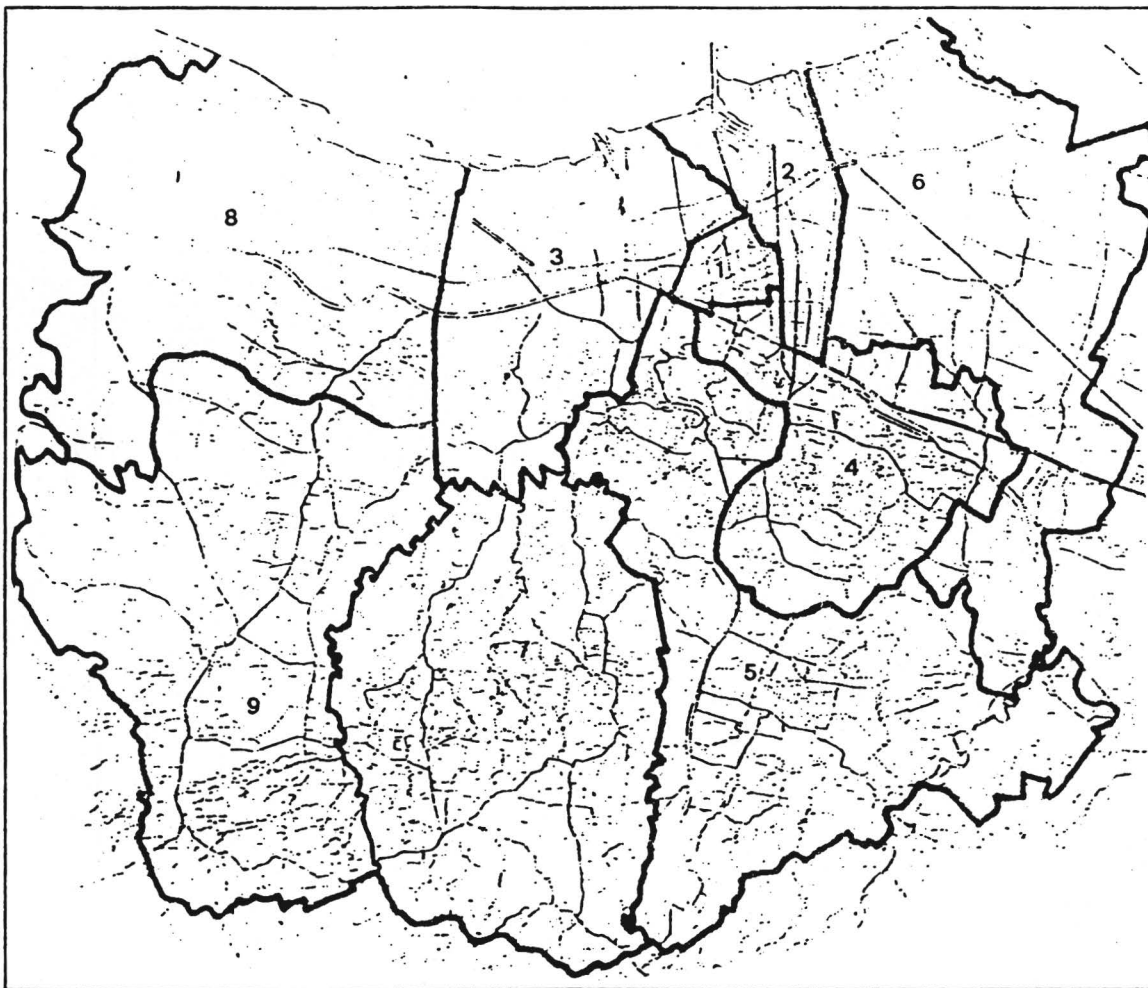
Vegetasi, 16
Virilokal, 41
Vorstenlanden, 13
Vulkan, 16

W

Waluku, 31
Wayuh, 38
Wadon, 43
Wong mbelah, 33

LAMPIRAN - I





PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

RENCANA KOTA SEMARANG 1975 - 2000

PETA
DATA
BATAS ADMINISTRASI

LEGENDA

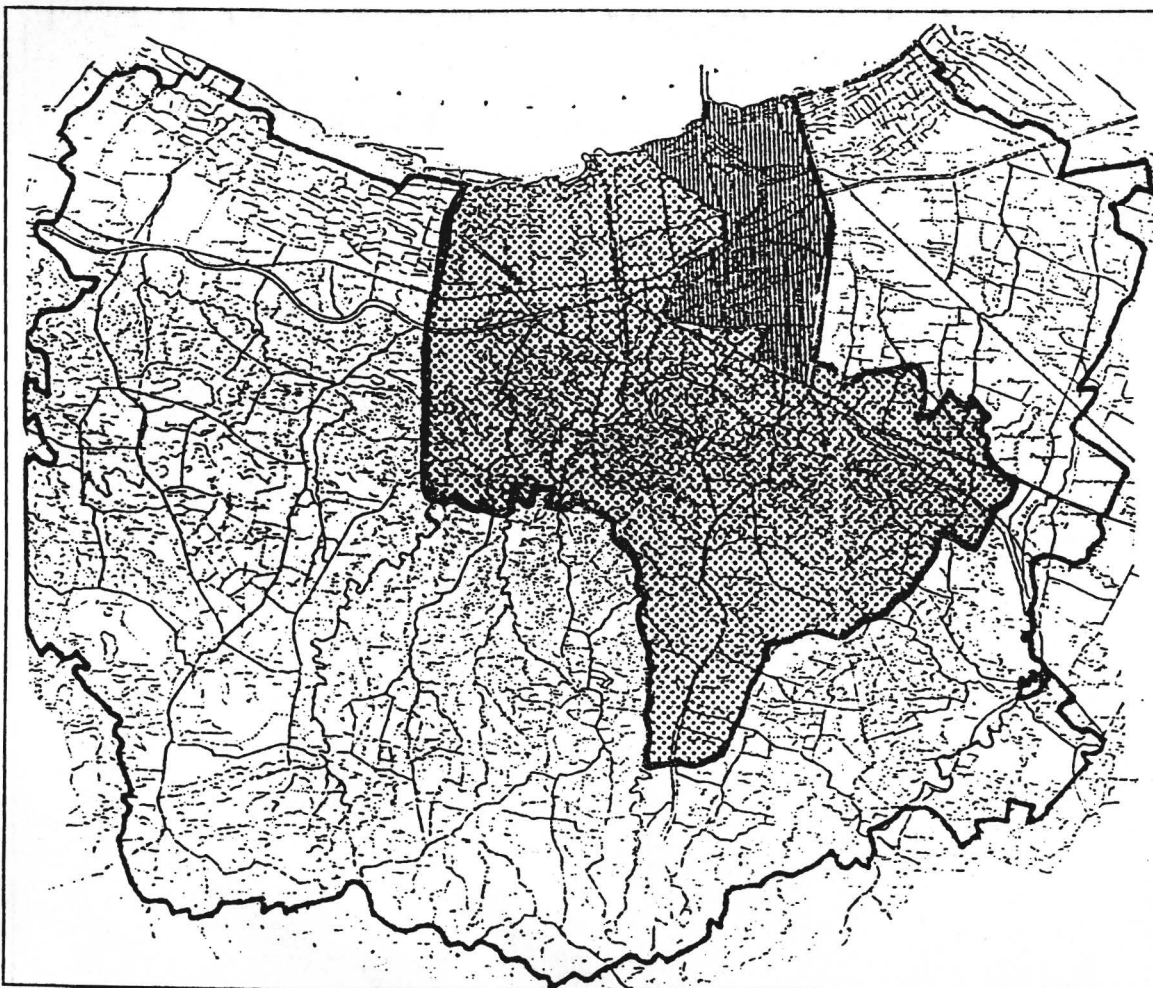
1. Kec. Semarang Tengah
2. Kec. Semarang Utara
3. Kec. Semarang Barat
4. Kec. Semarang Timur
5. Kec. Semarang Selatan
6. Kec. Genuk
7. Kec. Gunungpati
8. Kec. Tugu
9. Kec. Mijen



Skala : (1 : 100.000).
0 1000 2000 3000 4000 5000
5 k

Sumber

code



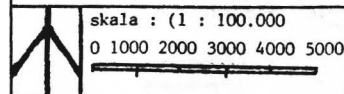
PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

RENCANA KOTA SEMARANG 1975 - 2000

PETA
DATA
KEPADATAN PENDUDUK

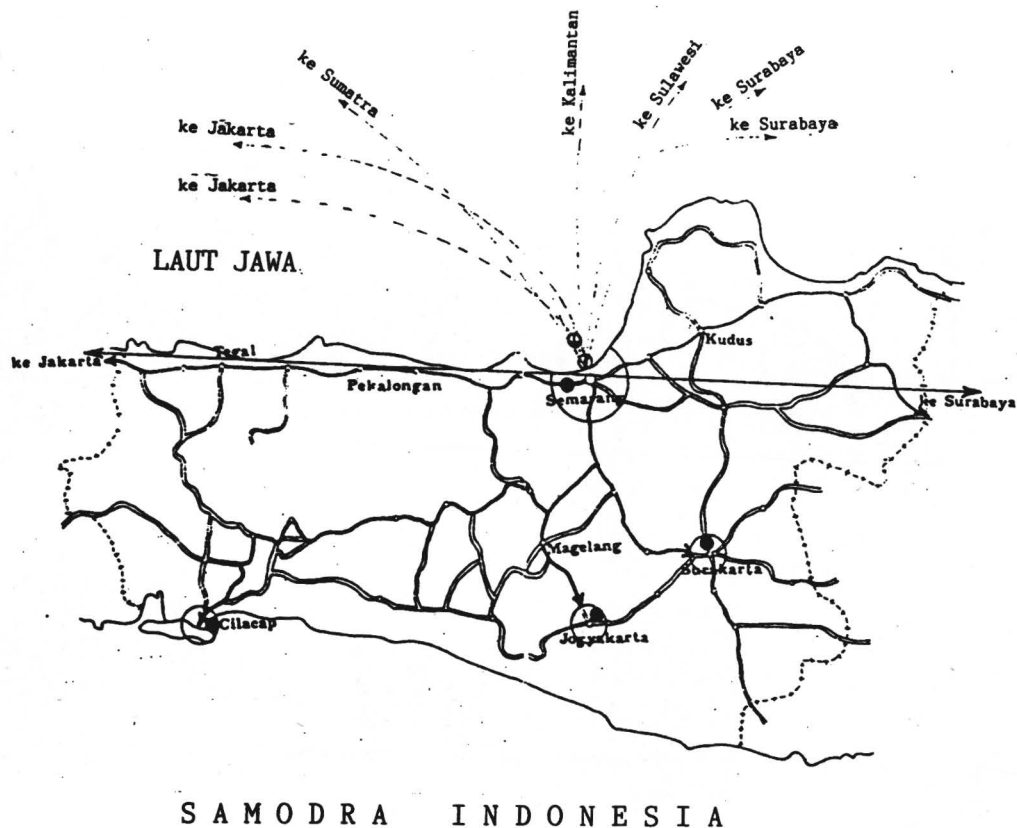
LEGENDA

	150 - 300 jiwa =
	≤ 60 jiwa =
	< 10 jiwa =



Sumber

code



PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

RENCANA KOTA SEMARANG 1975 - 2000

PETA
DATA
PERHUBUNGAN

LEGENDA

- Perhubungan darat
- - - Perhubungan udara
- ... Perhubungan laut (Tongkat)
- - - Perhubungan laut (kapal besar)
- Lapangan udara
- ① Pelabuhan laut tongkat
- ② Pelabuhan laut kapal besar



sumber

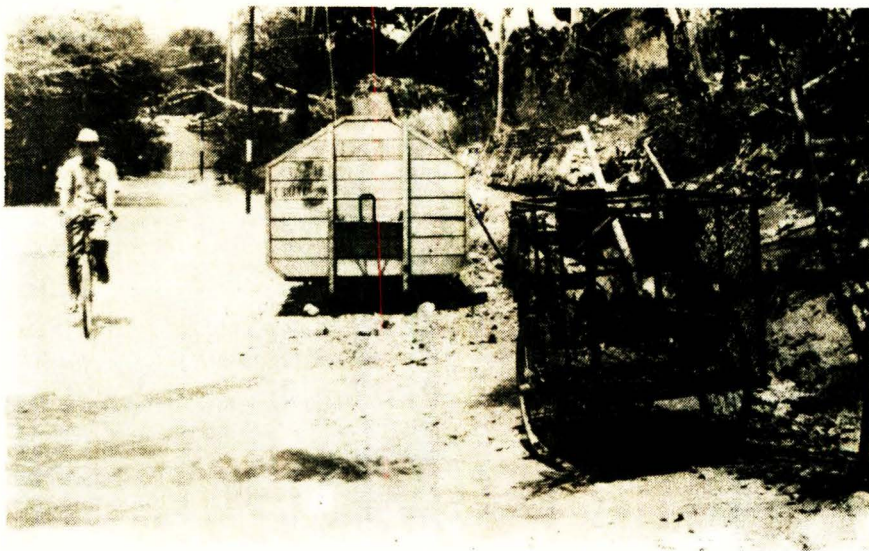
code



1. Kantor Kelurahan Pleburan



2. Kegiatan Kantor Kelurahan Pleburan



3. Alat angkut sampah di Kelurahan Pleburan



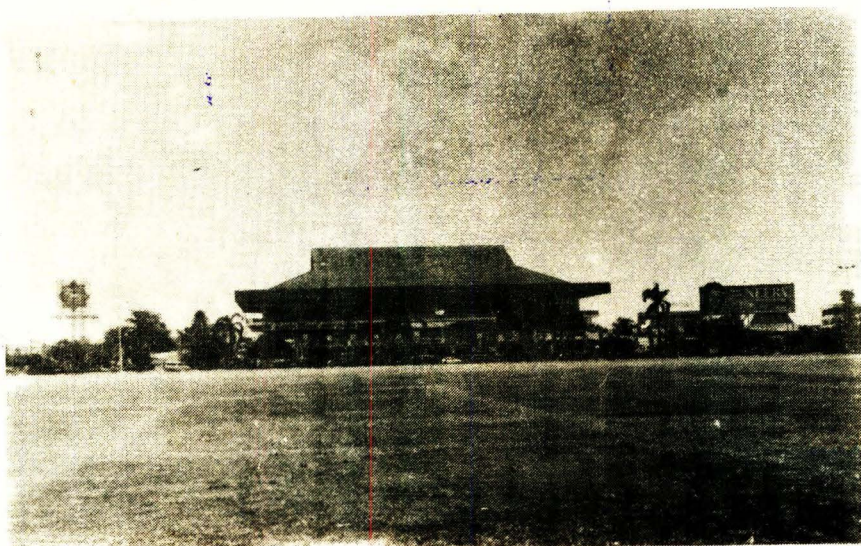
4. TK di Kelurahan Pleburan



5. SD Negeri di Kelurahan Pleburan



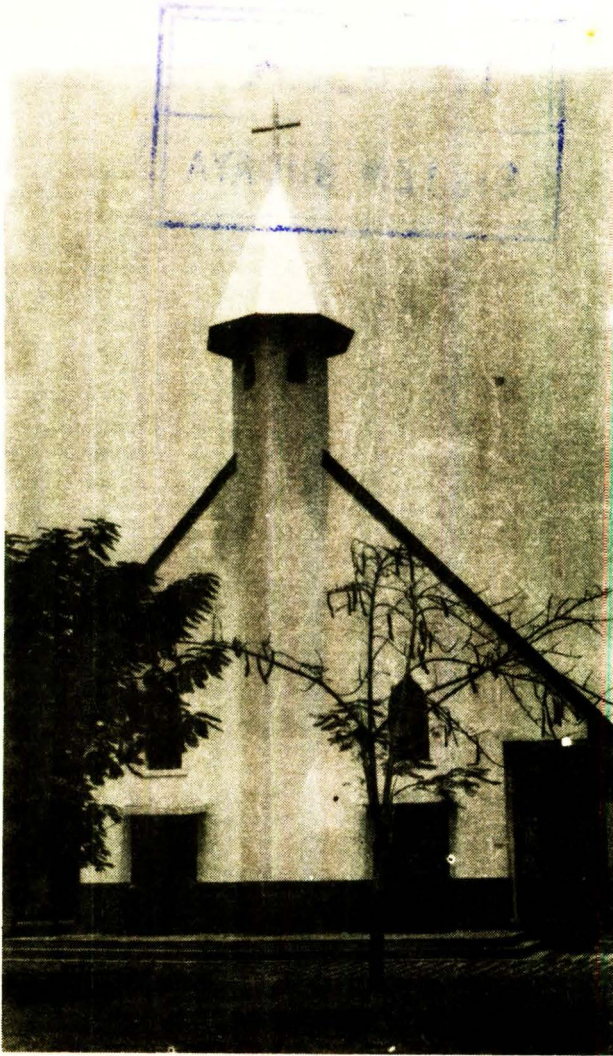
6. Kegiatan bermain siswa SD



7. Gedung Olah Raga Jawa Tengah



8. Masjid Baitur Rachman



9. Gereja di Kelurahan Pleburan



MILIK

SISTEM BUDAYA

DAFTAR MODULINISI: FENOMENA LUBINGAN NALAMADATAY DI DAERAH SAWA TENORIT